IDENTIFIKASI & ANALISIS

FAKTOR PENGUNGKIT RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2021-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2022

IDENTIFIKASI & ANALISIS
FAKTOR PENGUNGKIT RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2021-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatNya publikasi ini dapat terwujud. Publikasi **IDENTIFIKASI DAN ANALISIS FAKTOR PENGUNGKIT INDIKATOR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA** disusun oleh **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapppeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara** bekerjasama dengan **LPPM Universitas Kaltara tahun anggaran 2022**.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi mengenai beberapa analisis ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dengan menggunakan Tabel Input-Output sebagai acuan dasar analisis yang dapat bermanfaat, baik untuk evaluasi maupun perencanaan pembangunan daerah mendatang.

Untuk itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Saran untuk penyempurnaan dokumen ini sangat kami harapkan dan semoga bermanfaat bagi pengguna data.

Tanjung Selor, Desember 2022

Kepala LPPM Universitas Kaltara,

EKO WAHYUDI, ST, MT.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 3
1.2. Identifikasi dan Batasan Analisis 5
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 7
1.5. Hasil/Keluaran 7

BAB 2. KONSEP-DEFINISI-LANDASAN TEORI 9
2.1 Teori Tabel Input Output 11
2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 23
2.3. Perencanaan Pembangunan Daerah 24
2.4. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah 24
2.5. Sektor Unggulan dan Sektor Basis dalam Perekonomian Daerah 25

BAB 3. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS FAKTOR PENGUNGKIT RPJMD . 27
3.1 Identifikasi dan Analisis Faktor Pengungkit RPJMD 31
3.1.1. Indikator Tujuan. 34
3.1.2. Indikator Sasaran RPJMD. 55

BAB 4. ANALISIS PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PENDEKATAN MULTI-SEKTORAL 107
4.1. Sumber data..... 109
4.2. Matriks Pengganda.. 109
4.3. Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi 110
4.4. Gambaran Perekonomian dalam Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) menurut Lapangan Usaha..... 112
4.5. Gambaran Perekonomian dalam Tabel Input-Output (I-O)..... 116
4.5.1. Struktur Permintaan dan Penawaran 116
4.5.2. Struktur Output dan Nilai Tambah Bruto 118
4.5.3. Struktur Permintaan Akhir..... . 121
4.5.4. Struktur Ketenagakerjaan..... . 122
4.6. Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi..... . 124
4.6.1. Backward Linkage dan Forward Linkage..... . 124
4.6.2. Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan . . 127
4.7. Penentuan Sektor Unggulan 131

BAB 5 ANALISIS OPTIMASI PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SUATU MODEL INPUT-OUTPUT. . 133
5.1. Perencanaan Pembangunan 136
5.2. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian..... . 136
5.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..... . 137
5.4. Optimasi Anggaran Pemerintah Daerah 138
5.5. Analisis Deskriptif 138
5.6. Matriks Pengganda..... . 138
5.7. Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi 139
5.8. Analisis Dampak 140
5.9. Gambaran APBD Provinsi Kalimantan Utara..... . 140
5.10. Gambaran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dalam PDRB . 144

5.11. Gambaran Sektor Ekonomi dalam Tabel Input-Output 148
5.11.1. Sumber Pertumbuhan Ekonomi 148
5.11.2. Komponen Permintaan Akhir Pencipta Output, Tenaga Kerja, dan NTB. 149
5.11.3. Kontribusi Permintaan Akhir pada Penciptaan Output, Tenaga Kerja, dan Pajak. 150
5.12. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi 152
5.12.1. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi. 153
5.12.2. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi terhadap Penciptaan Kompensasi Tenaga Kerja (Upah Gaji) 154
BAB 6 PENUTUP 157
6.1 Kesimpulan 159
6.2 Rekomendasi Kebijakan 159
DAFTAR PUSTAKA 161

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Nasional	34
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi	35
Tabel 3.3	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2022	36
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia	36
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	38
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Indeks Layanan Infrastruktur	39
Tabel 3.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2021 Menurut Kabupaten Kota dan Provinsi (Persen)	40
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi	40
Tabel 3.9	Nilai PDRB (ADHK) Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)	41
Tabel 3.10	Target dan Realisasi PDRB ADHK	41
Tabel 3.11	Nilai PDRB (ADHB) Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)	42
Tabel 3.12	Target dan Realisasi PDRB ADHB	42
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama	43
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Nilai Intensitas Energi	44
Tabel 3.15	Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021	45
Tabel 3.16	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender	45
Tabel 3.17	Indeks Pembangunan Gender Menurut Komponen, 2021	46
Tabel 3.18	Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2021	48
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender	48

Tabel 3.20	Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Komponennya, 2017-2021	48
Tabel 3.21	Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	50
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi	50
Tabel 3.23	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021	51
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Indeks Williamson	51
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Proposri Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal	52
Tabel 3.26	Target dan Realisasi Tahapan Pembentukan DOB yang Dipenuhi	53
Tabel 3.27	Ringkasan Identifikasi dan Analisis Indikator Tujuan	54
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Angka Kriminalitas Tertangani	55
Tabel 3.29	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan	56
Tabel 3.30	Target RPJMD dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Utara	56
Tabel 3.31	Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Nasional	59
Tabel 3.32	Target dan Realisasi Predikat SAKIP	60
Tabel 3.33	Target dan Realisasi Maturitas SPIP	61
Tabel 3.34	Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62
Tabel 3.35	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022	63
Tabel 3.36	Target RPJMD dan Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Utara	63
Tabel 3.37	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022	64
Tabel 3.38	Target RPJMD dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara	64

Tabel 3.39	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2016-2022	66
Tabel 3.40	Target RPJMD dan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara	67
Tabel 3.41	Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021	67
Tabel 3.42	Target RPJMD dan Realisasi Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara	67
Tabel 3.43	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota, Tahun 2016-2021	68
Tabel 3.44	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka	69
Tabel 3.45	Target dan Realisasi Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK	70
Tabel 3.46	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air	71
Tabel 3.47	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Udara	73
Tabel 3.48	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Menurut Kabupaten Kota, 2017-2022	74
Tabel 3.49	Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara	74
Tabel 3.50	Indeks Kualitas Air Laut Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2020-2022	75
Tabel 3.51	Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Utara	75
Tabel 3.52	Target RPJMD dan Realisasi Cakupan Layanan Transportasi antar Pusat Kegiatan	77
Tabel 3.53	Cakupan Layanan Air Bersih Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2017-2021	77
Tabel 3.54	Target RPJMD dan Realisasi Cakupan Layanan Air Bersih Provinsi Kalimantan Utara	78
Tabel 3.55	Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2019-2022	78
Tabel 3.56	Target RPJMD dan Realisasi Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Utara	79

Tabel 3.57 Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2016-2021 79

Tabel 3.58 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara 80

Tabel 3.59 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 81

Tabel 3.60 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara 82

Tabel 3.61 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 82

Tabel 3.62 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kalimantan Utara 83

Tabel 3.63 Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2016-2021 83

Tabel 3.64 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara 83

Tabel 3.65 Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021 84

Tabel 3.66 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara 84

Tabel 3.67 Target dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan 86

Tabel 3.68 Target dan Realisasi Skor Dimensi Toleransi 87

Tabel 3.69 Target dan Realisasi Skor Dimensi Kesetaraan 88

Tabel 3.70 Target dan Realisasi Skor Dimensi Kerjasama 90

Tabel 3.71 Target dan Realisasi Capaian Rumah Tangga yang Teraliri Listrik 91

Tabel 3.72 Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi 92

Tabel 3.73 Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2021 93

Tabel 3.74 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Provinsi Kalimantan Utara 93

Tabel 3.75	Rasio Angka Harapan Hidup P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021	94
Tabel 3.76	Target dan Realisasi Rasio Angka Harapan Hidup P/L	94
Tabel 3.77	Rasio Rata-Rata Lama Sekolah P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022	95
Tabel 3.78	Target dan Realisasi Rasio Rata-rata Lama Sekolah P/L	95
Tabel 3.79	Rasio Angka Harapa Lama Sekolah P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022	96
Tabel 3.80	Target dan Realisasi Rasio Harapan Lama Sekolah P/L	96
Tabel 3.81	Rasio Pengeluaran Perkapita P/L Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2016-2021	97
Tabel 3.82	Target dan Realisasi Pengeluaran per Kapita P/L	97
Tabel 3.83	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda	98
Tabel 3.84	Pertumbuhan Koperasi Sehat Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2021	99
Tabel 3.85	Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan Koperasi Sehat Provinsi Kalimantan Utara	99
Tabel 3.86	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2022	100
Tabel 3.87	Target RPJMD dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM Provinsi Kalimantan Utara	101
Tabel 3.88	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2017-2021	101
Tabel 3.89	Target RPJMD dan Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi Provinsi Kalimantan Utara	102
Tabel 3.90	Indeks Gini Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021	102
Tabel 3.91	Target RPJMD dan Realisasi Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara	103
Tabel 3.92	Target dan Realisasi Jumlah Desa Mandiri	104
Tabel 3.93	Target dan Realisasi Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	104

Tabel 3.94	Target dan Realisasi Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Dikembangkan	105
Tabel 3.95	Ringkasan Identifikasi dan Analisis Indikator Sasaran	106
Tabel 3.96	Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, 2016-2021 (Persen)	113
Tabel 3.97	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha ,2016-2021 (Persen)	115
Tabel 3.98	Ringkasan Permintaan dan Penawaran (miliar rupiah), 2021	117
Tabel 3.99	Ringkasan Output dan Nilai Tambah Bruto, 2021	119
Tabel 3.100	Nilai Tambah Bruto Menurut Komponennya, 2016 (miliar rupiah)	120
Tabel 3.101	Komposisi Permintaan Akhir Tabel I-O Provinsi Kalimantan Utara	121
Tabel 3.102	Permintaan Akhir Menurut Sektor Ekonomi, 2021	122
Tabel 3.103	Nilai Tambah Bruto, Kompensasi Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Produktivitas menurut SektorEkonomi, 2021	123
Tabel 3.104	Direct Backward Linkage (DBL) dan Direct and Indirect Backward Linkage (DIBL) Menurut Sektor Ekonomi, 2021	125
Tabel 3.105	Direct Forward Lingkage (DFL) dan Direct and Indirect Forward Lingkage (DIFL) Menurut Sektor Ekonomi, 2021	126
Tabel 3.106	Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) Menurut Sektor Ekonomi, 2021	128
Tabel 3.107	Indeks Daya Penyebaran (IDP), Indeks Derajat Kepekaan (IDK) dan Indeks Total Keterkaitan menurut Sektor Ekonomi, 2021	130
Tabel 3.108	Lapangan Usaha Unggulan Provinsi Kalimantan Utara, 2021	131
Tabel 3.109	Struktur APBD Provinsi Kalimantan Utara 2019-2021 (Miliar Rupiah)	142
Tabel 3.110	PDRB Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Miliar Rupiah)	146

Tabel 3.111 PDRB Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Miliar Rupiah) 146
Tabel 3.112 Distribusi PDRB Kalimantan Utara ADHB Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Persen) 147
Tabel 3.113 Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Persen) 147
Tabel 3.114 Total Permintaan Akhir - Tabel Input-Output Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Produsen Menurut 17 Kategori ... 148
Tabel 3.115 Dampak Pengganda Output, Tenaga Kerja, dan NTB, 2021 150
Tabel 3.116 Kontribusi Permintaan Akhir pada Penciptaan Output, Tenaga Kerja, dan Pajak, 2021 151
Tabel 3.117 Rasio Output, Tenaga Kerja, dan Pajak yang Terbentuk dengan Jumlah Permintaan Akhir yang Membentuknya, 2021 152
Tabel 3.118 Simulasi Output menurut Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah) 153
Tabel 3.119 Simulasi Kompensasi Tenaga Kerja menurut Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah) 154
Tabel 3.120 Simulasi Kompensasi Total Nilai Tambah Bruto (NTB) menurut Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah) 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia	37
Gambar 3.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, 2017 - 2022	38
Gambar 3.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara, 2018 - 2021	43
Gambar 3.4	Proyeksi IPG	46
Gambar 3.5	Proyeksi Indeks Williamson	52
Gambar 3.6	Perkembangan Maturitas SPIP 2018-2022	61
Gambar 3.7	Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka	69
Gambar 3.8	Indeks Kualitas Air	71
Gambar 3.9	Indeks Kualitas Udara	73
Gambar 3.10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021	86
Gambar 3.11	Skor Dimensi Toleransi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, 2019, dan 2021	87
Gambar 3.12	Skor Dimensi Kesetaraan Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018, 2019, dan 2021	88
Gambar 3.13	Skor Dimensi Kerjasama Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018, 2019, dan 2021	89
Gambar 3.14	Cakupan Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	91
Gambar 3.15	Rasio Elektrifikasi	92
Gambar 3.16	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021	98
Gambar 3.17	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional, 2016-2021 (%)	114
Gambar 3.18	Struktur APBD Kaltara dan Struktur Pendapatan Asli Daerah, 2021	143

Gambar 3.19 Struktur Dana Perimbangan Kaltara, 2021 143
Gambar 3.20 Simulasi Sebelum dan Sesudah Tambahan (Shock) APBD Terhadap Output, NTB, Pendapatan, Tenaga Kerja, dan Impor Tahun 2021 156

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Dalam pelaksanaannya, harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, selaras, serasi, dan seimbang agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah sesuai dengan sasaran, prioritas, dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

Dalam kajian regional, konsep pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah perlu memperhatikan aspek karakteristik lokal (*local specific*) wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut dan harus tetap mengacu pada kondisi wilayah itu sendiri (inward looking). Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut (Daryanto, 2004).

Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi wilayah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (penurunan tingkat kemiskinan), yaitu menciptakan kesempatan kerja (*full employment*) atau setidak-tidaknya tingkat pengangguran yang rendah dan adanya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sehingga diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup atau peningkatan pendapatan (Ferguson dalam Tarigan, 2005).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk menunjukan apakah sasaran, Program, kegiatan dan sub kegiatan berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan berjalan efektif, efisien dan ekonomis serta optimal, maka perlu ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra yang telah di tetapkan.

Demikian halnya secara empiris, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 10 tujuan penting sebagai penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yaitu:

(1) Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan; (2) Mewujudkan pembangunan KIPI; (3) Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jamiman perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasidisetiap kabupaten/kota; (4) Meningkatkan terwujudnya konektivtas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.; (5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota; (6) Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota; (7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan; (8) Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal; (9) Mewujudkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku umkm di setiap kabupaten/kota.; dan (10) Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan rt, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehataan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kewilayahan yang lebih diarahkan pada penggunaan ruang (pola tata ruang) di Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penataan ruang wilayah di provinsi ini adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi, dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat menuju Kalimantan Utara yang maju dan mandiri.

Namun, yang menjadi pertanyaan apakah benar bahwa sektor-sektor berbasis sumber daya alam seperti: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan tersebut muncul karena pada dasarnya sektor unggulan merupakan motor penggerak pengembangan dan pembangunan wilayah.

Dalam melakukan identifikasi sektor unggulan, sektor-sektor ekonomi perlu dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan multisektoral. Menurut

Tarigan (2005), pembangunan daerah/wilayah dengan pendekatan multisektoral berciri seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya, setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut.

Analisis sektor dalam perekonomian bukan berarti satu sektor dengan sektor yang lain terpisah total dalam analisisnya karena setiap sektor perekonomian pada dasarnya saling memengaruhi dan ketergantungan satu dengan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan atau kelemahan di wilayahnya menjadi sangat penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Pengembangan sektor perekonomian memiliki relevansi yang kuat dengan pengembangan wilayah. Oleh sebab itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat dilakukan dengan pengembangan sektor perekonomian yang menjadi unggulan berdasarkan kekhasan atau karakteristik suatu wilayah dan keterkaitannya, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mencapai hal itu, maka perlu diidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara dan pengembangan sektor-sektor tersebut di masing-masing kabupaten/kota dengan melihat basis dan kekhasan yang dimiliki kabupaten/kota tersebut secara komprehensif melalui pendekatan multisektoral.

Identifikasi dan Analisis Faktor Pengungkit Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mengindentifikasi dan menganalisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mengungkit capaian visi dan misi daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, Hingga sampai kepada Kebutuhan anggarannya agar tercapai fungsi efektif, efisien, dan ekonomis.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Pemahaman pemerintah daerah yang tepat, akurat, lengkap, dan komprehensif mengenai potensi yang dimiliki daerahnya, akan dapat mempermudah mereka dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang tepat yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Sejak awal berdirinya hingga saat ini, struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Utara (berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto/PDRB atas dasar harga berlaku) masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cukup fluktuatif, bersaing dengan kontribusi sektor lain, seperti sektor pertanian, konstruksi industri pengolahan, dan sektor perdagangan.

Kontribusi sektor terhadap penciptaan PDRB belum cukup untuk menggambarkan perekonomian wilayah secara keseluruhan karena hanya melihat pada efek langsung saja, padahal dampak pembangunan suatu sektor ekonomi tidak dapat dilihat sebatas pada kemampuannya menciptakan PDRB semata. Namun yang lebih penting lagi, bagaimana sektor tersebut mampu menggerakkan seluruh roda perekonomian wilayah dengan mengkaji keterkaitan serta efek sebar yang dapat diberikan oleh suatu sektor ekonomi yang selama ini seringkali terjadi kesalahan penempatan anggaran pembangunan dengan potensi sektor yang ada (Daryanto dan Hafizrianda, 2010).

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara telah menghasilkan kemajuan yang cukup berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini. Namun, masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan seperti: tingginya angka kemiskinan, lambannya pertumbuhan ekonomi, tingginya ketimpangan pendapatan penduduk, belum optimalnya pengelolaan potensi setiap sektor, dan tingginya kesenjangan antar daerah.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu analisis mengenai pengembangan sektor-sektor perekonomian dengan melihat peranan masing-masing sektor secara mendetail sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam tahapan pembangunan berikutnya. Melalui analisis ini, perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan multisektoral melalui analisis Input-Output untuk mengkaji keterkaitan dan peranan setiap sektor dalam perekonomian sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pembangunan ekonominya sehingga permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dapat diatasi.

Upaya selanjutnya ialah dengan mengidentifikasi sektor-sektor unggulan provinsi yang menjadi sektor basis di setiap kabupaten/kota, sehingga nantinya dalam penyusunan kebijakan sektoral lebih signifikan dengan kondisi, potensi, dan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Informasi Identifikasi indikator Tujuan dan sasaran RPJMD yang bersumber dari Tabel Input-Output;
2. Analisis Faktor Pengungkit Indikator Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026;
3. Estimasi Indikator tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini mulai dari identifikasi dan Analisis Faktor Pengungkit Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

1.5. Hasil/Keluaran

Keluaran dari kegiatan adalah Dokumen Identifikasi dan Analisis Faktor Pengungkit Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

BAB 2
KONSEP-DEFINISI-LANDASAN TEORI

BAB 2
KONSEP - DEFINISI - LANDASAN TEORI

2.1. Teori Tabel Input Output

Periode Cakupan

Tabel Input Output untuk 34 provinsi mencakup kegiatan produksi dan transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang dilakukan selama satu tahun dari Januari hingga Desember (kalender tahun). Pada prakteknya, Tabel Input Output telah disusun pada tahun yang berbeda-beda untuk masing-msing provinsi tergantung keperluan. Namun, pada tahun 2016 dilakukan penyusunan Tabel Input Output serentak untuk 34 provinsi di Indonesia. Tahun 2016 dipilih karena pada tahun tersebut diadakan Sensus Ekonomi 2016, yang merupakan data dasar yang penting dalam implementasi penyusunan tabel input output 34 provinsi.

Cakupan Geografis

Dalam hal persepsi ruang lingkup geografis saat menyusun Tabel Input Output, terdapat konsep domestik dan konsep nasional. Secara sederhana, konsep domestik adalah konsep di mana ruang lingkup mencakup kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam wilayah negara tertentu. Sebagai contoh, kegiatan perusahaan asing yang dilakukan di wilayah Indonesia adalah tercakup sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di wilayah asing tersebut tidak tercakup. Aktivitas yang dilakukan oleh misi diplomatik Indonesia adalah termasuk sedangkan kegiatan oleh angkatan bersenjata asing dan diplomat pemerintah asing yang tinggal di Indonesia adalah tidak termasuk .

Selanjutnya, konsep nasional adalah konsep yang berfokus pada penduduk di suatu negara. Penduduk mengacu pada seorang individu yang telah tinggal di negara yang berlaku untuk jangka waktu yang lama, dan siapa yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi dengan cakupan yang substansial. Misalnya, orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, orang asing yang telah tinggal untuk jangka waktu yang lama di Indonesia, dan perusahaan atau organisasi Indonesia, atau perusahaan asing atau organisasi yang melakukan kegiatan di Indonesia adalah termasuk sebagai penduduk, serta warga negara Indonesia yang hanya tinggal di

luar negeri dalam waktu singkat. Di sisi lain, orang asing yang tinggal di Indonesia tujuan belajar di luar negeri dan perawatan medis tidak termasuk sebagai penduduk.

Konsep domestik telah digunakan untuk Tabel Input Output untuk Indonesia, dan kegiatan produksi dan transaksi yang terjadi di Indonesia. Khusus untuk Konsumsi pengeluaran rumah tangga, konsep nasionalnya diwakili oleh konsumsi di luar negeri oleh penduduk rumah tangga dicatat sebagai Impor, sementara konsumsi di Indonesia oleh bukan penduduk rumah tangga dicatat sebagai Ekspor. Berdasarkan hal ini dimungkinkan untuk mengkonversi konsumsi pengeluaran rumah tangga dengan konsep domestik.

Waktu Pencatatan

Accrual basis dan *Cash basis*

Pada prinsipnya, kegiatan dan transaksi produksi adalah dicatat secara akrual di Tabel Input Output, artinya mereka dicatat pada saat transaksi terjadi. Dengan cash basis, di sisi lain, kegiatan produksi dan transaksi dicatat pada saat mendapat penghasilan dan pembayaran untuk kegiatan produksi benar-benar dilakukan. Kesetaraan dua aspek dalam Tabel Input Output tidak dapat diperoleh dalam cash basis (total masing-masing dari lapangan usaha nilai tambah bruto dan komponen permintaan akhir kurang impor tidak sesuai) karena jeda waktu dalam aliran akrual dan distribusi pendapatan dari kegiatan produksi. Namun demikian kesetaraan dua aspek dalam Tabel Input Output dapat diperoleh dengan mencacat secara akrual.

Penanganan Tabel Input Output untuk Indonesia

Untuk menjaga kesetaraan dua aspek, accrual basis telah digunakan sejak masa lalu. Poin khusus dalam waktu pencatatan adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan produksi dan transaksi barang
   Kegiatan produksi untuk barang dicatat pada saat mereka diproduksi, sementara untuk jasa dicatat pada saat jasa dilakukan pada tahun itu.
2. Transaksi untuk produk setengah jadi
   Transaksi untuk produk antara dicatat sebagai nilai transaksi antara pada waktu produk antara sebenarnya dikonsumsi di setiap kolom industri selama setahun.
3. Output ke komponen permintaan akhir
   Dalam output ke komponen permintaan akhir, pengeluaran konsumsi, termasuk pengeluaran konsumsi rumah tangga di luar, pengeluaran konsumsi pribadi, dan pengeluaran konsumsi pemerintah umum, dicatat pada saat

tawar-menawar disimpulkan, bahkan dalam hal keterlambatan pengiriman barang yang dapat dipakai.

4. Pembentukan modal tetap domestik bruto dicatat pada saat pengiriman, sementara berbagai jenis dalam peningkatan stok dicatat pada saat itu merupakan hak milik yang sah hak atas produk dialihkan ke produsen atau distributor.
5. Output untuk Perubahan Inventori dicatat di titik waktu ketika produsen atau distributor memiliki kepemilikan suatu produk yang dapat ditransaksikan.
6. Ekspor dan impor dicatat pada saat bea cukai.
   Barang dengan masa produksi satu tahun atau lebih (produk jangka panjang) dicatat sebagai persediaan dalam produksi dalam negeri sampai kepemilikan dialihkan kepada pengguna akhir. Nilai produksi barang jadi dari produk jangka panjang tersebut dicatat sebagai nilai barang jadi dikurangi nilai barang setengah jadi dan barang dalam proses.
7. Untuk produksi modal untuk akun sendiri (produksi barang untuk konsumsi pribadi), bahkan dalam kasus barang dalam proses, tingkat kemajuan (progress) untuk periode satu tahun dicatat sebagai pembentukan modal tetap domestik bruto, sebagai pengguna akhir mempertahankan kepemilikan. Namun, dalam hal bangunan, tingkat kemajuan (progress) dalam konstruksi harus dicatat sebagai produksi dalam negeri di pembentukan modal tetap domestik bruto bahkan jika kepemilikan belum ditransfer.
8. Prinsip ini diterapkan untuk pertumbuhan hewan: menyediakan hewan jasa (hewan untuk konsep, pembiakan atau ras, wol, pohon buah-buahan, mulberry, daun teh, dll.) tercatat dalam pembentukan modal tetap domestik bruto dan pertumbuhan yang diberikan oleh produsen spesialis lainnya dicatat dalam peningkatan stok barang setengah jadi dan barang dalam proses.
9. Jasa dengan masa produksi satu tahun atau lebih
   Jasa dengan masa produksi satu tahun atau lebih dicatat sebagai yang diproduksi ketika jasa ditawarkan (penyelesaian produksi), oleh karena itu tidak ada stok yang tercatat.

Unit Penilaian

Tabel Input Output adalah catatan keadaan aktual dari kegiatan produksi dan transaksi yang dilakukan dalam setahun. Dalam menilai besarnya kegiatan dan transaksi tersebut, ada dua metode penilaian. Pertama yang didasarkan pada jumlah numerik dan yang lainnya berdasarkan jumlah uang. Barang memiliki unit kuantitas tertentu. Penilaian setiap transaksi berdasarkan pada unit dari kuantitas akan memungkinkan kita untuk melakukan analisis input-output

kuantitatif berdasarkan teknologi produksi, bebas dari fluktuasi musiman di perbedaan harga dan regional.

Namun, kategori jasa tidak memiliki unit khusus dari kuantitas. Hal yang sama berlaku untuk barang di sektor yang terdiri dari item terperinci, karena tidak semua item dalam satu komoditas memiliki sebuah unit seragam dari kuantitas. Selain hal di atas, perhitungan berdasarkan unit kuantitas yang seragam adalah tidak mungkin dalam industri, di mana berbagai macam bahan baku dimasukkan sebagai input. Oleh karena itu, istilah moneter adalah sebuah kriteria umum untuk penilaian skala masing-masing aktivitas transaksi dalam penyusunan Tabel Input Output.

Klasifikasi

Supply dan Use Table (SUT) dan Tabel Input Output adalah suatu sistem yang memberikan gambaran perekonomian secara menyeluruh. Oleh karena itu sistem tersebut dituntut untuk mampu mencakup seluruh komoditi dan kegiatan perekonomian, baik komoditi yang dihasilkan oleh aktivitas produksi dalam negeri (domestik) maupun komoditi yang berasal dari produksi luar negeri (impor). Pada praktiknya, barang dan jasa atau komoditi yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk fisik yang beragam. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan SUT dan Tabel Input Output proses mengelompokkan barang dan jasa maupun aktivitas produksi ke dalam kelompok-kelompok tertentu dilakukan di tahap awal. Proses pengelompokkan barang dan jasa inilah yang dikenal sebagai tahap penyusunan klasifikasi.

Pada saat menyusun klasifikasi selain mencakup seluruh komoditi dan aktivitas dalam perekonomian juga harus mempertimbangkan ketersediaan data dan kerangka analisis yang akan dicapai. Hal tersebut dilakukan agar data yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhannya. Proses penyusunan klasifikasi juga harus mencakup konkordansi dari suatu sistem klasifikasi ke lainnya.

Dalam penyusunan SUT, Klasifikasi industri yang digunakan berkorespondensi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 yang berkorespondensi dengan International *Standard Industrial Classification* (ISIC) rev.5. Sedangkan, klasifikasi komoditi yang digunakan berdasarkan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 yang berkorespondensi dengan *Central Product Classification* (CPC) rev.2. Dimensi SUT 2016 berbentuk *rectanguler* (tidak simetris) artinya jumlah kolom dan baris pada SUT tidak sama. Disisi kolom menggambarkan klasifikasi industri (lapangan usaha) yang terdiri dari 52 lapangan usaha yang mencakup 31 barang dan 21 jasa. Sedangkan, menurut baris menggambarkan rincian klasifikasi komoditi sebanyak

65 (44 barang dan 21 jasa). Sedangkan klasifikasi Tabel Input Output Indonesia dimensinya simetris menurut industri-x-industri sebanyak 52 rincian.

Selanjutnya dari sisi penggunaan, klasifikasi konsumsi rumahtangga berdasarkan *Classification of Individual Consumption according to Purpose (COICOP)*, Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumahtangga (LNPRT) berdasarkan *Classification of the purposes of non-profit institutions* (COPNI), Konsumsi pemerintah berdasarkan rincian individu dan kolektif seperti dalam *Classification for Function of Goverment* (COFOG). Sedangkan klasifikasi Ekspor dan Impor berkorespondensi dengan kode *Harmonized System* (HS).

Kerangka Kerja

Supply and Use Table (SUT)

Gambaran umum tentang dua kerangka utama SUT terdiri dari tabel supply dan tabel use. Tabel supply memberikan gambaran tentang penyediaan barang dan jasa menurut komoditi (baris) yang dihasilkan berdasarkan lapangan usaha yang menghasilkan (kolom). Penyediaan barang dan jasa dibedakan antara komoditi yang dihasilkan di dalam wilayah itu sendiri (output domestik) dan dari luar negeri (impor). Dalam tabel supply penilaian output dinilai berdasarkan harga produsen dan pada tabel supply juga terdapat tabel valuasi *(valuation table*) yang terdiri dari kolom margin transportasi dan perdagangan. Tabel penilaian tersebut diestimasi untuk mendapatkan penilaian total penyediaan atas harga pembeli *(purchasers' price)*.

Tabel penggunaan terdiri dari 3 (tiga) komponen matriks yaitu konsumsi antara, konsumsi akhir, dan komponen nilai tambah. Tabel penggunaan dinilai atas dasar harga pembeli. Matriks konsumsi antara dirinci menurut produk (baris) dan lapangan usaha yang menghasilkan (kolom). Informasi didalamnya menunjukkan penggunaan produk menurut jenis unit yang memproduksinya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang menarik dari SUT. Konsumsi akhir terdiri dari komponen konsumsi rumahtangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor. Sedangkan informasi pada komponen nilai tambah yang terdiri dari kompensasi tenaga kerja, surplus usaha bruto serta pajak lainnya dikurang subsidi lainnya atas produksi.

Dari tabel SUT dapat diperoleh indikator makro PDB menurut 3 (tiga) pendekatan yang konsisten yaitu PDB Produksi=PDB Pengeluaran=PDB Pendapatan.

Tabel Input Output

Dimensi Tabel Input Output 2016 diklasifikasikan berdasarkan 52 industri. Dalam penyusunannya diintegrasikan dengan penyusunan klasifikasi SUT sehingga dapat ditelusuri kesesuaian klasifikasi Tabel Input Output dengan sistem klasifikasi standar. Tabel Input Output industri-x-industri mendeskripsikan hubungan teknologi antara industri dan unit industri yang homogen. Bagian *intermediate* mendeskripsikan untuk setiap Industri, jumlah hasil industri yang digunakan untuk memproduksi suatu hasil industri, terlepas dari industri yang memproduksi. Secara umum, matriks dalam Tabel Input Output dapat dikelompokkan menjadi tiga kuadran (sub matriks), yaitu kuadran I, II dan III.

Kuadran I

Setiap sel pada kuadran I merupakan transaksi antara, yaitu transaksi barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Isian sepanjang baris pada kuadran ini memperlihatkan alokasi output suatu industri ekonomi yang digunakan sebagai input oleh industri lainnya dan disebut sebagai permintaan antara. Sedangkan isian sepanjang kolomnya memperlihatkan penggunaan input oleh suatu industri yang berasal dari industri lainnya dan disebut sebagai input antara. Dalam analisis menggunakan model Input Output, kuadran I memiliki peranan penting karena kuadran inilah yang menunjukkan keterkaitan antar industri ekonomi dalam melakukan proses produksinya.

Kuadran II

Isian sel-sel pada kuadran II ada dua jenis, yaitu (a) transaksi permintaan akhir dan (b) komponen penyediaan pada masing-masing sektor produksi. Permintaan akhir terdiri dari enam komponen, yaitu pengeluaran total konsumsi rumah tangga (3011), konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumahtangga (LNPRT) (3012), pengeluaran konsumsi pemerintah (3020), pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (3030), perubahan inventori (3041), total ekspor barang dan jasa (3080) terdiri dari ekspor luar negeri (3071) dan ekspor antar provinsi (3072). Jumlah permintaan (3100) merupakan jumlah permintaan antara (1800) ditambah dengan jumlah permintaan akhir (3090). Sedangkan jumlah penyediaan (7000) terdiri dari produksi dalam negeri atau output domestik (6001), barang dan jasa yang berasal dari impor (4090) dan margin perdagangan dan biaya pengangkutan (5090). Barang dan jasa impor (4090) dirinci atas impor luar negeri (4019), impor antar provinsi (4029). Margin perdagangan dan biaya pengangkutan atau Trade and Transport Margin (TTM) terdiri dari margin perdagangan besar (5010), dan biaya pengangkutan (5030). Dengan

demikian isian sepanjang baris pada kuadran II memperlihatkan komposisi permintaan akhir terhadap suatu sektor produksi dan bagaimana komposisi penyediaannya. Sedangkan isian sepanjang kolom menunjukkan distribusi masing-masing komponen permintaan akhir dan penyediaan.

Kuadaran III

Isian kuadran III terdiri dari sel-sel nilai tambah bruto atau input primer. Nilai tambah bruto (2090) terdiri dari kompensasi tenaga kerja (2010), surplus usaha bruto (2020), pajak lainnya atas produksi (2040) dan subsidi lainnya atas produksi (2050). Isian sepanjang baris pada kuadran III menunjukkan distribusi penciptaan masing-masing komponen nilai tambah bruto menurut industri yang menghasilkan. Sedangkan isian sepanjang kolom menunjukkan komposisi penciptaan nilai tambah bruto oleh masing-masing kelompok industri menurut komponennya. Dalam banyak analisis, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh masing-masing industri pada umumnya dikonversikan ke Produk Domestik Regional Bruto. Di samping melalui nilai tambah bruto, produk domestik regional bruto dapat juga diturunkan dari permintaan akhir, yaitu jumlah seluruh permintaan akhir (3090) dikurangi dengan total impor barang jasa (4090).

Struktur Dasar dari Tabel Transaksi Dasar

Transaksi yang digunakan dalam Tabel Input Output 2016 ada dua jenis, yaitu transaksi total dan transaksi domestik. Transaksi total mencakup semua transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri (output domestik) maupun yang berasal dari impor. Sedangkan yang dicakup pada transaksi domestik hanya transaksi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor produksi di dalam negeri saja. Di samping itu pada Tabel Input Ooutput 2016 juga menggunakan dua jenis harga untuk penilaian setiap transaksi yang digunakan, yaitu harga pembeli dan harga produsen. Pada transaksi atas dasar harga pembeli, semua transaksi dinilai atas dasar harga yang dibayar oleh pembeli yang mencakup juga margin perdagangan dan biaya pengangkutan. Sedangkan pada transaksi atas dasar harga produsen yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah harga dari produsen barang dan jasa yang bersangkutan tanpa margin perdagangan dan biaya pengangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tabel Input Output Indonesia 2016 yang disusun terdiri atas tiga penilaian transaksi, yaitu:

- Transaksi total atas dasar harga pembeli
- Transaksi total atas dasar harga produsen
- Transaksi domestik atas dasar harga produsen

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pada transaksi domestik atas dasar harga produsen transaksinya tidak lagi mencakup barang dan jasa impor. Untuk menjaga agar tetap seimbang (balance), maka barang dan jasa yang diperoleh dari impor luar negeri dan antar provinsi pada tabel transaksi domestik dikumpulkan pada baris tersendiri dan diberi kode 2000 dan 2001. Hubungan antara transaksi atas dasar harga pembeli dan harga produsen dijelaskan pada formula di bawah ini:

Transaksi total atas dasar harga pembeli dikurang (-) margin perdagangan dan biaya pengangkutan

= Transaksi total atas dasar harga produsen dikurang (-) impor

= Transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Konsep dan Definisi dari tabel Transaksi Dasar

Output

Produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) menggunakan sumber daya (input) yang tersedia. Barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi digunakan untuk input pada proses produksi (konsumsi antara), konsumsi akhir, diekspor atau diakumulasi untuk pembentukan modal (investasi). Akumulasi pembentukan modal (investasi) aset produksi diperlukan untuk peningkatan kapasitas produksi agar permintaan akan barang dan jasa dapat dipenuhi. Nilai Produksi atau Output adalah nilai barang dan Jasa yang diproduksi pada suatu periode tertentu.

Cakupan output yang terdiri dari (a) produksi barang jadi yang diselesaikan pada suatu periode tertentu; (b) produksi barang setengah jadi pada akhir suatu periode waktu tertentu; (c) perubahan inventori. Output dikategorikan menjadi output pasar, output non pasar, dan output yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri. Output Pasar adalah nilai barang dan jasa yang dijual berdasarkan harga yang signifikan secara ekonomi, termasuk barter dan pembayaran lainnya yang menggunakan barang. Output yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiriadalah produk yang ditahan oleh produsen untuk digunakan sendiri sebagai pembentukan modal atau konsumsi akhir yang mencakup jasa persewaan rumah yang dihuni sendiri oleh pemiliknya dan Jasa domestik yang dibayar. Output Non Pasar mencakup barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah dan LNP yang disediakan dengan harga yang murah atau tidak signifikan secara ekonomi. Penilaian output non pasar umumnya berdasarkan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan

Transaksi Antara

Transaksi antara adalah transaksi yang terjadi antara industri yang berperan sebagai produsen dengan industri yang berperan sebagai konsumen. Industri yang berperan sebagai produsen merupakan industri pada masing-masing baris, sedangkan Industri sebagai konsumen ditunjukkan oleh industri pada masing-masing kolom. Transaksi yang dicakup dalam transaksi antara hanya transaksi barang dan jasa yang terjadi dalam hubungannya dengan proses produksi. Jadi, isian sepanjang baris pada transaksi antara memperlihatkan alokasi output suatu industri dalam memenuhi kebutuhan input industri-industri lain untuk keperluan produksi dan disebut sebagai permintaan antara. Sedangkan isian sepanjang kolomnya menunjukkan input barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi suatu industri dan disebut sebagai input antara.

Penilaian input antara pada umumnya menggunakan harga pembeli pada saat barang dan jasa tersebut digunakan dalam proses produksi. Pengertian dari input antara adalah input yang digunakan habis dalam proses produksi dan terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa, baik yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Barang tidak tahan lama adalah barang yang masa pemakaiannya kurang dari setahun atau barang yang habis dalam sekali pakai, seperti bahan baku, bahan penolong, jasa perbankan dan sebagainya. Dalam praktik seringkali sulit membedakan barang dan jasa yang termasuk dalam input antara, balas jasa pegawai, konsumsi rumahtangga atau pembentukan modal. Apalagi jika produsen memberikan hasil produksinya secara cuma-cuma atau harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada pegawainya. Dalam hal ini yang dijadikan pedoman adalah tujuan pemakaian barang dan jasa yang bersangkutan. Sepanjang pengeluaran atas barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan pegawai, maka pengeluarannya dikategorikan sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja. Sebaliknya jika pengeluaran pegawai untuk perjalanan, pengobatan, rekreasi dan sebagainya ternyata ditanggung oleh produsen, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari input antara.

Pengeluaran produsen untuk perbaikan ringan barang modal juga termasuk sebagai input antara. Akan tetapi perbaikan berat atau perubahan besar-besaran yang dapat memperpanjang umur pemakaian atau meningkatkan produktivitas barang modal dikategorikan sebagai pembentukan modal. Pengeluaran untuk pemeliharaan tanaman keras pada penanaman baru sampai saat tanaman tersebut dapat menghasilkan diperlakukan sebagai pembentukan modal. Sedangkan jika tanaman tersebut telah dapat berproduksi, maka pengeluarannya diperlakukan sebagai input antara.

Permintaan Akhir dan Impor

Permintaan akhir adalah permintaan atas barang dan jasa untuk keperluan konsumsi, bukan untuk proses produksi. Permintaan akhir terdiri dari pengeluaran konsumsi rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan ekspor. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir terdiri dari hasil produksi dalam negeri dan impor. Sesuai dengan pengertian ini, maka impor merupakan bagian dari penyediaan, bukan merupakan komponen permintaan akhir.

Pengeluaran komsumsi rumah tangga

Pengeluaran konsumsi rumahtangga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumahtangga untuk semua pembelian barang dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas. Barang dan jasa dalam hal ini mencakup barang tahan lama dan barang tidak tahan lama kecuali pembelian rumah tempat tinggal. Pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup konsumsi yang dilakukan di dalam dan di luar negeri. Untuk menjaga konsistensi data, maka konsumsi penduduk suatu negara yang dilakukan di luar negeri diperlakukan sebagai impor, sebaliknya konsumsi oleh penduduk asing di wilayah negara tersebut diperlakukan sebagai ekspor. Produk yang diproduksi tetapi tidak dijual ke industri mana pun atau tidak digunakan untuk konsumsi sendiri selama tahun yang dicakup dicatat dalam "peningkatan stok persediaan barang jadi produsen.

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

LNPRT merupakan entitas legal/sosial yang dibentuk oleh perorangan/ kelompok masyarakat dan tidak dikendalikan oleh pemerintah dalam rangka menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi kepada anggotanya/rumah tangga/ kelompok masyarakat.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup semua pengeluaran barang dan jasa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa pada individu atau masyarakat dalam bentuk produksi pasar maupun non pasar.

Pembentukan Modal Tetap

Pembentukan modal tetap meliputi pengadaan, pembuatan atau pembelian barang-barang modal baru baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk

barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicakup hanyalah yang dilakukan oleh industri-industri ekonomi di dalam negeri (domestik). Cakupan dari barang-barang modal tetap adalah sebagai berikut:

- Barang modal baru dalam bentuk konstruksi, mesin-mesin, alat angkutan dan perlengkapan, yang mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.
- Biaya untuk perubahan dan perbaikan berat barang-barang modal yang akan meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian.
- Pengeluaran untuk pengembangan dan pembukaan tanah, perluasan areal hutan dan daerah pertambangan serta penanaman dan peremajaan tanaman keras.
- Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan dan sebagainya, tidak termasuk ternak untuk dipotong.
- Margin perdagangan dan ongkos-ongkos lain yang berkenaan dengan transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak penguasaan hutan, hak paten, hak cipta dan barang-barang modal bekas.

Dalam Tabel Input Ooutput, isian pada kolom pembentukan modal tetap hanya menggambarkan komposisi barang-barang modal yang dihasilkan oleh industri-industri produksi dan tidak menunjukkan pembentukan modal yang dilakukan oleh industri-industri produksi.

Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan selisih antara nilai stok barang pada akhir tahun dengan nilai stok pada awal tahun. Perubahan inventori dapat digolongkan menjadi:

- Perubahan inventori barang jadi dan barang setengah jadi yang disimpan oleh produsen, termasuk perubahan jumlah ternak dan unggas dan barang-barang strategis yang merupakan cadangan nasional.
- Perubahan inventori bahan mentah dan bahan baku yang belum digunakan oleh produsen.
- Perubahan inventori di sektor perdagangan, yang terdiri dari barang-barang dagangan yang belum terjual.

Ekspor dan Impor

Ekspor-impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan ekonomi atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non-

residen. Transaksi ekspor barang dinyatakan dalam nilai *free on board* (f.o.b) yaitu suatu nilai yang mencakup juga semua biaya angkutan di negara pengekspor, bea ekspor dan biaya pemuatan barang sampai ke kapal yang akan mengangkutnya. Sedangkan transaksi impor dinyatakan atas dasar biaya pendaratan *(landed cost)* yang terdiri dari nilai cost, *insurance and freight* (c.i.f) ditambah dengan bea masuk dan pajak penjualan impor. Untuk menghindari penilaian ganda pada transaksi impor barang, maka nilai impor barang dikeluarkan biaya-biaya untuk transportasi dan asuransinya dan dicatat terpisah pada baris dan kolom penyesuaian c.i.f/fob.

Input Primer

Input primer adalah balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Input primer disebut juga nilai tambah bruto dan merupakan selisih antara output dengan input antara. Input primer terdiri dari: (a) kompensasi tenaga kerja, (b) surplus usaha bruto, (c) pajak lainnya atas produksi, dan (d) subsidi lainnya atas produksi.

- Kompensasi tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah remunerasi, dalam bentuk tunai atau barang, yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai selama periode akuntansi. Kompensasi tenaga kerja dicatat atas dasar akrual. Ini terdiri dari upah dan gaji yang dibayar dengan uang tunai atau barang, dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibayar oleh pengusaha.
- Surplus usaha adalah balas jasa atas kewiraswastaan dan pendapatan atas pemilikan modal. Surplus usaha antara lain terdiri dari keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan, bunga atas modal, sewa tanah dan pendapatan atas hak kepemilikan lainnya. Besarnya nilai surplus usaha adalah sama dengan nilai tambah bruto dikurangi dengan kompensasi tenaga kerja, pajak dikurang subsidi lainnya atas produksi.
- Pajak lainnya atas produksi mencakup pajak yang dikenakan dalam rangka proses produksi. Pajak lainnya atas produksi yaitu pajak yang dibayar atas lahan, aset, tenaga kerja, dan lainnya dalam aktivitas produksi, bukan merupakan pajak yang dibayar per unit output dan tak-dapat dikurangkan dari harga produsen. Pajak ini dicatat sebagai pajak yang dikeluarkan dari nilai tambah produsen atau industri bersangkutan secara individu.
- Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Subsidi pada dasarnya merupakan tambahan pendapatan bagi produsen. Oleh karena itu subsidi disebut juga sebagai pajak lainnya atas produksi negatif. Subsidi pada umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan harga pada tingkat tertentu

Margin Perdagangan dan Pengangkutan

Pada tabel transaksi atas dasar harga pembeli, semua transaksi barang dan jasa dinilai berdasarkan harga yang dibayar oleh pembeli. Dalam harga pembeli dicakup juga margin perdagangan dan biaya pengangkutan. Oleh karena itu struktur input antara masing-masing industri dan struktur permintaan akhir pada transaksi atas dasar harga pembeli tidak mencakup input yang berasal dari industri perdagangan. Di samping itu input dari industri pengangkutan hanya terdiri dari angkutan penumpang dan barang-barang selain barang dagangan. Karena nilai transaksi mencakup margin, maka total margin harus diletakkan di kolom margin perdagangan dan biaya pengangkutan (5090) dan diperlakukan sebagai bagian dari penyediaan bersama-sama dengan output dan impor agar tetap terjadi keseimbangan pada masing-masing baris.

Isian sel kolom 5090 yang berpotongan dengan baris industri perdagangan dan pengangkutan bertanda negatif, sedangkan perpotongan dengan baris industri-industri lainnya bertanda positif. Jumlah nilai dari sel-sel yang bertanda positif harus sama dengan jumlah nilai sel-sel yang bertanda negatif, sehingga jumlah dari seluruh sel pada kolom 5090 akan sama dengan nol. Untuk tabel transaksi atas dasar harga produsen, semua transaksi barang dan jasa dinilai atas dasar harga produsen, yaitu harga yang diterima produsen tanpa menambahkan margin perdagangan dan biaya pengangkutan. Akan tetapi karena total input antara dan permintaan akhir masing-masing kolom pada tabel transaksi atas dasar harga pembeli dan tabel transaksi atas dasar harga produsen harus tetap sama, maka nilai margin ini diperlakukan sebagai bagian input yang berasal dari industri perdagangan dan industri pengangkutan. Karena semua transaksi pada tabel transaksi atas dasar harga produsen tidak mengandung margin, maka total margin di sepanjang kolom 5090 sama dengan nol.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pembangunan dalam perspektif luas dapat dipandang sebagai suatu proses multi-dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000). Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Kuznets dalam Priyarsono, dkk (2007), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan jenis barang dan jasa kepada penduduknya, kemampuan tersebut tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi, salah satunya yakni Aliran Klasik yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Beberapa tokoh atau pengikut aliran Klasik, yaitu: Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, dan J.B. Say.

2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

Munculnya perencanaan pembangunan daerah, sebenarnya merupakan jawaban terhadap peningkatan kesenjangan pembangunan yang terjadi antar daerah. Kesenjangan ini dapat terjadi karena adanya perpindahan modal yang cenderung menambah ketidakmerataan. Di daerah yang sedang berkembang, permintaan terhadap barang dan jasa akan mendorong naiknya investasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, di daerah yang kurang berkembang, permintaan akan investasi rendah karena pendapatan masyarakat yang rendah. Myrdall (1957) dalam Daryanto dan Hafizrianda (2010) menyatakan bahwa perkembangan yang tidak merata ini pada akhirnya akan menimbulkan backwash effect, yaitu kerugian yang diderita oleh daerah-daerah yang kurang berkembang sebagai akibat adanya ekspansi ekonomi dari daerah-daerah yang maju. Seharusnya tindakan pembangunan dari suatu daerah berkembang dapat memberikan keuntungan bagi daerah-daerah di sekitarnya atau dengan kata lain ekspansi pembangunan ekonomi daerah tersebut dapat memberikan spread effects bagi daerah-daerah lain.

Arsyad (1999) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan daerah, yaitu: menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Lapangan kerja diperlukan agar penduduk memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Perlu beberapa persyaratan agar lapangan kerja tercipta, diantaranya tersedianya lahan, modal, dan prasarana. Stabilitas ekonomi daerah perlu dipertahankan agar pelaku usaha dan masyarakat dapat melakukan berbagai upaya secara terencana. Stabilitas ekonomi daerah mencakup: inflasi yang rendah, adanya peraturan usaha yang jelas disertai penegakan hukum yang konsisten, dan tidak adanya gangguan keamanan. Basis ekonomi yang beragam diperlukan agar perkembangan yang terjadi di suatu sektor tidak memengaruhi sektor-sektor lain.

2.4 Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan

kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Aktor (pelaku) pencipta kegiatan wilayah adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan pihak luar yang ingin melakukan kegiatan di wilayah itu.

Dalam perencanaan pembangunan wilayah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral berfokus pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam yang lazim dipakai dalam literatur atau pengelompokkan berdasarkan administrasi pemerintahan yang menangani sektor tersebut.

Seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dalam pendekatan sektoral dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan di mana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Caranya adalah masing-masing sektor dipisahkan *(break-down)* sehingga terdapat kelompok-kelompok yang bersifat homogen. Pada kelompok yang homogen ini dapat digunakan peralatan analisis yang biasa digunakan untuk kelompok tersebut.

Analisis sektoral tidaklah berarti satu sektor dengan sektor yang lain terpisah total dalam analisis. Salah satu pendekatan sektoral yang sekaligus dapat melihat keterkaitan pertumbuhan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan sebaliknya, dikenal dengan nama analisis Input-Output. Perubahan pada satu sektor dalam perekonomian secara otomatis akan mendorong perubahan pada sektor lainnya.

2.5 Sektor Unggulan dalam Perekonomian Daerah

Indikator keberhasilan pembangunan wilayah diantaranya adalah terjadinya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kebijakan perekonomian, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sektor mana yang harus dikembangkan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengembangan sektor yang dimaksud. Kriteria tersebut diantaranya adalah sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang, nilai tambah per tenaga kerja tinggi, dan memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja.

Instrumen kebijakan yang dapat mengakomodir hal tersebut adalah melalui pengembangan sektor unggulan. Pengembangan sektor-sektor perekonomian

provinsi dengan memprioritaskan sektor unggulan, harus sesuai dengan karakteristik wilayah yang terdapat pada provinsi dalam hal ini yaitu kabupaten/kota. Untuk mengidentifikasi sektor unggulan provinsi pada tiap kabupaten/kota, dipergunakan analisis daya penyebaran dan derajat kepekaan semua sektor.

Tumenggung (1996) dalam Samiun (2008) memberi batasan bahwa sektor unggulan atau basis adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantages) dan keunggulan kompetitif *(competitive advantages)* dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang besar.

BAB 3
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS FAKTOR PENGUNGKIT RPJMD PROVINSI

BAB 3
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS FAKTOR PENGUNGKIT RPJMD PROVINSI

Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi dan kekayaan sumber daya alam, wilayah daratan yang luas, dan wilayah laut yang menyimpan ragam kekayaan; serta keanekaragaman penduduk dengan kekayaan budaya yang unik dan menarik. Saat ini Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga dikenal dengan sebutan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Namun dari aspek geostrategis, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai prospek masa depan yang sangat menjanjikan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, dan dekat dengan lokasi calon Ibu Kota Negara; serta posisi strategis sebagai kawasan lintasan perdagangan dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Satu dasa warsa sejak terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan secara bertahap telah diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja daerah. Berbagai kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus diatasi secara bersungguh-sungguh dan tuntas.

Kalimatan Utara sebagai provinsi terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga akan menghadapi tantangan pembangunan antara lain masih terbatasnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih, sanitasi dan listrik; lemahnya konektivitas transportasi; terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi; masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; belum berkembangnya rantai nilai produksi, pengolahan dan perdagangan komoditas unggulan daerah; belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang bermutu dan merata; serta belum meratanya pembangunan desa, kecamatan dan kabupaten/kota.

Sejalan dengan visi Kaltara Berubah, Maju dan Sejahtera, dan sesuai semangat, tekad, dan paradigma pembangunan Gerakan Kaltara Rumah Kita, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyiapkan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan

kemajuan Kalimantan Utara. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Utara 2005-2025.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 juga dilakukan dengan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan perencanaan pembangunan desa. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta berbagai kebijakan nasional lainnya.

Penetapan indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam perwujudan visi dan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip “SMART”, yaitu (1) khusus (*specific*) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu; (2) dapat diukur (*measurable*) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori ; (3) dapat dicapai (*achievable*) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi; (4) relevan (*relevant*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi: (5) masa waktu (*time-bound*) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (outcome) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (*output*) untuk mengukur

keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penetapan indikator kinerja daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten/Kota; serta sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah.

3.1. Identifikasi dan Analisis Faktor Pengungkit RPJMD Provinsi

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan sebagai berikut :

(1) Indikator Kinerja Utama

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) terdapat 17 Indikator Tujuan dan 43 Indikator Sasaran, sbb :

Indikator Tujuan
1. Indeks Ketahanan Nasional
2. Indeks Reformasi Birokrasi
3. Indeks Pembangunan Manusia
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Indeks Layanan Infrastruktur
6. Pertumbuhan Ekonomi
7. Nilai PDRB (ADHK)
8. Nilai PDRB (ADHB)
9. Indeks Kerukunan Umat Beragama
10. Nilai intensitas energi
11. Indeks Pembangunan Gender
12. Indeks Pemberdayaan Gender
13. Laju pertumbuhan koperasi dan UMKM
14. Rata-rata Pertumbuhan realisasi investasi
15. Indeks Williamson
16. Proporsi desa tertinggal dan sangat tertinggal
17. Tahapan Pembentukan DOB yang Dipenuhi

Indikator Sasaran
1. Angka kriminalitas tertangani
2. Indeks Demokrasi Indonesia
3. Indeks Risiko Bencana
4. Predikat SAKIP
5. Maturitas SPIP
6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Indeks Maturitas SPBE
8. Angka Harapan Hidup
9. Angka Harapan Lama Sekolah
10. Angka Rata-rata Lama Sekolah
11. Angka Kemiskinan
12. Tingkat Pengangguran Terbuka
13. Tingkat penurunan emisi GRK
14. Indeks Kualitas Air
15. Indeks Kualitas Udara
16. Indeks Tutupan Lahan
17. Indeks kualitas air laut
18. Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan
19. Cakupan layanan air bersih
20. Cakupan akses dan layanan telekomunikasi
21. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian
22. Indeks Ketahanan Pangan
23. Nilai Tukar Petani
24. Nilai Tukar Nelayan
25. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri
26. Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
27. Pengeluaran per kapita
28. Jumlah kunjungan wisatawan
29. Skor Dimensi Toleransi
30. Skor Dimensi Kesetaraan
31. Skor Dimensi Kerjasama
32. Cakupan rumah tangga teraliri listrik
33. Rasio elektrifikasi
34. Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi
35. Indeks Pemberdayaan Gender
36. Indeks Pembangunan Pemuda
37. Pertumbuhan koperasi sehat
38. Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM
39. Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi
40. Indeks Gini
41. Jumlah desa mandiri
42. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal
43. Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan

Identifikasi dan analisis indikator-indikator RPJMD dilakukan dengan mengevaluasi realisasi capaian indikator kondisi terkini sesuai klasifikasi berikut:

- Untuk kategori dengan target yang semakin meningkat tiap tahun:

Kondisi	Klasifikasi
$Realisasi_n < Target_n$	*Weak Performance*
$Target_n \leq Realisasi_n \leq Target_{n+1}$	*Good Performance*
$Target_{n+1} < Realisasi_n < Target_{2026}$	*Weak Indicator Target*
$Realisasi_n \geq Target_{2026}$	*Not An Issue*

- Untuk kategori dengan target yang semakin menurun tiap tahun:

Kondisi	Klasifikasi
$Realisasi_n > Target_n$	*Weak Performance*
$Target_n \geq Realisasi_n \geq Target_{n+1}$	*Good Performance*
$Target_{n+1} > Realisasi_n > Target_{2026}$	*Weak Indicator Target*
$Realisasi_n \leq Target_{2026}$	*Not An Issue*

Keterangan:

1. Jika capaian suatu indikator termasuk kategori *weak performance*, perlu disusun strategi-strategi untuk pecepatan peningkatan capaian indikator tersebut.
2. Capaian suatu indikator yang termasuk kategori *good performance* artinya capaian indikator tersebut sudah *on track*.
3. Capaian suatu indikator yang termasuk kategori *weak indicator target* diindikasi karena perencanaan yang kurang akurat sehingga perlu dilakukan simulasi target baru.
4. Jika capaian suatu indikator termasuk kategori *not an issue*, menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena targetnya untuk tahun 2026 telah tercapai. Untuk perencanaan lebih lanjut program atau kegiatan ini terus dilaksanakan, termasuk penganggaran-nya guna mempertahankan pencapaian kinerja dan bisa lebih meningkat.

Identifikasi dan analisis ini dilakukan pada indikator tujuan dan indikator sasaran sesuai yang terdapat pada RPJMD 2021-2026.

3.1.1 Indikator Tujuan

1. Indeks Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasioanal dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Ketahanan Nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, serta terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Nasional

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	2,70	2,75	2,78	2,80	2,82	2,85
Realisasi	2,47					

Ketahanan nasional suatu wilayah diukur melaui indeks ketahanan nasional. Provinsi Kalimantan Utara telah menargetkan Indeks Ketahanan Nasional sebesar 2,70 (cukup tangguh) pada 2021 hingga 2,85 (cukup tangguh) pada 2026 dalam dokumen RPJMD. Namun, realisasinya, indeks ketahanan nasional Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 hanya mencapai 2,47 (kurang tangguh). Artinya, target yang telah ditetapkan belum mampu dicapai. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan indeks ketahanan nasional dari 2,65 menjadi 2,47 pada 2021. Dengan demikian, capaian indeks ketahanan nasional Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori *weak performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi untuk pecepatan peningkatan capaian indeks ketahanan nasional. Peningkatan indeks ketahanan nasional dapat dilakukan dengan mengimplementasikan konsepsi ketahanan nasional secara benar. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian tujuan nasional.

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dilaksanakannya reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	B	B	BB	BB	BB	A
Realisasi	B					

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 termasuk dalam predikat B. Hal ini sudah sesuai dengan yang target indeks reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori *good performance* dimana pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini sudah *on track*. Capaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga mendapatkan predikat A pada 2026.

3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara senantiasa menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat dampak pademi COVID-19, IPM Kalimantan Utara kembali mengalami peningkatan mulai tahun 2021 hingga saat ini. Pada tahun 2022, IPM Kalimantan Utara tercatat sebesar 71,83, meningkat 0,64 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini didukung adanya peningkatan dari semua komponen penyusun IPM. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara berada pada kategori “tinggi”. Namun, masih ada kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara dengan capaian pembangunan manusia berstatus “sedang”, yaitu Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaen Nunukan. Jika

dirinci berdasarkan Kabupaten/Kota, IPM tertinggi berada di Kota Tarakan yang sebesar 76,68 dan yang terendah berada di Kabupaten Nunukan sebesar 68,60.

Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2022

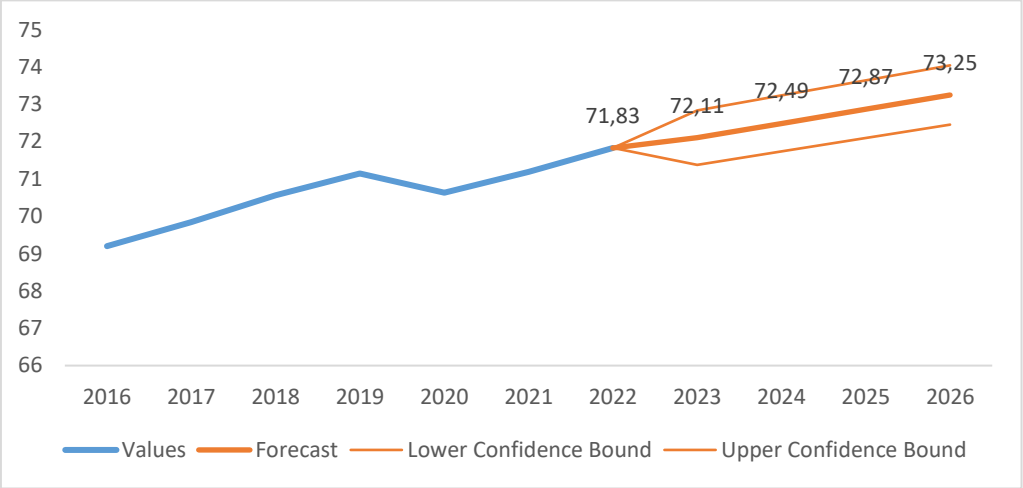
Kabupaten/ kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Malinau	70,71	71,23	71,74	72,06	71,94	72,32	72,75
Bulungan	69,88	70,74	71,23	71,66	71,10	71,80	72,08
Tana Tidung	65,64	66,26	67,05	67,79	66,97	67,76	68,60
Nunukan	64,35	65,10	65,67	66,32	65,79	66,46	67,16
Tarakan	74,88	75,27	75,69	76,09	75,83	76,23	76,68
Kalimantan Utara	69,20	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	71,41	71,32	71,41	71,58	71,71	71,84
Realisasi	71,19	71,83				

Pemerintah daerah telah merumuskan target pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian 71,32 pada 2022 dan 71,84 pada 2026. Jika dibandingkan dengan realisasi saat ini, IPM Kalimantan Utara pada 2022 telah memenuhi target pada 2022, bahkan hampir mencapai target 2026. Dengan demikian, capaian IPM dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*, karena realisasi sudah jauh melebihi target yang ditetapkan.

Gambar 3.1 Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia



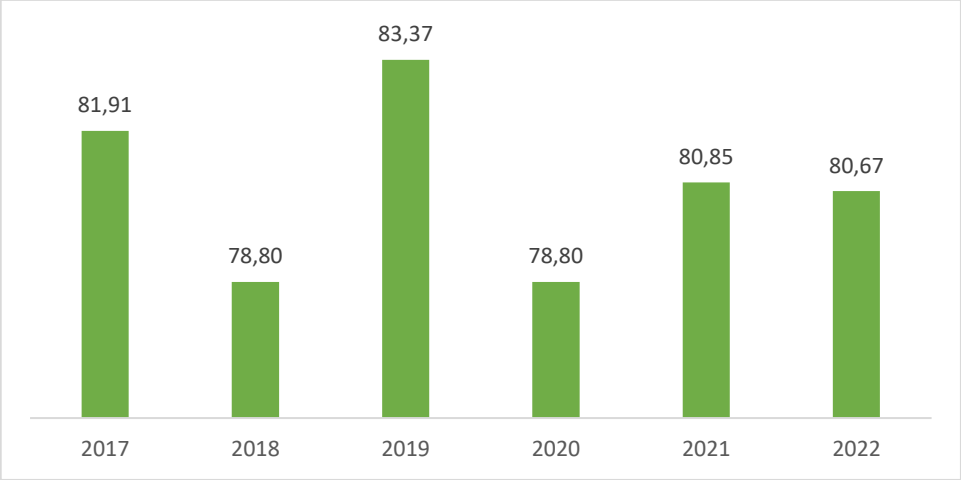
Jika diamati lebih rinci, dari kondisi tahun dasar (2020) hingga 2026, IPM Kalimantan Utara hanya ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 1,71 persen. Bahkan, terjadi penurunan target pada tahun 2022. Padahal, melihat tren pembangunan manusia tahun-tahun sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemampuan untuk mencapai target yang lebih tinggi. Hasil proyeksi IPM dengan menggunakan series data tahun-tahun sebelumnya menujukkan IPM Kalimantan Utara pada 2026 akan mencapai 73, 25; lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kualitas lingkungan dilakukan dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Gambar 3.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, 2017-2022



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Utara cukup berfluktuatif selama 2017-2022. IKLH pada 2017 tercatat sebesar 81,91, sementara pada 2022 tercatat sebesar 80,67.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	78,08	78,27	78,46	78,62	78,90	79,05
Realisasi	80,85	80,67				

Jika membandingkan target IKLH pada RPJMD dengan kondisi saat ini, capaian IKLH Provinsi Kalimantan Utara termasuk pada kategori *Not an Issue* karena capaian pada 2022 sudah melampaui target pada 2026. Namun, melihat capaian selama 2017-2022 yang terus berfluktuatif, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga konsistensi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Utara.

5. Indeks Layanan Infrastruktur

Pengukuran indeks layanan infrastruktur merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pada 2020, indeks layanan infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara mencapai 3,25 dan selanjutnya meningkat hingga 3,96 pada

2021. Dengan capaian ini, indeks layanan infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara berada pada kategori "sedang".

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indeks Layanan Infrastruktur

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	3,40	3,55	3,70	3,85	4,00	4,15
Realisasi	3,96					

Target indeks layanan infrastruktur hingga 2026, yaitu 4,15. Sementara itu, untuk tahun 2021, targetnya sebesar 3,40. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, angka ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Bahkan, sudah hampir memenuhi target untuk tahun 2025. Dengan demikian, capaian indeks layanan infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori *weak indicator target*. Pada akhir periode RPJMD 2021-2026, indeks layanan infrastruktur diperkirakan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan saat ini.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Selama tahun 2016-2019, perekonomian Kalimantan terus tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65 persen per tahun. Selanjutnya, akibat pandemi COVID-19, ekonomi Kalimantan Utara terkontraksi hingga 1,09 persen karena adanya berbagai pembatasan kegiatan. Memasuki masa pemulihan pada tahun 2021, ekonomi Kalimantan Utara mulai membaik. Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tumbuh 3,98 persen. Namun, angka ini masih belum mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2019, yang tumbuh hingga 6,89 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kalimantan Utara belum seutuhnya kembali normal seperti pada kondisi sebelum pandemi COVID-19. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Malinau yang sebesar 4,70 persen dan terendah berada di Kabupaten Bulungan yang sebesar 4,01 persen.

Tabel 3.7 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2021 Menurut Kabupaten Kota dan Provinsi (Persen)

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malinau	1,99	5,99	5,78	6,44	-0,34	4,70
Bulungan	2,89	5,74	5,06	4,70	-0,66	4,01
Tana Tidung	1,10	3,94	3,57	4,89	-0,92	4,29
Nunukan	3,63	6,79	6,28	6,78	-0,93	4,07
Tarakan	5,93	7,96	7,50	7,68	-0,70	4,02
Kalimantan Utara	3,55	6,80	5,36	6,89	-1,09	3,98

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	2,52 –3,53	5,4	5,6	6,01	5,2	5,3
Realisasi	3,98					

Walaupun belum tumbuh seperti pada kondisi sebelum COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tahun 2021 ini telah memenuhi target sesuai RPJMD yang sebesar 2,52–3,53 persen. Bahkan, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih tinggi dari target tersebut. Dengan demikian, capaian petumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekomoni di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

7. Nilai PDRB ADHK

Tabel 3.9 Nilai PDRB (ADHK) Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	6.577,52	6.971,53	7.374,49	7.849,49	7.822,76	8.190,17
Bulungan	9.996,96	10.570,93	11.106,35	11.628,63	11.551,35	12.014,80
Tana Tidung	3.272,72	3.401,83	3.523,21	3.695,61	3.661,78	3.818,81
Nunukan	13.088,62	13.976,75	14.854,59	15.861,82	15.713,64	16.353,33
Tarakan	17.790,42	19.206,12	20.647,43	22.232,71	22.077,30	22.965,21
Total Kabupaten/Kota	50.728,26	54.129,18	57.508,09	61.270,28	60.828,85	63.344,33

Secara umum, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menunjukkan peningkatan selama tahun 2016-2021. PDRB ADHK sempat mengalami penuruna pada 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kembali meningkat pada 2021. PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 tersebesar 63,34 triliun rupiah. Kabupaten/kota penyumbang PDRB terbesar yakni Kota Tarakan sebesar 22,96 triliun rupiah dan Kabupaten Nunukan sebesar 16,35 triliun rupiah. Sementara itu, Kabupaten/Kota yang menjadi penyumbang PDRB terendah yakni Kabupaten Tana Tidung sebesar 3,82 triliun rupiah.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi PDRB ADHK

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	62.887	66.283	69.995	74.202	78.060	82.198
Realisasi	63.163					

Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, PDRB ADHK Kalimantan Utara tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian PDRB ADHK Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam mencapai PDRB ADHK yang diharapkan di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

8. Nilai PDRB ADHB

Tabel 3.11 Nilai PDRB (ADHB) Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021 (Miliar Rupiah)

Kabupaten/ kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	7.288,64	8.497,62	9.364,80	10.618,38	11.147,29	12.323,48
Bulungan	13.634,74	15.265,25	16.796,82	18.344,05	18.718,82	20.106,89
Tana Tidung	4.209,73	4.753,74	5.145,59	5.663,55	5.802,84	6.524,45
Nunukan	16.501,99	20.040,90	22.576,03	25.430,86	26.298,11	28.841,62
Tarakan	24.386,40	28.004,13	31.670,82	36.266,95	38.110,94	41.895,73
Total Kab./Kota	66.023,52	76.563,66	85.556,09	96.325,80	100.080,04	109.694,18

Sejalan dengan nilai PDRB ADHK, nilai Produk domestik regional bruto atas dasar harga Berlaku (PDRB ADHB) Provinsi Kalimantan Utara juga terus meningkat dari tahun ke tahun. PDRB ADHB tahun 2016 sebesar 66,02 triliun rupiah meningkat menjadi 109,69 triliun rupiah pada tahun 2021. Kabupaten/kota penyumbang PDRB terbesar yakni Kota Tarakan sebesar 41,90 triliun rupiah dan Kabupaten Nunukan sebesar 28,84 triliun rupiah. Sementara itu, Kabupaten/Kota yang menjadi penyumbang PDRB terendah yakni Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,52 triliun rupiah.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi PDRB ADHB

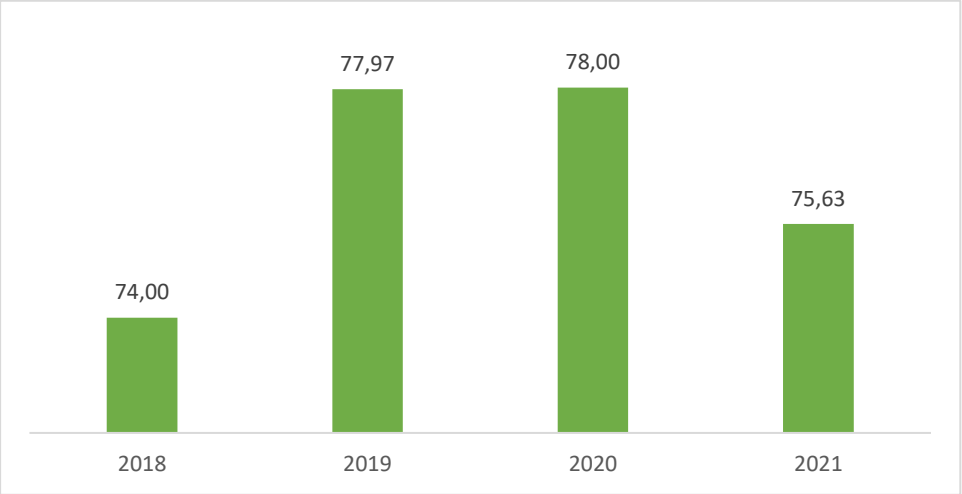
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	108.067	116.258	126.247	136.636	148.825	162.016
Realisasi	110.669					

Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, PDRB ADHB Kalimantan Utara tahun 2021 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian PDRB ADHB Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam mencapai PDRB ADHB yang diharapkan di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

9. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Keberhasilan pembangunan kerukunan umat beragama dapat dinilai dengan melihat indeks kerukunan umat beragama. Terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama, yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat bergama suatu masyarakat.

Gambar 3.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Utara, 2018-2021



Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat selama 2018-2020 dari 74,00 pada 2018 menjadi 78,00. Namun, pada 2021, indeks kerukunan umat beragama mengalami penurunan pada 2021 menjadi 75,63.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	78,50	79,25	80,60	81,70	82,80	83,30
Realisasi	75,63					

Pada dokumen RPJMD, indeks kerukunan umat beragama ditargetkan mencapai 83,30 pada 2026. Sementara itu, target untuk tahun 2021 sebesar 78,50. Jika dibandingkan, realisasi indeks kerukunan umat beragama pada 2021 masih di bawah target yang ditentukan. Dengan demikian, capaian indeks kerukunan umat beragama termasuk kategori *weak performance*. Oleh karena itu, perlu adanya strategi-strategi untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
2. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif.
3. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.

10. Nilai Intensitas Energi

Kelangsungan berbagai sektor di suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan energi. Mengingat pentingnya peran tersebut, maka proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengembangan sektor energi. Oleh karena itu, perencanaan energi yang baik mutlak diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Nilai Intensitas Energi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,09	0,13	0,19	0,27	0,38	0,27
Realisasi	32,51					

Provinsi Kalimantan Utara menargetkan nilai intensitas energi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Target nilai intensitas energi hingga tahun 2026 sebesar 0,27 TOE per satu milyar rupiah. Melihat realisasi saat ini, target tersebut telah dapat terlampaui pada tahun 2021. Nilai intensitas energi pada tahun 2021 sebesar 32,51 TOE per satu milyar rupiah. Dengan demikian, capaian nilai intensitas energi dapat diklasifikasikan pada kategori *Not An Issue*.

11. Indeks Pembangunan Gender

Tabel 3.15 Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	81,02	81,53	81,71	81,36	81,95
Bulungan	...	84,74	84,98	85,39	85,10	85,12
Tana Tidung	...	77,37	77,82	78,02	77,57	78,20
Nunukan	...	82,15	82,41	82,74	82,29	83,09
Tarakan	...	91,23	92,28	92,16	91,90	92,00
Kalimantan Utara	86,34	85,96	86,74	87,00	86,67	87,30

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Semakin mendekati nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun menjauhi nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

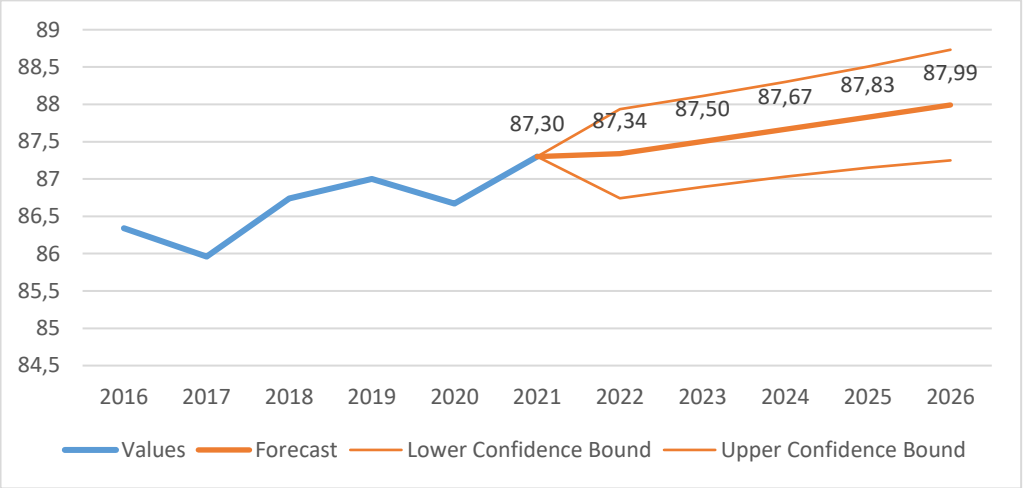
IPG Kalimantan Utara tahun 2016-2021 cukup berfluktuatif dan cenderung meningkat. IPG Kalimantan Utara tahun 2016 sebesar 86,34 dan tahun 2021 sebesar 87,30. Dengan capaian ini, status pembangunan gender Provinsi Kalimantan Utara masih bersatus rendah. Pada level kabupaten/kota, pembangunan gender di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara juga masih berstatus rendah. Kabupaten/kota dengan IPG tertinggi adalah Kota Tarakan (87,30), sementara yang terrendah adalah Kabupaten Tana Tidung (78,20).

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	87,87	87,87	89,10	90,60	92,10	94,30
Realisasi	87,30					

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021-2026, realisasi IPG tahun 2021 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator IPG diklasifikasikan dalam kategori *Weak Performance*.

Gambar 3.4 Proyeksi IPG



Berdasarkan hasil proyeksi dari data-data tahun sebelumnya, IPG tahun 2026 hanya sebesar 87,99; atau pada kondisi optimis akan mencapai 88,73. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 94,30 pada 2026. Oleh karena itu, diperukan strategi-strategi khusus untuk memacu percepatan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 3.17 Indeks Pembangunan Gender Menurut Komponen, 2021

Indikator	Satuan	Laki-Laki	Perempuan
UHH	Tahun	70,69	74,48
HLS	Tahun	12,94	13,26
RLS	Tahun	9,76	8,93
Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.895	5.989
IPM		75,83	66,20

Jika dilihat menurut komponen penyusun IPG, terdapat dua indikator yang lebih rendah dan dua indikator yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Umur Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan demikian, untuk dapat mewujudkan pembangunan gender yang setara antara perempuan dan laki-laki perlu strategi yang dapat mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup dan Harapan Lama

Sekolah laki-laki serta peningkatan Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan perempuan. Strategi-strategi tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan akses kesehatan
2. Melakukan sosialisasi massif terkait gaya hidup sehat, khususnya kepada laki-laki
3. Memastikan tercapainya program wajib belajar
4. Memberikan motivasi dan dorongan kepada penduduk perempuan melanjutkan pendidikannya melalui kejar paket, dan sebagainya
5. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada penduduk perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan
6. Meningkatkan kesempatan dan partisipasi kerja perempuan, utamanya pada sektor formal

12. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Penilaian IDG sama seperti IPG. Semakin mendekati nilai 100, maka semakin setara peran antara perempuan dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan. Namun menjauhi nilai 100, maka semakin besar perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 3.18 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten Kota Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	65,14	65,03	65,84	68,85	70,11
Bulungan	...	47,74	48,34	62,05	65,14	64,45
Tana Tidung	...	57,69	50,19	52,64	59,74	60,52
Nunukan	...	60,48	70,26	77,78	77,16	77,67
Tarakan	...	51,33	52,00	59,34	59,72	58,92
Kalimantan Utara	63,52	61,09	69,53	61,48	64,31	61,70

Angka IDG Kalimantan Utara cukup berfuktuatif. Namun, dalam kurun waktu 2016-2021, justru cenderung menurun. IDG Kalimantan Utara pada 2016 mencapai 63,52 dan pada 2021 turun menjadi 61,70.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	62,09	62,09	68,12	70,34	72,56	74,70
Realisasi	61,70					

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021-2026, realisasi IDG tahun 2021 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator IDG diklasifikasikan dalam kategori *Weak Performance*. Melihat data dari tahun-tahun sebelumnya, selama 2016-2021, IDG hanya dua kali mengalami peningkatan yaitu pada 2018 dan 2020. Oleh karena itu, diperukan strategi-strategi khusus untuk memacu percepatan pemberdayaan gender di Provinsi Kalimantan Utara agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.20 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Komponennya, 2017-2021

Indikator (persen)	2017	2018	2019	2020	2021
Keterlibatan Perempuan di Parlemen	11,43	20,00	11,43	14,29	11,43
Perempuan sebagai Tenaga Profesional	44,82	44,36	41,79	42,17	42,91
Sumbangan Pendapatan Perempuan	25,88	26,16	26,33	26,58	26,92

Dirinci menurut komponennya, masih terdapat ketimpangan antara peran aktif perempuan dan laki-laki pada semua indikator. Peran aktif perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki pada semua indikator. Ketimpangan terbesar terlihat pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen. Tahun 2021, persentase perempuan yang duduk pada kursi parlemen (DPRD) hanya 11,43 persen saja, sedangkan 88,57 persennya diduduki oleh laki-laki. Sementara itu, untuk tenaga profesional, 42,91 persennya adalah perempuan, sedangkan 57,09 persennya adalah laki-laki, dan untuk pendapatan, hanya 26,92 persen dari total pendapatan yang disumbang oleh perempuan, sedangkan 73,08 persennya disumbang oleh laki-laki. Dengan demikian, untuk mewujudkan pemberdayaan gender sesuai target yang ditetapkan, perlu strategi yang mendorong meningkatnya peran aktif perempuan pada kursi parlemen, tenaga profesional, dan share untuk total pendapatan, diantaranya dengan cara:

1. Membuka akses perempuan untuk menempati posisi di parlemen
2. Meningkatkan kapasitas perempuan di parlemen
3. Mendorong perempuan untuk bekerja pada sektor formal
4. Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas tenaga kerja perempuan
5. Penempatan perempuan pada jabatan publik
6. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG

13. Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Undang-undang (UU) Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memberikan dorongan dalam peningkatan kesejahteraan pada anggotanya dan masyarakat luas secara umum.

Keberadaan koperasi turut mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan yang disokong oleh UMKM yang dikelola oleh masyarakat. Keberadaan koperasi terhadap UMKM membuka peluang besar bagi masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah dan murah.

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	6,75	6,71	7,14	7,41	7,45	7,50
Realisasi	7,28					

Mengingat pentingnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan target laju pertumbuhan koperasi dan UMKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan koperasi dan UMKM diharapkan mencapai 7,50 persen pada periode akhir RPJMD (2026). Sementara itu, realisasi laju pertumbuhan koperasi dan UMKM pada 2021 tercatat sebesar 7,28 persen. Realisasi ini telah melampaui target untuk tahun 2021, bahkan juga melampaui target 2023. Dengan demikian, capaian laju pertumbuhan koperasi dan UMKM dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan laju pertumbuhan koperasi dan UMKM lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan.

14. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen yang memberikan kontribusi besar dalam mendorong perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara. Adanya beberapa mega proyek yang sedang dijalankan diharapkan dapat memacu peningkatan investasi.

Tabel 3.22 Target dan Realisasi Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD		10,00	28,00	3,00	3,00	8,00
Realisasi	56					

Capaian rata-rata pertumbuhan realisasi investasi Provinsi Kalimantan Utara mencapai 56 persen pada 2021. Dalam RPJMD, selama kurun waktu 2022-2026, rata-rata pertumbuhan realisasi investasi paling tinggi ditargetkan pada 2023, sebesar 28 persen. Sementara itu, untuk tahun-tahun selanjutnya taget rata-rata pertumbuhan realisasi investasi ditargetkan kurang dari 10 persen. Untuk dapat menarik investasi yang lebih besar, perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik.

15. Indeks Williamson

Indeks Williamson menunjukkan seberapa besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Besaran nilai Indeks ini berkisar antara 0-1. Jika nilai IW menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar, dan jika nilai IW mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil, dengan kata lain nilai indeks ini akan semakin baik jika semakin kecil.

Tabel 3.23 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Utara	0,1869	0,1645	0,1437	0,1262	0,159	0,1655

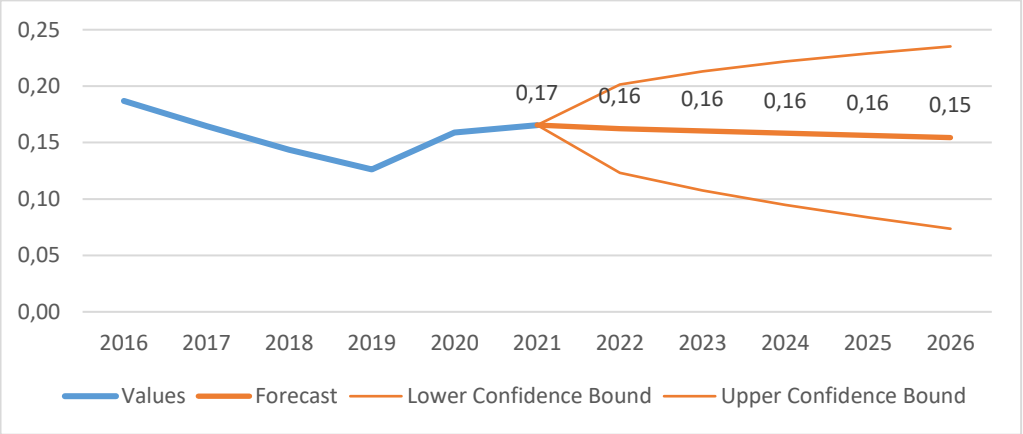
Selama tahun 2016-2019, terlihat bahwa nilai indeks williamson selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 0,1869 pada 2016 menjadi 0,1262 pada 2019. Walaupun demikian, indeks williamson selama dua tahun terakhir justru menunjukkan peningkatan, yang artinya ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Indeks williamson Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 sebesar 0,1655.

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Indeks Williamson

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,19	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15
Realisasi	0,17					

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian Indeks Williamson tahun 2021 sudah lebih baik dibandingkan target 2021. Bahkan, sudah mencapai target untuk tahun 2023. Dengan demikian, capaian Indeks Williamson diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*.

Gambar 3.5 Proyeksi Indeks Williamson



Dari hasil proyeksi menggunakan data Indeks Williamson tahun-tahun sebelumnya, Indeks Williamson pada tahun 2022-2025 sebesar 0,16 dan pada tahun 2026 mencapai 0,15. Hasil proyeksi untuk tahun 2026 masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

16. Proporsi Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal

Banyaknya desa yang masuk dalam kategori tertinggal dan tidak tertinggal juga menjadi atensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya mensejahterakan warganya terutama yang tinggal di daerah pedesaan. Pemerintah berupaya agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dimana segala fasilitas baik kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana umum lainnya yang serba terbatas.Dan pada akhirnya pemerintah berupaya agar proporsi desa tinggal semakin berkurang, sehingga desa-desa yang ada di Kalimantan Utara menjadi desa yang mandiri dan maju (tidak tertinggal lagi).

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 telah ditargetkan proposri Desa tertinggal dan tidak tertinggal sebagai berikut;

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Proposri Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	40,72	36,24	31,32	32,44	20,13
Realisasi (%)	-	-	-	-	-	-

17. Tahapan Pembentukan DOB yang Dipenuhi

Keinginan untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) disebabkan oleh beberapa faktor yakni: ketimpangan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang sulit dijangkau oleh masyarakat, luas wilayah yang menyebabkan pembanguan tidak merata, faktor keadilan yang dirasa kurang dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan.

Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelengaraan pemerintahan daerah saat ini, hal tersebut yang memicu munculnya berbagai macam fenomena dan keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) baik daerah Provinsi, maupun daerah Kabupaten/Kota yang terpisah dari daerah induknya.

Tahapan pembentukan wilayah baru di Kalimantan Utara telah menjadi target Pemerintah dalam RPJMD 2021-2024, sebagai berikut :

Tabel 3.26 Target dan Realisasi Tahapan Pembentukan DOB yang Dipenuhi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	-	4	1	-	-
Realisasi (%)	-	-	-	-	-	-

Sampai dengan tahun 2022, realisasi pembentukan DOB belum ada sehingga target dalam RPJMD masih terus menjadi prioritas utama dan menjadi Indikator utama RPJMD.

Tabel 3.27 Ringkasan Identifikasi dan Analisis Indikator Tujuan

No	Indikator	Klasifikasi
1	Indeks Ketahanan Nasional	*Weak Performance*
2	Indeks Reformasi Birokrasi	*Good Performance*
3	Indeks Pembangunan Manusia	*Weak Indicator Target*
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*Not An Issue*
5	Indeks Layanan Infrastruktur	*Weak Indicator Target*
6	Pertumbuhan Ekonomi	*Good Performance*
7	PDRB ADHK	*Good Performance*
8	PDRB ADHB	*Good Performance*
9	Indeks Kerukunan Umat Beragama	*Weak Performance*
10	Nilai Intensitas Energi	*Not An Issue*
11	Indeks Pembangunan Gender	*Weak Performance*
12	Indeks Pemberdayaan Gender	*Weak Performance*
13	Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM	*Weak Indicator Target*
14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi	*Not An Issue*
15	Indeks Williamson	*Weak Indicator Target*
16	Proporsi Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal	*Not An Issue*
17	Tahapan Pembentukan DOB yang Dipenuhi	*Not An Issue*

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis ketujuhbelas indikator tujuan, terdapat tiga indikator yang dapat diklasifikasikan dalam kategori *Not An Issue* (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Nilai Intensitas Energi, Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Investasi), empat indikator dalam kategori *Good Performance* (Indeks Reformasi Birokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB ADHK, dan PDRB ADHB), empat indikator dalam kategori *Weak Indicator Target* (Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Layanan Infrastruktur, Laju Pertumbuhan Koperasi dan UMKM, dan Indeks Williamson), dan empat indikator yang termasuk dalam kategori *Weak Performance*, yaitu Indeks Ketahanan Nasional, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender.

3.1.2 Indikator Sasaran RPJMD

Pada indikator sasaran, terdapat 41 indikator yang ingin dicapai. Dalam pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi dan analisis tehadap indikator Sasaran, yaitu :

- **Angka kriminalitas tertangani**

Gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi perhatian semua pihak. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Angka kriminalitas yang bisa ditangani dengan baik akan sangat membantu terciptanya iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mentapkan target angka kriminalitas tertangani dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Angka Kriminalitas Tertangani

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	78,00	82,00	87,00	93,00	98,00
Realisasi (%)	100					

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran dengan mengubah satuan sehingga, angka-angka target belum bisa tercermin dalam angka realisasi.

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi Indonesia yang dapat dijadikan

sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Bahkan saat ini IDI merupakan salah satu indikator di dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030. IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 3.29 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	75,28	79,13	76,14	77,66	81,09	74,03
Kalimantan Tengah	74,77	76,12	71,27	81,16	74,91	73,17
Kalimantan Selatan	73,43	76,25	79,92	79,47	74,05	75,41
Kalimantan Timur	73,64	72,86	73,88	77,67	81,99	81,02
Kalimantan Utara	76,98	81,06	81,07	83,45	78,24	79,38

Nilai IDI Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 79,38. Capaian IDI pada nilai ini dapat dikategorikan sebagai kategori sedang. Meskipun begitu, dari tiga aspek yang ada dalam nilai IDI, terdapat dua aspek nilai IDI Kalimantan Utara yang berkategori tinggi dan terdapat satu aspek yang berkategori sedang. Aspek-aspek yang berkategori tinggi adalah aspek kebebasan dengan nilai 82,78 dan aspek kesetaraan yang bernilai 80,14. Sedangkan aspek yang berkategori sedang adalah aspek kapasitas lembaga demokrasi yang bernilai 75,11.

Tabel 3.30 Target RPJMD dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Realisasi	Sedang					

Namun, jika capaian realisasi IDI tahun 2021 dibandingkan dengan target IDI pada RPJMD maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *weak performance*, sehingga perlu disusun strategi-strategi untuk percepatan peningkatan capaian indikator tersebut. Pada hasil IDI 2021, terdapat beberapa

indikator dalam aspek-aspek penilaian IDI yang memiliki kategori rendah. Sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Meningkatkan jaminan kebebasan berkeyakinan.
   Kebebasan berkeyakinan adalah hak asasi yang dijamin oleh sumber hukum tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945. Kebebasan memeluk agama dan beribadah merupakan indikator tidak adanya diskriminasi perlakuan pada seluruh warga negara, yang merupakan ciri penting demokrasi. Oleh karenanya hak ini harus dilindungi oleh pemerintah dan dihormati oleh masyarakat. Indikator ini akan diukur berdasarkan banyaknya kasus yang melanggar kebebasan berkeyakinan, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Semakin banyak kasus terjadi, maka semakin buruk jaminan kebebasan berkeyakinan di sebuah wilayah. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka jaminan kebebasan berkeyakinan harus tetap dijaga dan ditingkatkan.
2. Meningkatkan kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
   Kebebasan pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Melindungi kebebasan pers adalah indikator kunci kebebasan sipil suatu masyarakat dan bagian penting dari demokrasi. Saat individu, kelompok dan komunitas diizinkan untuk berpikir secara bebas, mengekspresikan dan membagikan gagasan-gagasan mereka pada sesama warga negara, maka dapat dikatakan landasan sejati dari demokrasi telah terbentuk. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka kebebasan pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus ditingkatkan.
3. Meminimalisir adanya monopoli sumber daya ekonomi.
   Demokrasi tercapai ketika kekuasaan sudah tersebar, tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang atau dengan kata lain terjadi demonopolisasi kekuasaan dan sumber daya di ranah politik, ekonomi dan sosial. Semakin terkonsentrasi ekonomi yang ditunjukkan dari indeks persaingan usaha, maka semakin tidak demokratis sebuah wilayah. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka monopoli sumber daya ekonomi harus dihilangkan.
4. Meningkatkan kesetaraan dalam pelayanan dasar.
   Terdapat interrelasi antara demokrasi dan perlindungan sosial. Merujuk pada pemikiran Marshall yang mengangkat terminologi *social citizenship*, dapat dikatakan bahwa keanggotaan setiap orang dalam suatu komunitas mencakup juga perlindungan terkait kesetaraan warga (*basic human equality*) (Marshall, 1950: 8). Konteks pemikiran ini untuk mempertegas pentingnya ukuran kesejahteraan dalam ranah ekonomi pada dua hal utama yaitu terkait dengan pekerja dan jaminan sosial serta terkait dengan

kebutuhan hidup layak rumah tangga. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka kesetaraan dalam pelayanan dasar perlu ditingkatkan.

5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
   Jika publik didorong untuk dapat memengaruhi pembuatan keputusan atau mengontrol para pembuat keputusan, mereka harus bebas berkomunikasi dan berasosiasi satu dengan lainnya, untuk menerima informasi yang akurat, mengekspresikan pandangan yang berbeda, bebas untuk bergerak dan bebas dari penangkapan dan penahanan secara semena-mena. Jika kebebasan diperlukan bagi demokrasi, maka kebebasan mesti dijamin dalam seperangkat hak dalam konstitusi atau aturan hukum. Jaminan hukum untuk hak memperoleh informasi bahkan diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Kebebasan memperoleh informasi juga diturunkan dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka akses masyarakat terhadap informasi publik perlu ditingkatkan.
6. Meningkatkan pendidikan politik pada kader partai politik.
   Pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik. Dalam kerangka penguatan kelembagaan partai politik maka diperlukan proses kaderisasi atau pendidikan politik bagi kader partai. Partai politik yang kuat secara kelembagaan akan mendorong penguatan demokrasi. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka pendidikan politik pada kader partai politik perlu ditingkatkan.
7. Menjaga netralitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah.
   Dalam tata kelola politik pejabat pemerintah memiliki kewenangan untuk menghasilkan kebijakan. Meski demikian demokrasi mensyaratkan pemerintahan menjunjung tinggi supremasi hukum. Artinya dalam membuat kebijakan pemerintah harus sesuai aturan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam era demokrasi warga negara memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap suatu kebijakan. Semakin banyak kasus pemerintah kalah dalam PTUN, artinya semakin banyak kebijakan dibuat tidak sesuai aturan. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka netralitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah perlu dijaga dan ditingkatkan.
8. Meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
   DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat salah satu fungsinya adalah legislasi. Fungsi ini berupa kewenangan untuk menghasilkan peraturan perundangan yang berlaku pada wilayah kerjanya. Peraturan perundangan secara normatif dibuat untuk mengisi kebutuhan akan norma hukum, di mana salah satu syaratnya memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan (pasal 5 poin e UU 12/2011). Oleh karenanya DPR

menyusun program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahunan dan DPRD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan rencana peraturan perundangan paling mendesak untuk disahkan. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka kinerja lembaga legislatif perlu ditingkatkan.

9. Meningkatkan kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.
   Pejabat publik dan aparatur negara bertindak sebagai representasi dari seluruh lapisan, kelompok dan golongan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Birokrasi berfungsi dalam proses pendistribusian sumber daya pada masyarakat termasuk menjalankan pelayanan publik. "Birokrasi yang professional dan netral" merupakan salah satu kondisi yang ingin dicapai melalui arah pembangunan politik tahun 2025. Sehingga dalam meningkatkan IDI, maka kinerja birokrasi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.

Indeks Resiko Bencana

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat **bencana** pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana. Penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan.

Tabel 3.31 Target dan Realisasi Indeks Ketahanan Nasional

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD (poin)	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62	153,62
Realisasi	157,03	157,47				

Resiko bencana suatu wilayah diukur melaui indeks resiko bencana. Provinsi Kalimantan Utara telah menargetkan Indeks Resiko Bencana sebesar 153,62 mulai tahun 2021 hingga 2026 dalam dokumen RPJMD. Namun, realisasinya, indeks resiko bencana Provinsi Kalimantan Utara pada 2021 mencapai 157,03 poin dan tahun 2022 sebesar 157,47 poin. Artinya, target yang telah ditetapkan

tercapai dan bahkan melebihi angka target. Dengan demikian, capaian Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori *Not An Issue*. Oleh karena itu, perlu penyesuaian angka target baru sehingga leboh realistis dan perlu upaya pemenuhan target yang baru.

Predikat SAKIP

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi tujuh kategori, yakni paling ren Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajeman kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Tabel 3.32 Target dan Realisasi Predikat SAKIP

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	BB	BB	BB	BB	BB	A
Realisasi	BB					

Penilaian SAKIP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 termasuk dalam predikat BB. Hal ini sudah sesuai dengan yang target penilaian predikat SAKIP yang ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, capaian penilaian SAKIP Provinsi Kalimantan Utara termasuk kategori *good performance* dimana pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini sudah *on track*. Capaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga mendapatkan predikat A pada 2026.

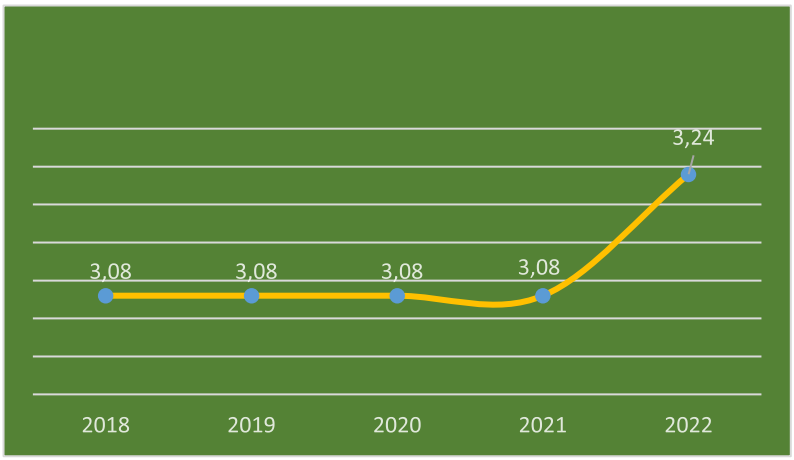
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat maturasi SPIP juga dikenal sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern. Perkembangan nilai maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Utara ditunjukkan dalam gambar berikut

Gambar 3.6 Perkembangan Maturitas SPIP 2018-2022



Nilai Maturitas SPIP stagnan mulai tahun 2018 hingga tahun 2021 yakni berada pada angka 3,08. Pada tahun 2022 maturitas SPIP menunjukkan peningkatan hingga berada pada angka 3,24.

Maturitas SPIP telah tercantum dalam target RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026 dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Maturitas SPIP

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	3.083		3,1	3,2	3,3	3,4
Realisasi	3,08	3,08	3,24			

Meskipun sempat stagnan beberapa tahun, peningkatan nilai maturitas SPIP tahun 2022 ini cukup impresif. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian tingkat maturitas SPIP tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan target 2022. Bahkan, sudah mencapai target untuk tahun 2023. Dengan demikian, capaian Maturitas SPIP diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Adapun Kewenangan Pengukuran IPKD dalam hal ini berada pada Menteri dan Gubernur.

Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD Daerah Provinsi dilakukan secara Nasional yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Mendagri. Sedangkan Pemeringkatan hasil pengukuran IPKD Kabupaten/kota dilakukan terhadap kabupaten/kota dalam regional masing-masing provinsi ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal ini Gubernur akan menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Mendagri paling lambat bulan Juli tahun berikutnya

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan setiap tahun, masing-masing pemerintah daerah ditetapkan ada lima klaster pengelolaan keuangan yaitu 1) Sangat Tinggi, 2) Tinggi, 3) Sedang, 4) Rendah, dan 5) Sangat Rendah tetapi pada pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah hanya dikategorikan dalam 3 klaster, yaitu Klaster Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, Sedang, dan Rendah.

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah cermin bagi kita untuk harus melakukan perbaikan dan perubahan terus menerus mewujudkan peningkatan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan IKPD dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Realisasi	-					

Sampai dengan tahun 2022 ini relaisasi IPKD belum ada, karena pengukuran IPKD baru dilaksanakan pada tahun 2021, meskipun dalam RPJMD telah ditetapkan angkanya.

- Angka Harapan Hidup

Tabel 3.35 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	71,24	71,39	71,4	71,42	71,45	71,49	71,50
Bulungan	72,36	72,51	72,55	72,60	72,66	72,74	72,76
Tana Tidung	71,31	71,33	71,35	71,38	71,42	71,49	71,51
Nunukan	71,23	71,25	71,27	71,30	71,34	71,40	71,41
Tarakan	73,69	73,85	73,88	73,92	73,97	74,04	74,06
Kalimantan Utara	72,43	72,47	72,5	72,54	72,59	72,65	72,67

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir Kalimantan Utara tahun 2022 tercatat 72,67 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,67 tahun , lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

Tabel 3.36 Target RPJMD dan Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD		72,63	72,68	72,73	72,78	72,80
Realisasi	72,65	72,67				

Jika capaian realisasi AHH tahun 2022 sebesar 72,67 dibandingkan dengan target AHH pada RPJMD tahun 2022 sebesar 72,63 maka capaian AHH Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *good performance* yang artinya AHH Kalimantan Utara sudah *on track*.

Angka Harapan Lama Sekolah

Tabel 3.37 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	13,24	13,25	13,27	13,29	13,3	13,31	13,33
Bulungan	12,75	12,96	12,98	12,99	13	13,01	13,03
Tana Tidung	12,17	12,18	12,19	12,2	12,21	12,22	12,38
Nunukan	12,58	12,61	12,62	12,63	12,64	12,65	12,67
Tarakan	13,42	13,61	13,7	13,73	14,02	14,03	14,04
Kalimantan Utara	12,59	12,79	12,82	12,84	12,93	12,94	13,06

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kalimantan Utara tahun 2022 tercatat 13,06 tahun. Hal ini berarti anak-anak yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,06 tahun atau setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. HLS tahun 2022 tercatat lebih lama 0,12 tahun dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 3.38 Target RPJMD dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	13,01	13,15	13,28	13,45	13,6	13,75
Realisasi	12,94	13,06				

Jika capaian realisasi HLS tahun 2022 dibandingkan dengan target HLS pada RPJMD maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *weak performance*. Target RPJMD untuk Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 13,15 tahun yang berarti target belum tercapai dimana masih ada jarak 0,09 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu disusun strategi-strategi untuk percepatan peningkatan capaian indikator tersebut. Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Penambahan jumlah sekolah formal dan non formal.
2. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
   Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan lembaga, penganggaran pendidikan, tata kelola sekolah serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Proses pendidikan yang baik didukung oleh fasilitas sarana prasarana pendidikan yang memadai. Strategi yang dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan:
   a. pemetaan dan penilaian sekolah-sekolah yang memiliki gedung/ruang kelas rusak,
   b. rehabilitasi sekolah/ ruang kelas sekolah dasar,
   c. rehabilitasi sekolah/ ruang kelas sekolah menengah
3. Diklat/*workshop* untuk tenaga pendidik.
4. Bantuan biaya operasional pada sekolah non formal.
5. Pemerataan kuantitas tenaga pendidik.
   Peran tenaga pendidik dalam proses pendidikan sangat besar. Setiap upaya meningkatkan kualitas pendidikan seharusnya dimulai dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik lebih banyak yang memilih untuk bertugas di daerah kota dibandingkan di daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor ketersediaan infrastruktur yang lebih memadai di kota dibandingkan di daerah. Ketidakmerataan tenaga pendidik antara kota dan daerah menyebabkan terjadi kesenjangan mutu pendidikan. Proses pemerataan kuantitas tenaga pendidik sebagai upaya pemerataan mutu pendidikan harus didukung dengan peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang adil. Dengan pola pelaksanaan mutasi dan rotasi yang transparan dan adil menjadikan tenaga pendidik lebih tenang dalam

menjalankan tugas. Strategi pemerataan kuantitas tenaga pendidik bisa dilakukan melalui kegiatan:

a. pemetaan kuantitas tenaga pendidik seluruh kabupaten dan kota,
b. evaluasi pola mutasi dan rotasi tenaga pendidik yang sudah dilakukan,
c. pembuatan peraturan tentang ketentuan mutasi dan rotasi di kabupaten/kota maupun antar kabupaten/kota,
d. mutasi dan rotasi tenaga pendidik di kota/kabupaten ataupun antar kabupaten/kota

6. Beasiswa kurang mampu

   Salah satu faktor yang membatasi masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan adalah faktor biaya. Salah satu upaya pemerintah agar pendidikan dapat diakses oleh sebanyakbanyaknya masyarakat adalah dengan membuat pendidikan gratis. Namun, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua pemerintah daerah melakukan kebijakan pendidikan gratis. Salah satu upaya membantu masyarakat agar tetap dapat mengakses pendidikan selain pendidikan gratis adalah dengan memberikan beasiswa pada siswa kurang mampu.

   Pelaksanaan strategi pemberian beasiswa siswa kurang mampu dapat dijalankan dengan kegiatan :

   a. pemberiaan beasiswa siswa kurang mampu,
   b. evaluasi ketepatan sasaran penerima beasiswa,
   c. perluasan cakupan sasaran penerima beasiswa siswa miskin.

7. Memberi kesadaran terhadap masyakat akan pentingnya wajib belajar 12 tahun.

- Angka rata-rata Lama Sekolah

Tabel 3.39 Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	8,56	8,88	9,04	9,05	9,39	9,40	9,41
Bulungan	8,43	8,75	8,92	8,93	8,94	9,19	9,20
Tana Tidung	8,11	8,23	8,49	8,53	8,54	8,80	8,97
Nunukan	7,57	7,65	7,73	7,81	8,00	8,17	8,24
Tarakan	9,92	9,93	9,94	9,96	9,97	9,98	10,08
Kalimantan Utara	8,49	8,62	8,87	8,94	9,00	9,11	9,27

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah dengan pembaginya merupakan penduduk berusia 25 tahun keatas. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kalimantan Utara tahun 2022 tercatat 9,27 tahun yang berarti penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9-10 tahun atau setara dengan lulus SMP. Angka ini juga meningkat sebesar 0,16 tahun dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 3.40 Target RPJMD dan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	9,13	9,27	9,40	9,53	9,68	9,82
Realisasi	9,11	9,27				

Jika capaian realisasi RLS tahun 2022 dibandingkan dengan target RLS pada RPJMD maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *good performance*. Target RPJMD untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2022 sebesar 9,27 tahun yang berarti capaian RLS Kalimantan Utara sudah *on track*.

- Angka Kemiskinan

Tabel 3.41 Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	7,15	8,06	7,68	6,96	6,63	7,30
Bulungan	8,99	9,93	9,44	8,78	9,06	10,03
Tana Tidung	6,11	6,63	5,08	4,72	4,81	5,15
Nunukan	5,25	6,22	6,71	6,11	6,36	6,79
Tarakan	5,17	6,32	6,15	6,00	6,24	6,71
Kalimantan Utara	6,23	7,22	7,09	6,63	6,80	7,36

Angka kemiskinan menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Pada tahun 2022 sekitar 6,77 persen penduduk di Kalimantan Utara termasuk kedalam kategori miskin. Target

RPJMD Kalimantan Utara untuk persentase penduduk miskin sebesar 7,0-6,73 persen. Melihat kondisi terkini, realisasi Kalimantan Utara berada di dalam target RPJMD 2022.

Tabel 3.42 Target RPJMD dan Realisasi Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	7,0-6,8	7,0-6,73	6,7-6,0	6,1-5,9	5,8-5,7	5,6-5,2
Realisasi	7,36	6,77				

Jika capaian realisasi Angka Kemiskinan tahun 2022 dibandingkan dengan target Angka Kemiskinan pada RPJMD 2022 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *good performance* yang artinya capaian Angka Kemiskinan Kalimantan Utara sudah *on track*.

◙ Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran.Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tabel 3.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	6,01	4,24	3,99	5,08	4,14
Bulungan	-	2,68	4,86	4,39	4,45	4,54
Tana Tidung	-	5,32	5,18	4,54	4,83	5,26
Nunukan	-	7,24	4,77	3,76	4,14	4,24
Tarakan	-	5,59	5,89	5,3	5,86	4,94
Kalimantan Utara	5,23	5,54	5,11	4,49	4,97	4,58

TPT Kalimantan Utara selama 2016-2021 cukup berfluktuatif, namun cenderung menurun. TPT pada 2016 sebesar 5,23 persen, sedangkan TPT pada 2021 sebesar 4,58 persen. Kabupaten/kota dengan TPT terrendah adalah Kabupaten Malinau, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung.

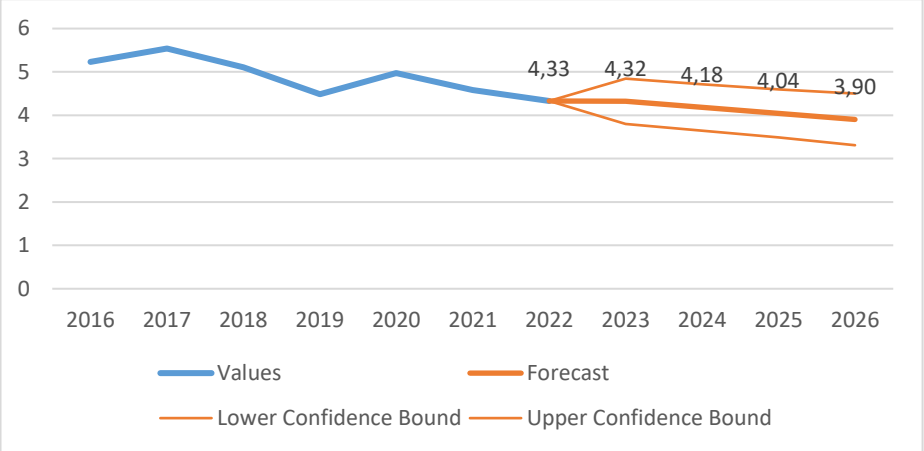
Tabel 3.44 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	4,8-5,5	4,56	4,45	4,33	4,22	4,11
Realisasi	4,58	4,33				

Pada 2022, TPT kembali mengalami penurunan menjadi 4,33 persen. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, TPT Kalimantan Utara pada 2022 telah melampaui target yang ditentukan. Bahkan, mencapai target pada 2024. Dengan demikian, capaian indikator TPT dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki kemampuan untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi. Hasil proyeksi dari data-data tahun sebelumnya menunjukkan TPT Kalimantan Utara pada 2026 dapat mencapai 3,90 persen.

Gambar 3.7 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Berbagai sektor usaha dan/atau kegiatan mempunyai potensi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjadi prioritas pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Utara namun ternyata berpotensi melepaskan emisi GRK dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Sumber emisi GRK di Provinsi Kalimantan Utara meliputi: perubahan hutan kering Primer menjadi hutan lahan kering sekunder, perubahan hutan lahan kering sekunder menjadi lahan terbuka, perubahan lahan hutan kering sekunder menjadi perkebunan, perubahan hutan mangrove menjadi tambak, perubahan hutan lahan kering sekunder menjadi lahan pertanian, perubahan hutan lahan kering sekunder menjadi sawah, perubahan lahan terbuka menjadi pemukiman, perubahan hutan kering sekunder menjadi pertambangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru berdasarkan UU No 20 tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai komitmen yang cukup baik dalam upaya mendukung target nasional dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, komitmen tersebut ditunjukkan dikeluarkannya SK Gubernur tahun 2015 tentang POKJA RAD GRK dalam rangka melaksanakan tugas Rencana Aksi Daerah penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, target penurunan emisi GRK ini telah tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Berikut target beserta realisasinya :

Tabel 3.45 Target dan Realisasi Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target RPJMD	5.006.209	5.268.945	6.523.255	7.774.605	9.018.675	10.252.006
Realisasi	2.367.458					

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021-2026, realisasi tingkat penurunan emisi GRK tahun 2021 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian tingkat penurunan emisi GRK diklasifikasikan dalam kategori *Weak Performance*. Beberapa rekomendasi berikut dapat dijadikan pertimbangan untuk dapat diterapkan dengan harapan target penurunan emisi GRK tercapai pada periode mendatang :

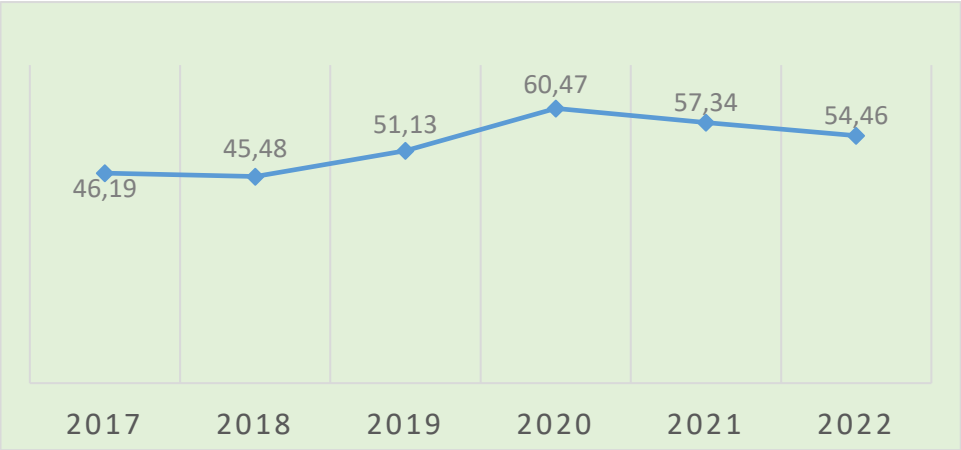
1. Menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik secara perlahan hingga masyaraat terbiasa dan dapat sepenuhnya beralih menggunakan barang organik.
2. Mengubah proses bisnis segala sektor terutama pemerintahan menjadi *paperless*. Di era digital saat ini terlebih setelah pandemi covid, kebijakan ini cukup relevan untuk diterapkan.
3. Mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi menggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah gambaran atau indikasi awal yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah dan pada periode tertentu. IKLH merupakan akumulasi dari tiga komponen utama yang masing-masing diberi bobot nilai, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Air sendiri merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Semakin tinggi suatu indeks kualitas air, semakin baik status mutu air tersebut.

Perkembangan indeks kualitas air Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.8 Indeks Kualitas Air 2017-2022



Angka indeks kualitas air cukup fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan kualitas air juga dipengaruhi oleh kondisi iklim setiap tahun yang berbeda-beda. Indeks kualitas air tertinggi dicapai pada tahun 2020 yakni sebesar 60,47. Pada tahun 2021 dan 2022, indeks kualitas air mengalami penurunan. Berikut uraian realisasi capaian indeks kualitas air dalam RPJMD 2021-2026 :

Tabel 3.46 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Air

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	54,82	54,92	55,02	55,12	55,30	55,50
Realisasi	57,34	54,46				

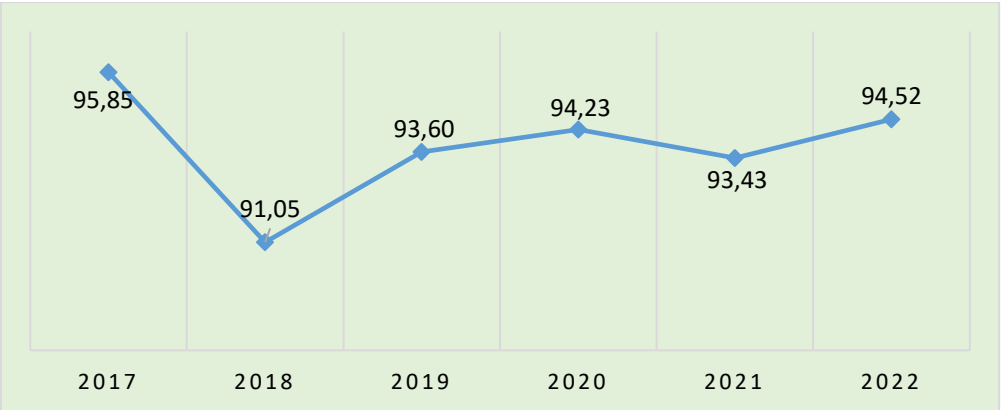
Indeks Kualitas Air pada tahun 2021 telah memenuhi target RPJMD hingga tahun 2026. Dengan demikian indeks kualitas air pada tahun 2021 termasuk dalam kategori *not an issue*. Namun realisasi indeks kualitas air mengalami penurunan yang cukup dalam pada 2022 yakni berada pada angka 54,46. Angka ini bahkan tidak memenuhi target RPJMD pada tahun 2022, sehingga tergolong dalam kategori *weak performance*. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan agar indeks kualitas air kembali meningkat pada tahun yang akan datang diantaranya :

1. Melakukan penataan ulang dan pemeliharaan rutin terhadap hutan mangrove yang sudah ada agar dapat bekerja maksimal dalam menyaring air disekitarnya dari logam berat yang menyebabkan pencemaran air.
2. Mengajak masyarakat melakukan aksi langsung ke sungai sehingga masyarakat dapat secara langsung mengerti dan menyadari kondisi degradasi sungai di lingkungan mereka sendiri yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air.
3. Menerapkan metode desiminasi sistemik dimana semua elemen masyarakat pinggir sungai dan masyarakat yang terkait dengan sungai mendapatkan informasi dan penjelasan yang komplit, mendapatkan leaflet yang jelas untuk dibaca tentang kondisi air dan pentingnya menjaga kualitas air. Terlebih jika masyarakat dapat menyumbangkan ide kreatif untuk mengatasi permasalahan menurunnya kualitas air di Lingkup Kalimantan Utara.

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah hasil pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat pencemaran udara di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara dihitung menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45/MENLH/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter ISPU adalah diameter partikulat (PM10), karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan ozon (O3). Semakin tinggi hasil pengukurannya, semakin berbahaya kualitas udara tersebut.

Gambar 3.8 Indeks Kualitas Udara



Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kalimantan Utara dilakukan hanya pada tahun 2017 hingga 2019. Kualitas udara pada tahun 2018 sempat membaik dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2019 nilai tersebut naik kembali menjadi 93,60. Nilai ini termasuk dalam kategori 'sedang'. Kategori ini mengindikasikan bahwa kualitas udara tidak berpengaruh terhadap kesehatan manusia tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan pengaruh pada nilai estetika wilayah. Peningkatan nilai ini disebabkan oleh peningkatan tingkat pencemaran udara yang berasal dari kebakaran hutan, aktivitas industri, dan penggunaan kendaraan bermotor.

Tabel 3.47 Target dan Realisasi Indeks Kualitas Udara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	91,21	91,32	91,43	91,54	92	92,15
Realisasi	93,43	94,52				

Jika capaian realisasi Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dibandingkan dengan target Indeks Kualitas Udara tahun 2022 maupun 2026 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *not an issue*. Angka Indeks Kualitas Udara tahun 2022 yang sebesar 94,52 persen telah memenuhi target RPJMD. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak lagi menjadi *issue* di Provinsi Kalimantan Utara karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. IKTL merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tabel 3.48 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Menurut Kabupaten Kota, 2017-2022

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	-	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	98,24	94,60	99,87	79,23	99,96	100,00

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Tabel 3.49 Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	99,16	99,53	99,89	100,00	100,00	100,00
Realisasi	99,96	100,00	-	-	-	-

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu 98,24 poin pada tahun 2017 menjadi 100,00 poin pada tahun 2022. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 adalah 99,96 berarti bahwa kualitas tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Utara tergolong sangat baik. Pemerintah daerah telah merumuskan target pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan capaian 100 poin pada 2022 sampai 2026. Jika dibandingkan dengan realisasi saat ini, Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada 2022 telah memenuhi target pada 2022 sampai 2026. Dengan demikian, capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat diklasifikasikan pada kategori Not An Issue, karena realisasi sudah mencapai target RPJMD hingga tahun 2026. Artinya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan seharusnya sudah tidak menjadi issue lagi di Provinsi Kalimantan Utara.

Indeks Kualitas Air Laut

Tabel 3.50 Indeks Kualitas Air Laut Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2020-2022

Kabupaten/kota	2020	2021	2022
Malinau	-	-	-
Bulungan	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-
Nunukan	-	-	-
Tarakan	-	-	-
Kalimantan Utara	74,74	81,52	84,85

Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tabel 3.51 Target RPJMD dan Realisasi Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	72,89	73,51	74,12	74,74	75,00	75,15
Realisasi	81,52	84,85	-	-	-	-

Indeks Kualitas Air Laut mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 74,74 poin pada tahun 2020 dan naik menjadi 84,85 poin pada tahun 2022. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah 84,85 berarti bahwa kualitas air laut di Provinsi Kalimantan Utara tergolong baik. Jika capaian realisasi Indeks Kualitas Air Laut tahun 2022 dibandingkan dengan target Indeks Kualitas Air Laut pada RPJMD 2026 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori not an issue. Capaian Indeks Kualitas Air Laut Kalimantan Utara pada tahun 2022 yang sudah berada pada angka 84,85 dan sudah melebihi target RPJMD 2026 sebesar 75,15. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

◙ Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan

Permasalahan terkait urusan perhubungan adalah mobilitas masyarakat rendah karena kurangnya prasarana transportasi dan terbatasnya sarana transportasi serta layanan transportasi. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi faktor utama penentu tingkat mobilitas selain kondisi ekonomi pelaku perjalanan. Mobilitas sendiri dimaknai sebagai kemampuan untuk melakukan pergerakan (perjalanan) yang diindikasikan dengan panjangnya jarak tempuh, frekuensi pergerakan, ketersediaan layanan transportasi, serta biaya transportasi yang terjangkau.

Dari permasalahan sarana-prasarana transportasi yang muncul, berkembang pada terbatasnya layanan transportasi (transport service), yaitu rendahnya kualitas layanan yang ditunjukkan dengan kapasitas dan frekuensi layanan masih rendah serta layanan belum teratur. Permasalahan layanan transportasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM yang kompeten serta kewenangan pengelolaan yang tidak jelas, terutama pada kasus layanan transportasi udara. Dari kacamata pengguna layanan transportasi terdapat permasalahan terkait dengan keterjangkauan layanan transportasi. Masih tingginya angka kemiskinan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga belum semua moda transportasi yang ada bisa dijangkau secara finansial. Di sisi lain, pengelolaan transportasi yang kurang bagus mengakibatkan transportasi biaya tinggi.

Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan telah tercantum dalam RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026 dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.52 Target dan Realisasi Cakupan Layanan Transportasi antar Pusat Kegiatan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	55	55	65	80	82	85
Realisasi	49					

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021-2026, realisasi Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan tahun 2021 masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan diklasifikasikan dalam kategori *Weak Performance*. Beberapa rekomendasi berikut dapat dijadikan

pertimbangan untuk dapat diterapkan dengan harapan target cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan tercapai pada periode mendatang :

1. Menerapkan Skema *Buy The Service* atau BTS untuk angkutan massal perkotaan.
2. Perbaikan jalan rusak terutama jalan vital yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.

Cakupan Layanan Air Bersih

Tabel 3.53 Cakupan Layanan Air Bersih Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	83,78	88,30	87,90	89,50	86,80

Seperti diketahui, peningkatan akses air bersih turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Cakupan layanan air bersih Provinsi Kalimantan Utara mengalami perkembangan yang fluktiatif dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 83,78 persen pada tahun 2017 menjadi 86,80 persen pada tahun 2021. Cakupan layanan air bersih pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 89,50 persen.

Tabel 3.54 Target RPJMD dan Realisasi Cakupan Layanan Air Bersih Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	59,92	63,73	64,92	66,11	67,30	68,50
Realisasi	86,80	-	-	-	-	-

Namun, jika capaian realisasi cakupan layanan air bersih tahun 2021 dibandingkan dengan target cakupan layanan air bersih pada RPJMD 2026 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori ***Not An Issue***. Capaian cakupan layanan air bersih Kalimantan Utara pada tahun 2021 sudah berada pada angka 86,80 dan sudah melebihi target RPJMD 2026 sebesar 68,50. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi

Tabel 3.55 Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2019-2022

Kabupaten/kota	2019	2020	2021	2022
Malinau	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-
Kalimantan Utara	93,36	94,40	93,78	94,61

Seperti diketahui, peningkatan akses air bersih turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa realisasi cakupan akses dan layanan telekomunikasi Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 93,36 persen pada tahun 2019 meningkat menjadi 94,61 persen pada tahun 2022.

Tabel 3.56 Target RPJMD dan Realisasi Cakupan Akses dan Layanan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	85,00	88,00	91,00	95,00	98,00
Realisasi	93,78	94,61	-	-	-	-

Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian realisasi cakupan akses dan layanan telekomunikasi Kalimantan Utara tahun 2022 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian realisasi cakupan akses dan layanan telekomunikasi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori ***Good Performance***, artinya kinerja pemerintah dalam mencapai realisasi cakupan akses dan layanan telekomunikasi yang diharapkan di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

- Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Tabel 3.57 Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	2,24	0,14	1,94	0,66	3,03	3,48
Bulungan	1,98	3,03	3,58	3,71	4,01	3,92
Tana Tidung	-0,77	0,09	2,92	2,52	0,34	1,78
Nunukan	10,59	8,4	8,03	7,03	4,83	3,87
Tarakan	3,62	6,17	6,96	6,68	0,31	4,03
Kalimantan Utara	5,22	4,45	5,5	5,38	4,3	3,44

Sektor pertanian termasuk kedalam sektor unggulan di Kalimantan Utara. Sektor ini memiliki share terbesar kedua terhadap PDRB Kalimantan Utara yakni sebesar 16,34 persen .

Pertumbuhan sektor pertanian selama 2016 hingga 2021 terlihat fluktuatif namun angkanya masih berada pada rentang positif. Target RPJMD Kalimantan Utara untuk Laju PDRB sektor Pertanian sebesar 16,64 persen.

Tabel 3.58 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	16,64	16,75	17,00	17,35	17,75	18,00
Realisasi	2,11					

Jika capaian realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian tahun 2021 dibandingkan dengan target Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian pada RPJMD 2021 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *weak performance*. Artinya target ini belum tercapai dengan kondisi PDRB Kalimantan Utara saat ini. Sehingga perlu disusun strategi-strategi untuk percepatan peningkatan capaian indikator tersebut. Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Meningkatkan program dan kebijakan pembangunan pertanian.

   Program asuransi pertanian dan program pengembangan pertanian modern melalui penggunaan alsitan secara masif juga akan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.
2. Meningkatkan kesejahteraan petani.

   Kesejahteraan petani ini dapat dilihat dari indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) dan menurunnya jumlah penduduk miskin di perdesaan.
3. Menekan inflasi bahan pangan.
4. Meningkatkan produksi sektor pertanian dan peternakan.

   Meningkatkan produksi di sektor pertanian juga sangat memuaskan karena mampu menyediakan ketersediaan pangan sehingga dengan sendirinya menekan inflasi secara signifikan.
5. Meningkatkan nilai ekspor pertanian.

   Peningkatan nilai ekspor pertanian akan lebih besar jika ekspor tidak lagi melewati negara transit, tapi langsung ke negara tujuan. Hal ini akan meningkatkan pemasukan yang lebih besar dan petani pun bisa langsung merasakan keuntungannya. Selain itu dilakukan peningkatan negosiasi dengan daerah tujuan ekspor sehingga proses perizinan ekspor secara langsung bisa lebih dipermudah.

◙ Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) maerupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep, NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. NTP > 100 : berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar daro pengeluarannnya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. NTP = 100 : berarti petani mengalami impas/*break even*. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

NTP < 100 : berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel 3.59 Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021

Bulan	2018	2019	2020	2021
1. Januari	99,34	96,84	104,03	103,62
2. Februari	99,2	97,82	103,81	103,92
3. Maret	99,36	100,65	103,36	104,30
4. April	100,23	101,33	102,22	104,86
5. Mei	101,48	101,19	101,4	105,61
6. Juni	100,99	100,90	101,13	105,79
7. Juli	100,95	101,33	102,04	105,62
8. Agustus	100,19	101,04	102,58	106,17
9. September	100,19	101,32	102,65	106,71
10. Oktober	100,11	101,77	102,77	107,06
11. November	99,20	102,03	103,62	107,88
12. Desember	98,77	103,50	103,43	108,67
Rata-rata Kalimantan Utara	100,00	100,81	102,75	105,85

Rata-rata NTP tahun 2021 sebesar 105,851 dengan NTP terendah pada bulan Januari sebesar 103,62 dan tertinggi pada bulan Desember sebesar 108,67. Jika capaian realisasi Nilai Tukar Petani tahun 2021 dibandingkan dengan target Nilai Tukar Petani pada RPJMD 2021 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *not an issue.* Target RPJMD untuk Nilai Tukar Petani sebesar 103,47. Target ini sudah tercapai baik secara bulanan maupun rata-rata tahunan. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

Tabel 3.60 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	103,47	103,50	103,57	103,65	103,75	104,00
Realisasi	105,85					

Nilai Tukar Nelayan (NTL) dihasilkan dari survei yang rutin dilakukan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan yang dilakukan secara *purposive*. Jumlah sampelnya adalah 80 nelayan kecil, jumlah sampel tahun sebelumnya adalah 62 nelayan. Nelayan yang menjadi sampel akan diamati pendapatan dan pengeluarannya setiap triwulan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil. Hasil dari survei ini berupa rasio antara pendapatan nelayan terhadap pengeluaran nelayan dan disajikan ke dalam bentuk laporan dengan menggunakan analisis deskriptif.

Tabel 3.61 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021

Bulan	2018	2019	2020	2021
1. Januari	96,14	99,84	105,33	101,47
2. Februari	96,6	103,42	103,16	101,58
3. Maret	96,26	106,42	104,46	100,17
4. April	99,00	106,07	102,02	102,38
5. Mei	100,00	106,11	101,00	103,99
6. Juni	100,62	105,28	102,50	104,67
7. Juli	100,41	105,39	103,88	105,32
8. Agustus	99,97	105,4	103,88	106,02
9. September	102,04	105,29	102,74	106,16
10. Oktober	104,79	105,22	101,15	105,86
11. November	102,94	104,82	102,55	106,28
12. Desember	100,85	104,69	101,48	105,93
Rata-rata Kalimantan Utara	99,97	104,83	102,85	104,15

Tabel 3.62 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	103,63*	104,41	104,71	104,93	105,11	105,26
Realisasi	104,15					

Jika capaian realisasi Nilai Tukar Nelayan tahun 2021 dibandingkan dengan target Nilai Tukar Nelayan pada RPJMD 2021 maka dapat

diklasifikasikan ke dalam kategori *good performance* yang artinya capaian Nilai Tukar Nelayan Kalimantan Utara sudah *on track*.

- Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Tabel 3.63 Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	5,15	6,94	7,28	8,55	1,86	7,59
Bulungan	4,07	7,48	8,26	8,71	1,18	6,38
Tana Tidung	6,29	6,26	3,6	7,41	3,08	7,25
Nunukan	6,22	8,74	7,61	8,43	0,65	7,05
Tarakan	5,21	8,68	9,78	8,77	0,77	8,03
Kalimantan Utara	6,75	8,43	8,31	8,95	0,45	7,11

Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan selama tahun 2016 hingga 2021 terlihat fluktuatif namun angkanya masih berada pada rentang positif. Target RPJMD Kalimantan Utara untuk Laju PDRB perdagangan sebesar 0,54 persen.

Tabel 3.64 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,54	1,00	1,80	2,00	2,40	2,80
Realisasi	7,11					

Jika capaian realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan tahun 2021 dibandingkan dengan target Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan pada RPJMD 2021 maupun 2026 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *not an issue*. Angka pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2021 yang sebesar 7,11 persen telah memenuhi target RPJMD. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

- Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Tabel 3.65 Laju pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	5,67	2,95	2,22	3,23	-0,31	2,68
Bulungan	4,72	7,71	4,56	4,89	-2,81	2,48
Tana Tidung	5,67	2,88	1,25	2,68	-2,84	2,22
Nunukan	4,3	3,54	0,44	4,54	-1,34	2,25
Tarakan	6,87	5,58	2,85	3,86	-3,75	3,08
Kalimantan Utara	6,28	5,54	1,19	4,82	-3,84	2,50

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha penyumbang PDRB Kalimantan Utara terbesar ke-5 dengan *share* sebesar 8,97 persen. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan selama 2016 hingga 2021 terlihat fluktuatif namun angkanya masih berada pada rentang positif meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 diakibatkan pandemi covid-19.

Tabel 3.66 Target RPJMD dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	7,18	7,20	6,73	6,32	7,37	6,86
Realisasi	2,50					

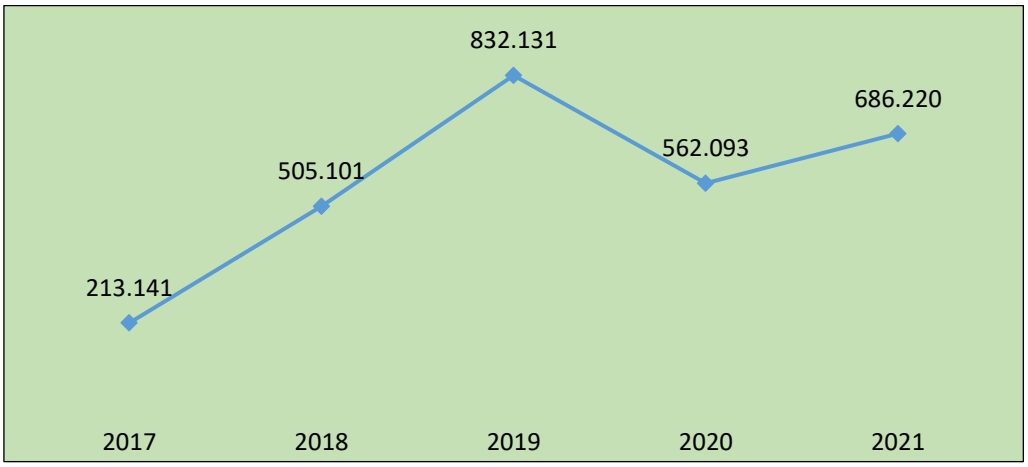
Jika capaian realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan tahun 2021 dibandingkan dengan target Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada RPJMD 2022 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *weak performance*. Artinya target ini belum tercapai dengan kondisi PDRB Kalimantan Utara posisi 2021 yang sebesar 2,5 persen. Sehingga perlu disusun strategi-strategi untuk percepatan peningkatan capaian indikator tersebut. Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Menumbuhkembangkan industri pengolahan melalui pengembangan kawasan industri atau sentra-sentra industri potensial.
   Strategi pengembangan ini dapat dilakukan dengan:
   a. Pemetaan kawasan yang akan dijadikan sentra industri
   b. Penyediaan sarana dan prasarana untuk sentra industri
   c. Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
   d. Fasilitasi kemudahan formalisasi industri
2. Menumbuhkembangkan indstri pengolahan melalui peningkatan kemampuan teknologi industri.
   Strategi peningkatan produktivitas pekerja dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembinaan kemampuan teknologi industri
   b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
3. Pengembangan pemrasaran produk
4. Peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan proses produksi
5. Meningkatkan investasi sebagai modal industri pengolahan untuk memperbesar output pendapatan dan meningkatka kapasitas produksi
6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga akan menggambarkan kemampuan setiap unit kerja untuk menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran.

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisata ke objek wisata merupakan sekelompok orang yang berkunjung di objek wisata tertentu, sesuai dengan objek wisata yang dipilih dalam perjalanan wisatanya. Selama 2017-2021, jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan, hanya saja pada tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19 yang dimulai pada awal Maret 2020. Namun pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Kalimantan Utara mulai mengalami peningkatan menjadi 686.220 orang.

Gambar 3.9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021



Tabel 3.67 Target dan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	576.884	590.954	626.411	670.260	723.880	796.268
Realisasi	686.220					

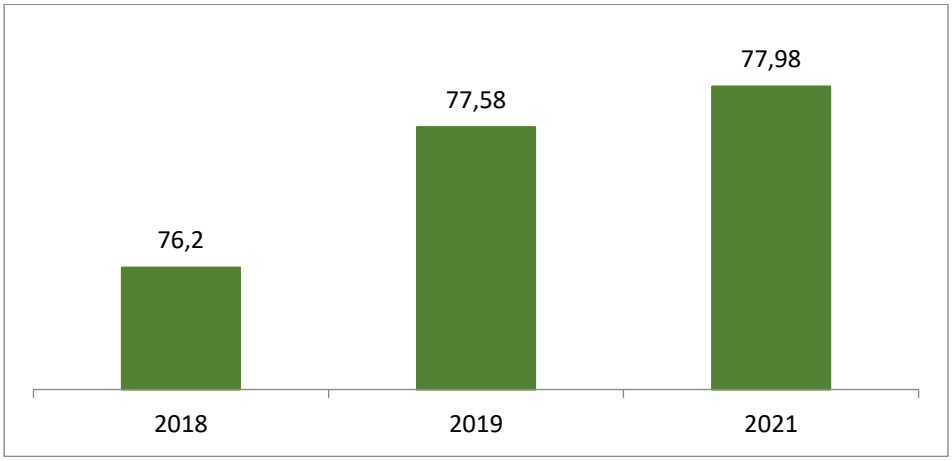
Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target jumlah kunjungan wisatawan yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 590.954 orang. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 576.884. Jika realisasi capaian 2021 tersebut dibandingkan dengan target pada 2022 dan dan target pada tahun 2026, maka capaian untuk indikator jumlah kunjungan wisatawan dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Indicator Target*. Hal ini dikarenakan realisasi sudah jauh melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022.

Skor Dimensi Toleransi

Skor dimensi toleransi merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama yang berada pada isu strategis agenda pembangunan 4. Skor dimensi toleransi ini diharapkan mampu menjelaskan kehidupan masyarakat yang harmonis, kualitas kerukunan dan kehidupan

beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Skor dimensi toleransi Provinsi Kalimantan Utara tiap tahunnya terus mengalami kenaikan, pad tahun 2018 skor dimensi toleransinya adalah 76,2 poin, kemudian pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebesar 77,58 poin dan 77,98 poin.

Gambar 3.10 Skor Dimensi Toleransi Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018, 2019, dan 2021



Tabel 3.68 Target dan Realisasi Skor Dimensi Toleransi

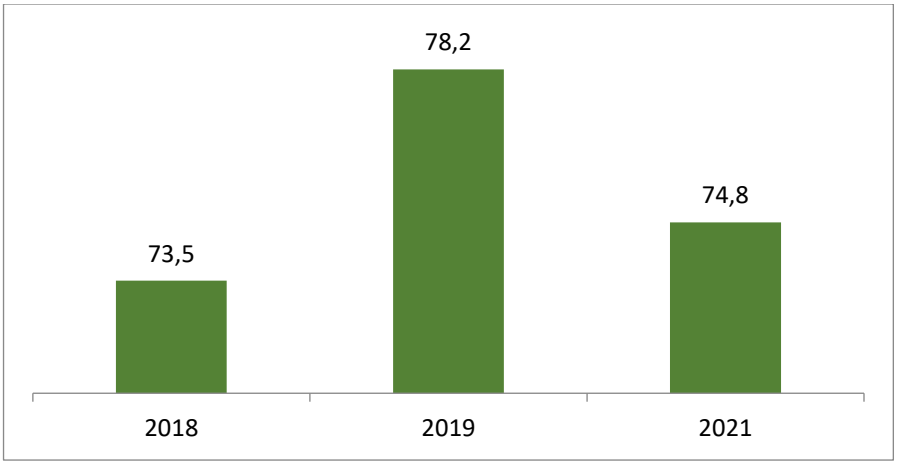
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD		78,18	79,25	80,08	81,15	82,51
Realisasi	77,98					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Skor Dimensi Toleransi yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 78,18 poin. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 77.88 poin. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Skor Dimensi Toleransi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan pada kategori *Good Performance*. Artinya kinerja pemerintah dalam menggerakkan skor dimensi toleransi di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

Skor Dimensi Kesetaraan

Skor dimensi kesetaraan merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama yang berada pada isu strategis agenda pembangunan 4. Skor dimensi kesetaraan ini diharapkan mampu menjelaskan kehidupan masyarakat yang harmonis, kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara. Dimensi kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Skor dimensi kesetaraan Provinsi Kalimantan Utara tiap tahunnya terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 skor dimensi toleransinya adalah 73,50 poin, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 78,20 poin. Namun pada tahun 2021, skor dimensi kesetaraan ini turun menjadi 74,80 poin.

Gambar 3.11 Skor Dimensi Kesetaraan Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018, 2019, dan 2021



Tabel 3.69 Target dan Realisasi Skor Dimensi Kesetaraan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	78,9	79,25	79,8	80,21	80,75
Realisasi	74,80					

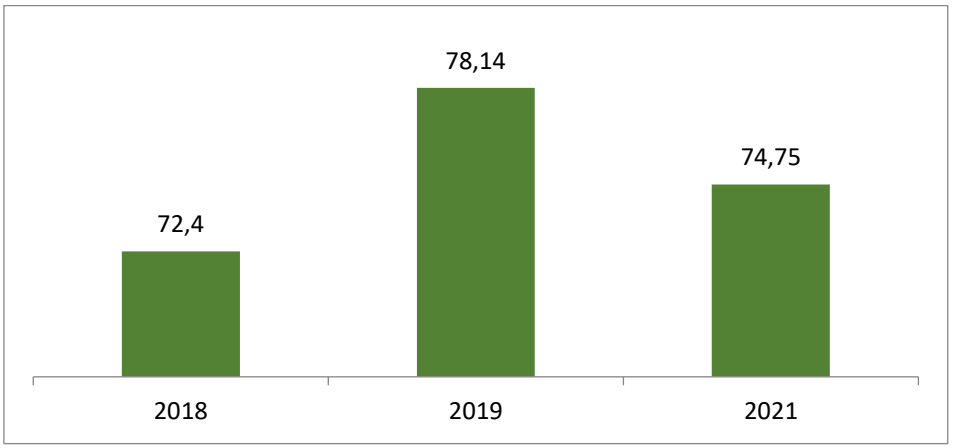
Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Skor Dimensi Kesetaraan yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 78,90 poin. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 78,55 poin. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Skor Dimensi Kesetaraan dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan Skor Dimensi Kesetaraan. Sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Meminimalisir diskriminasi di masyarakat.
2. Meningkatkan kebebasan beraktifitas keagamaan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama.
3. Meningkatkan perlindungan terhadap perbedaan penghinaan agama.
4. Meningkatkan alokasi waktu dan biaya pemerintah untuk meningkatkan Indeks Kerukunan Beragama dari sisi kesetaraan.

- Skor Dimensi Kerjasama

Skor dimensi kerja sama merupakan salah satu sasaran untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama yang berada pada isu strategis agenda pembangunan 4. Skor dimensi kerja sama ini diharapkan mampu menjelaskan kehidupan masyarakat yang harmonis, kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan latar belakang budaya dalam kerangka semangat kebhinnekaan di Provinsi Kalimantan Utara. Dimensi kerjasama ini menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Skor dimensi kerja sama Provinsi Kalimantan Utara tiap tahunnya terus mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 skor dimensi kerja samanya adalah 72,40 poin, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 78,14 poin. Namun pada tahun 2021, skor dimensi kerja sama ini turun menjadi 74,75 poin.

Gambar 3.12 Skor Dimensi Kerjasama Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018, 2019, dan 2021



Tabel 3.70 Target dan Realisasi Skor Dimensi Kerjasama

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	78,97	79,24	79,94	80,18	80,55
Realisasi	74,75					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Skor Dimensi Kerjasama yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 78,97 poin. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 78,56 poin. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Skor Dimensi Kerjasama dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan Skor Dimensi Kerjasama. Sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

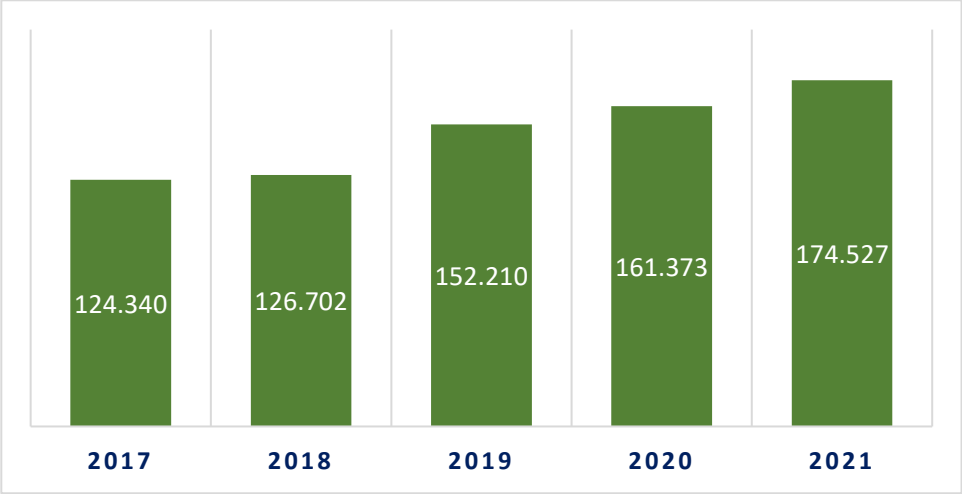
1. Meningkatkan empati dan simpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.
2. Meningkatkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain.
3. Meningkatkan interaksi antar umat beragama dengan melakukan kegiatan bersama seperti saling kunjung antara keluarga yang berbeda secara agama, kegiatan makan bersama, dan berpartisipasi dalam upacara-upacara hari kemerdekaan, serta mengizinkan anak-anak mereka untuk bermain bersama di lingkungan.

Cakupan rumah tangga teraliri listrik

Seiring bertambahnya jumlah industri di dunia, membuat kebutuhan akan energi juga terus meningkat. Para peneliti sibuk mencari sumber energi, yang bisa digunakan di masa depan tanpa khawatir jumlahnya akan habis dalam waktu singkat. Listrik merupakan barang kebutuhan utama manusia yang berbahan dasar dari barang tambang. Aktivitas manusia sangatlah bergantung pada ketersediaan listrik, khususnya di zaman serba modern ini. Biasanya pembangkit listrik menggunakan energy alternatif seperti angin, air dan cahaya matahari. Namun ada pula barang tambang yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, yaitu batu bara.

Cakupan rumah tangga yang teraliri listrik merupakan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, baik listrik yang berasal dari PLN maupun non PLN. Cakupan ini diukur dengan pendekatan Kartu Keluarga.

Gambar 3.13 Cakupan Rumah Tangga yang Teraliri Listrik



Capaian rumah tangga yang teraliri listrik terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 mencapai 174.527 KK. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 8,15 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 161.373. Sementara itu realisasi rumah tangga yang teraliri listrik dibandingkan target yang tertera dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.71 Target dan Realisasi Cakupan Rumah Tangga yang Teraliri Listrik

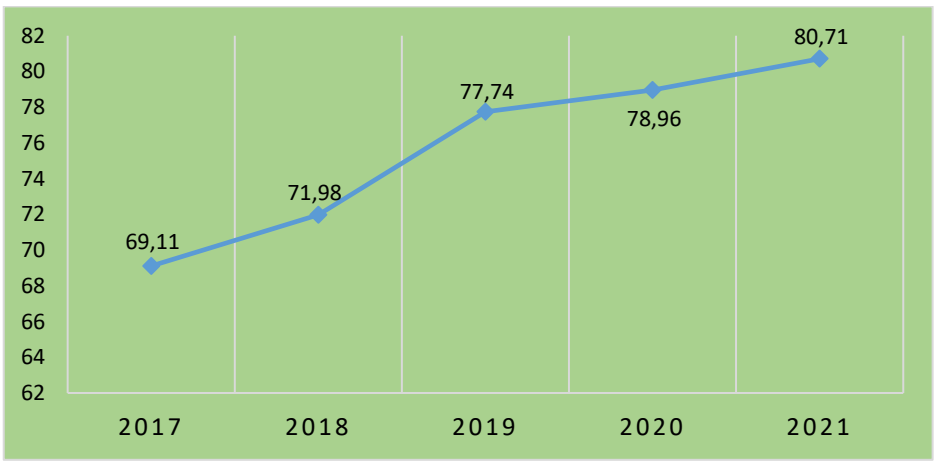
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	164.479	-	177.382	187.639	198.045	203.374	208.295
Realisasi		174.527					

Realisasi Capaian rumah tangga yang teraliri listrik tahun 2021 meningkat cukup tinggi dibandingkan posisi awal RPJMD (tahun 2020) yang sebesar 164.479 KK. Jika pertumbuhan ini berlanjut hingga tahun 2022, maka target RPJMD tahun 2022 akan terlampaui sehingga indikator ini dapat diklasifikasikan sebagai *Good Performance*.

Rasio elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun swadaya masyarakat. Angka ini bertujuan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.14 Rasio Elesktrifikasi



Selama tahun 2017-2021 rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan hingga pada angka 80,71 persen di tahun 2021. Hal ini berarti sebesar 80,71 rumah tangga telah menggunakan sumber penerangan dari listrik. Rasio elektrifikasi telah tercantum dalam target RPJMD 2021-2026 dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.72 Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	80,32	75,97	90,08	95,08	97,64	100,00
Realisasi	80,71					

Realisasi target RPJMD untuk rasio elektrifikasi pada tahun 2021 telah mencapai angka yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian rasio elektrifikasi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi Kalimantan Utara sudah *on the track*.

Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025. Pemanfaatan teknologi di bidang EBT, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), merupakan bagian dari percepatan pencapaian target tersebut. Selain itu, pemanfaatan teknologi EBT juga menjadi upaya mengurangi emisi karbon dan mendukung pengembangan wilayah. Pada tahun 2021 nilai bauran EBT dalam bauran energi Provinsi Kalimantan Utara sebesar 15,67 persen.

Tabel 3.73 Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi
Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2021

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	-	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	15,67	-

Tabel 3.74 Target RPJMD dan Realisasi Nilai Bauran EBT dalam Bauran Energi Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,00648	3,93	4,68	5,43	6,18	6,93
Realisasi	15,67	-	-	-	-	-

Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian realisasi nilai bauran EBT dalam bauran energi Kalimantan Utara tahun 2021 sebesar 15,67 persen telah memenuhi target yang ditetapkan dan telah melebihi target RPJMD tahun 2026. Dengan demikian, capaian realisasi nilai bauran EBT dalam bauran energi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori ***Not An Issue***. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

- Rasio Angka Harapan Hidup P/L

Rasio Angka Harapan Hidup P/L menunjukkan perbandingan harapan hidup perempuan dengan laki-laki yang lahir di tahun yang sama. Semakin mendekati angka 1 berarti semakin tercapai keseimbangan antara perempuan dan laki-laki untuk lamanya usia yang dijalani. Selama 2016-2021, rasio angka harapan hidup P/L selalu di atas 1, artinya perempuan mempunyai harapan hidup yang lebih lama daripada laki-laki.

Tabel 3.75 Rasio Angka Harapan Hidup P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Bulungan	...	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Tana Tidung	...	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Nunukan	...	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Tarakan	...	1,01	1,02	1,02	1,01	1,01
Kalimantan Utara	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Tabel 3.76 Target dan Realisasi Rasio Angka Harapan Hidup P/L

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	1,047*	1,040	1,030	1,.020	1,010	1,000
Realisasi	1,05					

Keterangan:*Estimasi target pada 2021

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target rasio angka harapan hidup P/L yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 1,040. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 1,047. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator rasio angka harapan hidup P/L dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan angka harapan hidup penduduk laki-laki.

- Rasio Rata-Rata Lama Sekolah P/L

Rata-rata lama sekolah P/L menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah bagi penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki. Jika nilai RLS P/L lebih dari 1, artinya rata-rata lama sekolah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Selama tahun 2016-2021, rasio RLS perempuan terhadap laki-laki masih kurang dari 1. Dengan demikian, capaian rata-rata lama sekolah perempuan masih di bawah laki-laki.

Tabel 3.77 Rasio Rata-Rata Lama Sekolah P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	0,87	0,91	0,91	0,91	0,91
Bulungan	...	0,89	0,91	0,91	0,91	0,9
Tana Tidung	...	0,87	0,86	0,88	0,88	0,88
Nunukan	...	0,92	0,92	0,93	0,91	0,92
Tarakan	...	0,91	0,95	0,94	0,94	0,94
Kalimantan Utara	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

Tabel 3.78 Target dan Realisasi Rasio Rata-rata Lama Sekolah P/L

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,925*	0,940	0,950	0,970	0,980	1,00
Realisasi	0,91					

Keterangan:*Estimasi target pada 2021

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target rasio rata-rata lama sekolah P/L yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 0,94. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 0,925. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator rasio rata-rata lama sekolah P/L dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan.

Rasio Angka Harapan Lama Sekolah P/L

Rasio angka harapan Lama Sekolah (HLS) P/L menunjukkan peluang anak perempuan usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu dibandingkan anak usia laki-laki. Jika nilai HLS P/L lebih dari 1, artinya harapan lama sekolah perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Selama tiga tahun terakhir, harapan lama sekolah perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 3.79 Rasio Angka Harapa Lama Sekolah P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2022

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04
Bulungan	...	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Tana Tidung	...	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Nunukan	...	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Tarakan	...	1,07	1,1	1,1	1,08	1,08
Kalimantan Utara	1,02	1,00	1,03	1,03	1,02	1,02

Tabel 3.80 Target dan Realisasi Rasio Harapan Lama Sekolah P/L

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	1,020*	1,015	1,010	1,006	1,003	1,000
Realisasi	1,025					

Keterangan:*Estimasi target pada 2021

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target rasio rata-rata lama sekolah P/L yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 1,015. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 1,020. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator rasio rata-rata lama sekolah P/L dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki.

◙ Rasio Pengeluaran Perkapita P/L

Rasio pengeluaran perkapita P/L merupakan perbandingkan antara pengeluaran pertahun yang digunakan perempuan dengan laki-laki. Pengeluaran perkapita menjadi indikator dalam mengukur dimensi standar hidup layak atau dimensi perekonomian pada Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu kesetaraan dalam pengeluaran perkapita yang ditunjukkan dengan angka rasio P/L = 1, juga menunjukkan bahwa tercapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi perekonomian. Selama 2016-2021, rasio pengeluaran per kapita P/L selalu di atas 1, artinya pengeluaran per kapita perempuan lebih kecil dibandingkan pengeluaran per kapita laki-laki.

Tabel 3.81 Rasio Pengeluaran Perkapita P/L Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	...	0,35	0,35	0,34	0,35	0,36
Bulungan	...	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45
Tana Tidung	...	0,34	0,34	0,33	0,33	0,34
Nunukan	...	0,41	0,41	0,41	0,42	0,43
Tarakan	...	0,62	0,62	0,61	0,62	0,63
Kalimantan Utara	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,46

Tabel 3.82 Target dan Realisasi Pengeluaran per Kapita P/L

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,475*	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80
Realisasi	0,46					

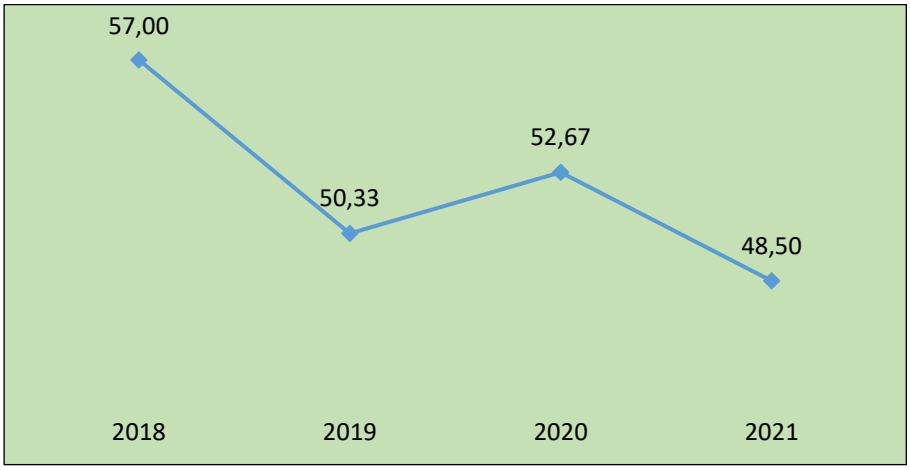
Keterangan:*Estimasi target pada 2021

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target rasio pengeluaran per kapita P/L yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 0,5. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 0,475. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator rasio pengeluaran per kapita P/L dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan pengeluaran per kapita penduduk perempuan.

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indikator yang digunakan untuk meningkatkan sasaran pembangunan daerah yang berada pada sasaran 2 yaitu meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan. Indeks ini merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Perkembangan indeks pembangunan pemuda mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tahun 2018, indeks pembangunan manusia adalah sebesar 57,00 poin, dan pada tahun 2021 turun menjadi sebesar 48,50 poin.

Gambar 3.15 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021



Tabel 3.83 Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Pemuda

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	57,20	57,40	57,60	58,00	58,50
Realisasi	48,50					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Indeks Pembangunan Pemuda yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 57,20. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 57,19. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Indeks Pembangunan Pemuda dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan indeks pembangunan pemuda Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Meningkatkan sinergitas (koordinasi dan komunikasi) antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, dunia pendidikan, media, dan masyarakat (termasuk pemuda dan organisasi kepemudaan.

2. Membuat program Sentra Pemberdaayaan Pemuda Desa/Kelurahan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan serta mengimplementasikannya melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah dan Kelompok Kerja.

Pertumbuhan Koperasi Sehat

Tabel 3.84 Pertumbuhan Koperasi Sehat Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	5,76

Ada beberapa kriteria agar koperasi dinyatakan aktif dan sehat. Koperasi dinyatakan aktif jika memiliki kantor koperasi dan memiliki aktivitas yang rutin dilakukan. Selain itu, anggota kepengurusan koperasi juga harus lengkap sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, koperasi yang sehat ditandai dengan adanya Rapat Anggota Tahunan yang masih berjalan. Koperasi itu harus beroperasi setidaknya satu tahun buku. Aspek permodalan koperasi juga harus menunjukkan aktiva produktif.

Tabel 3.85 Target RPJMD dan Realisasi Pertumbuhan Koperasi Sehat Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-0,44	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	5,76	-	-	-	-	-

Pada tahun 2021, pertumbuhan koperasi sehat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 5,76 persen. Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD

Kalimantan Utara 2021-2026, capaian realisasi pertumbuhan koperasi sehat Kalimantan Utara tahun 2021 sebesar 5,76 persen telah memenuhi target yang ditetapkan dan telah melebihi target RPJMD tahun 2026. Dengan demikian, capaian realisasi pertumbuhan koperasi sehat Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori ***Not An Issue***. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

- Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM

Tabel 3.86 Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2021

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	12,61

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan ata kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya seteah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Program Kredit Perbankan kepada UMKM dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.

Tabel 3.87 Target RPJMD dan Realisasi Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	5,69	6,19	6,69	7,19	7,6
Realisasi	12,61	-	-	-	-	-

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 5,69 persen. Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian realisasi persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM Kalimantan Utara tahun 2021 sebesar 12,61 persen telah melampaui target RPJMD pada tahun 2022. Dengan demikian, capaian realisasi persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam mencapai persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM yang diharapkan di Kalimantan Utara sudah on the track.

Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen penting dari permintaan aggregat yang merupakan faktor krusial bagi suatu proses pembangunan (sustainable development). Investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Menurut UU ini, yang dimaksud dengan penanaman modal atau investasi ialah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal. Adapun penanam modal atau investor yang dimaksud di sini bisa berupa investor dalam atau luar negeri.

Tabel 3.88 Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi Menurut Kabupaten Kota,Tahun 2017-2021

Kabupaten/kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Malinau	-	-	-	-	-	-
Bulungan	-	-	-	-	-	-
Tana Tidung	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-
Tarakan	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	47,5	-

Investasi atau Penanaman Modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta diharapkan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.89 Target RPJMD dan Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	90	95	85	90	90
Realisasi	47,5	-	-	-	-	-

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target rata-rata pertumbuhan nilai investasi yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 yaitu sebesar 90 persen. Pada 2021, rata-rata pertumbuhan nilai investasi di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,5 persen. Jika dibandingkan dengan target pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, capaian rata-rata pertumbuhan nilai investasi Kalimantan Utara tahun 2021 belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Dengan demikian, capaian rata-rata pertumbuhan nilai investasi Kalimantan Utara dapat diklasifikasikan dalam kategori *weak performance*. Sehingga perlu disusun strategi-strategi untuk percepatan peningkatan capaian indikator tersebut.

- Indeks Gini

Tabel 3.90 Indeks Gini Menurut Kabupaten Kota, Tahun 2016-2021

Kabupaten/kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Malinau	-	-	0,295	0,303	0,295	0,304
Bulungan	-	-	0,302	0,309	0,29	0,338
Tana Tidung	-	-	0,277	0,316	0,259	0,312
Nunukan	-	-	0,294	0,282	0,262	0,261
Tarakan	-	-	0,297	0,271	0,295	0,261
Kalimantan Utara	0,308	0,308	0,303	0,295	0,292	0,292

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 3.91 Target RPJMD dan Realisasi Indeks Gini
Provinsi Kalimantan Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Realisasi	0,27	0,27				

Indeks Gini Kalimantan Utara selalu menurun setiap tahunnya yang berarti distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata. Jika capaian realisasi Indeks Gini tahun 2022 dibandingkan dengan target Indeks Gini pada RPJMD 2026 maka dapat diklasifikasikan ke dalam kategori *not an issue*. Capaian indeks gini Kalimantan Utara pada tahun 2022 yang sudah berada pada angka 0,27 dan sudah melebihi target RPJMD 2026 sebesar 0,28. Hal ini menandakan indikator tersebut tidak memiliki permasalahan lagi karena target untuk tahun 2026 telah tercapai.

- Jumlah Desa Mandiri

Jumlah desa mandiri merupakan salah satu indikator untuk mendukung misi 13 yaitu mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas melalui peningkatan kemandirian desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, peayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pada tahun 2021, jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Utara ada sebanyak 31 desa mandiri.

Tabel 3.92 Target dan Realisasi Jumlah Desa Mandiri

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	34	37	40	43	46
Realisasi	31					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Jumlah Desa Mandiri yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 34 desa. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 27 desa. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Jumlah Desa Mandiri dapat diklasifikasikan pada kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam menggerakkan jumlah desa mandiri di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

- Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal merupakan salah satu indikator untuk mendukung misi 13 yaitu mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota serta memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap tahun. Desa tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50. Pada tahun 2021, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Utara ada sebanyak 200 desa.

Tabel 3.93 Target dan Realisasi Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	182	162	140	116	90
Realisasi	200					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2022 sebesar 182 desa. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 208 desa. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dapat diklasifikasikan pada kategori *Good Performance*, artinya kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalimantan Utara sudah *on the track*.

- Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintah yang Dikembangkan

Jumlah wilayah administrasi pemerintah yang dikembangkan merupakan salah satu indikator untuk mendukung misi 14 yaitu mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, dan Kabupaten Apo Kayan. Meningkatnya pengembangan wilayah administrasi kecamatan untuk pemenuhan syarat pembentukan DOB yang diusulkan. Pada tahun 2021, jumlah wilayah administrasi pemerintah yang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Utara belum ada.

Tabel 3.94 Target dan Realisasi Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Dikembangkan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target RPJMD	-	-	4	1	-	-
Realisasi	0					

Pada RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026, tidak tertera target jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan yang harus dicapai pada 2021, namun terdapat target untuk tahun 2023 sebesar 4 wilayah administrasi. Oleh karena itu, dilakukan estimasi target yang setidaknya harus dicapai pada 2021, yaitu sebesar 4 wilayah adinistrasi. Jika target tersebut dibandingkan dengan realisasi capaian pada 2021, maka capaian untuk indikator jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan dapat diklasifikasikan pada kategori *Weak Performance*. Oleh karena itu, perlu disusun strategi-strategi khusus untuk peningkatan jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan. Sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut adalah:

1. Mulai menggariskan sarana-sarana, strategi dan kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan (Action Plan) untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan.
2. Mengaitkan tiga rencana sekaligus yaitu rencana strategis, rencana jangka menengah, dan anggaran jangka pendek.

Tabel 3.95 Ringkasan Identifikasi dan Analisis Indikator Sasaran

Indikator	Klasifikasi
Indeks Demokrasi Indonesia	*Weak Performance*
Angka Harapan Hidup	*Good Performance*
Angka Harapan Lama Sekolah	*Weak Performance*
Angka Rata-rata Lama Sekolah	*Good Performance*
Angka Kemiskinan	*Good Performance*
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	*Weak Performance*
NTP	*Not an Issue*
NTN	*Good Performance*
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	*Weak Performance*
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	*Not an Issue*
Jumlah Kunjungan Wisatawan	*Weak Indicator Target*
Skor Dimensi Toleransi	*Good Performance*
Skor Dimensi Kesetaraan	*Weak Performance*
Skor Dimensi Kerjasama	*Weak Performance*
Indeks Pembangunan Pemuda	*Weak Performance*
Indeks Gini	*Not an Issue*
Jumlah Desa Mandiri	*Good Performance*
Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	*Good Performance*
Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan yang Dikembangkan	*Weak Performance*

BAB 4
ANALISIS PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA-PENDEKATAN MULTISEKTORAL

BAB 4
ANALISIS PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA - PENDEKATAN MULTISEKTORAL

4.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Tabel I-O Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021
2. Data PDRB Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021
3. Data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021
4. Data tenaga kerja Sakernas 2016-2021

4.2. Matriks Pengganda

Dalam model ekonomi makro dikenal suatu terminologi yang disebut sebagai pengganda (multiplier) yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap variabel endogen akibat perubahan pada variabel eksogen. Tahapan dalam menghitung matriks pengganda adalah sebagai berikut:

1. Menghitung koefisien input

$$a_{ij} = x_{ij}/X_j$$

dimana:

a_{ij} = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j
x_{ij} = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke j
X_j = output sektor ke j

Dalam suatu Tabel I-O, matriks koefisien input yang merupakan kumpulan berbagai koefisien input disebut sebagai matriks A^d.

2. Menghitung matriks $(I - A^d)$
3. Menghitung matriks pengganda $Z = (I - A^d)^{-1}$, matriks pengganda ini dikenal dengan matriks kebalikan Leontief.

4.3. Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi

1. Keterkaitan Langsung ke Belakang *(Direct Backward Linkage)*

Direct backward linkage (DBL) menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian input antara bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$DBL_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$$

2. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Belakang *(Direct and Indirect Backward Linkage)*

Direct and indirect backward linkage (DIBL) menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input antara bagi sektor tersebut baik secara langsung maupun tak langsung per unit kenaikan permintaan total. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$DIBL_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$$

3. Keterkaitan Langsung ke Depan (Direct Forward Linkage)

Direct forward linkage (DFL) menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan total. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$DFL_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$$

4. Keterkaitan Langsung dan Tidak Langsung ke Depan (Direct and Indirect Forward Linkage)

Direct and indirect forward linkage (DIFL) menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan output bagi sektor tersebut baik secara langsung maupun tak langsung per unit kenaikan permintaan total. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$DIFL_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}$$

5. Daya Penyebaran

Koefisien Indeks Daya Penyebaran menunjukkan koefisien keterkaitan yang memberikan gambaran tentang dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Koefisien Indeks Daya Penyebaran merupakan keterkaitan langsung dan tak langsung ke belakang *(direct and indirect backward linkage)* yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$\beta_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} \alpha_{ij}}$$

6. Derajat Kepekaan

Koefisien Indeks Derajat Kepekaan menunjukkan koefisien keterkaitan yang memberikan gambaran tentang dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Koefisien Indeks Derajat Kepekaan merupakan keterkaitan langsung dan tak langsung ke depan *(direct and indirect forward linkage)* yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$\gamma_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} \alpha_{ij}}$$

Keterangan:

DBL_j = keterkaitan langsung ke belakang sektor ke j
$DIBL_j$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor ke j
a = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke j
α_{ij} = sel matriks kebalikan Leontief (I - Ad)-1 pada baris ke i kolom ke j menunjukkan dampak yang terjadi terhadap output sektor ke i akibat perubahan permintaan akhir sektor ke j
DFL_i = keterkaitan langsung ke depan sektor ke i
$DIFL_i$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor ke i
β_j = Indeks Daya Penyebaran sektor ke j
γ_i = Indeks Derajat Kepekaan sektor ke i

4.4. Gambaran Perekonomian dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (2012) adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (10, 20, atau 50 tahun, atau bahkan lebih). Boediono juga menekankan tiga aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses disini melihat bagaimana perekonomian suatu wilayah dapat berkembang dari waktu ke waktu. Output per kapita dilihat dari dua sisi, yaitu output totalnya (PDB) dan jumlah penduduknya.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam konsep nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah sama dengan pertumbuhan PDRB. Dengan demikian, PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakan sektor-sektor ekonomi.

Struktur perekonomian menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu wilayah yang menggambarkan seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu wilayah sekaligus sebagai indikator penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Perubahan struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Utara akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d. 2021, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing sektor ekonomi. Sementara itu, faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan sebagai akibat peningkatan perdagangan antar provinsi maupun internasional.

Tabel 4.1
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, 2016-2021 (Persen)

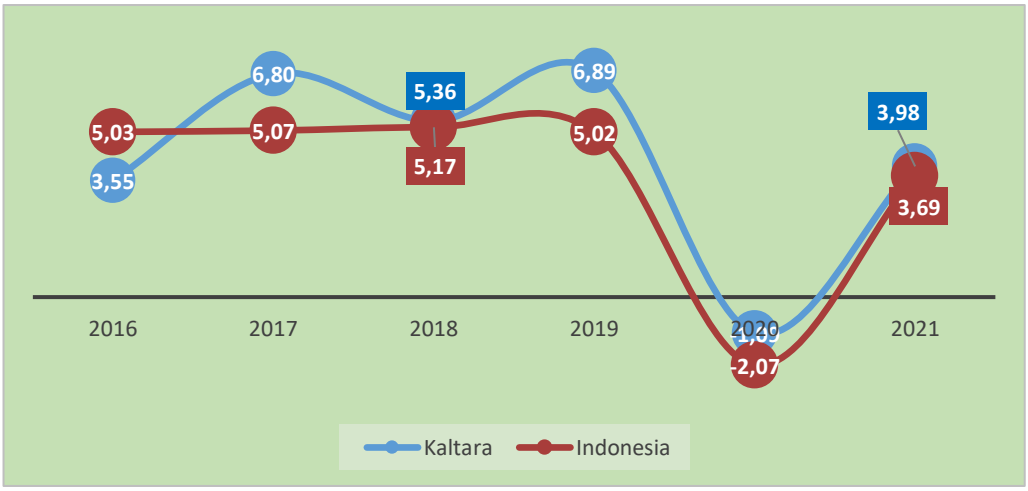
Kate-gori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,5	16,31	16,08	15,87	16,48	16,34
B	Pertambangan dan Penggalian	24,8	27,37	27,42	26,93	25,44	26,72
C	Industri Pengolahan	10,2	9,98	9,44	9,20	9,15	8,97
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	12,8	12,45	12,91	13,74	14,27	13,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,6	11,35	11,68	12,01	12,19	12,49
H	Transportasi dan Pergudangan	6,9	6,99	7,11	7,05	6,76	6,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,6	1,57	1,64	1,62	1,53	1,51
J	Informasi dan Komunikasi	2,3	2,29	2,32	2,32	2,55	2,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,2	1,15	1,14	1,10	1,11	1,13
L	Real Estate	0,8	0,79	0,78	0,77	0,76	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,3	0,25	0,23	0,22	0,23	0,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,6	5,22	5,05	4,96	4,95	4,69
P	Jasa Pendidikan	2,6	2,48	2,43	2,44	2,58	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,03	1,00	1,01	1,13	1,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,7	0,66	0,65	0,65	0,73	0,73
PDRB		100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat dilihat lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar dalam penciptaan nilai tambah (PDRB) di Provinsi Kalimantan Utara adalah lapangan usaha pertambangan; lapangan usaha pertanian; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha perdagangan; dan lapangan usaha industri pengolahan. Kelima lapngan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 76,90 persen dari total PDRB yang tercipta di tahun 2016 dan terus meningkat hingga

sebesar 78,20 persen dari total PDRB yang tercipta di tahun 2021. Kontribusi dari kelima lapangan usaha yang cukup dominan ini mengindikasikan bahwa trend pergerakan kelima lapangan usaha tersebut turut menentukan perkembangan produksi domestik, sehingga dapat menjadi indikator bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara.

Sementara itu, sisi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat dilihat dari gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional,
2016-2021 (%)



Dalam enam tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara cukup fluktuatif, namun angkanya masih positif. Pada tahun 2020, sama seperti wilayah lain di seluruh Indonesia bahkan dunia, bencana pandemi covid-19 sempat menyebabkan pukulan yang cukup serius bagi perekonomian wilayah termasuk Kalimantan Utara. Sehingga pada tahun tersebut, Kalimantan Utara bahkan Indonesia mengalami kontraksi. Lapangan usaha pertambangan sebagai kategori yang memiliki *share* tertinggi di Kalimantan Utara (25,44 persen di tahun 2020) mengalami kontraksi yang cukup dalam sehingga berdampak pada laju perekonomian secara total di Kalimantan Utara. Meskipun demikian, jika dilihat secara umum, pencapaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan utara cukup baik dibandingkan nasional karena angka pertumbuhan Kalimantan Utara dari tahun 2017-2021 diatas angka nasional. Hal ini berarti Provinsi Kalimantan Utara termasuk kedalam provinsi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi positif bagi Indonesia.

Tabel 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha , 2016-2021 (Persen)

Kate-gori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.22	4.45	5.50	5.38	4.30	3.44
B	Pertambangan dan Penggalian	-3.52	7.13	3.52	5.10	-6.77	6.68
C	Industri Pengolahan	6.28	5.54	1.19	4.82	-3.84	2.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.06	8.79	11.14	5.47	11.57	5.55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.20	7.26	6.71	2.84	5.74	1.99
F	Konstruksi	8.43	6.13	7.14	12.03	0.24	-0.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.75	8.43	8.31	8.95	0.45	7.11
H	Transportasi dan Pergudangan	5.80	10.83	8.15	6.98	-3.60	0.14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.10	12.99	11.38	7.91	-4.33	2.75
J	Informasi dan Komunikasi	7.94	9.58	8.52	8.20	6.60	7.87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.44	4.03	8.09	5.36	0.51	7.17
L	Real Estate	1.44	4.76	5.71	5.44	0.76	2.14
M,N	Jasa Perusahaan	-4.38	3.52	3.26	2.30	-0.78	2.15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.81	6.79	5.53	6.68	1.07	0.25
P	Jasa Pendidikan	6.47	7.53	4.99	9.67	6.20	4.61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.75	6.30	4.69	9.05	10.05	8.55
R,S,T,U	Jasa lainnya	11.40	7.53	5.99	8.49	9.97	6.68
PDRB		3,55	6,80	5,36	6,89	-1,09	3,98

Dirinci menurut sektor ekonomi, pada tahun 2021 hampir semua sektor yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebagai awal pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan PDRB tertinggi ditunjukkan oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan laju pertumbuhan sebesar 8,55 persen. Kinerja lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang meningkat cukup signifikan didorong adanya pandemi covid-19. Selama 2021, kebijakan covid-19 yang mengharuskan tes covid seperti rapid, swab jika melakukan perjalanan mendorong tumbuhnya lapangan usaha ini secara impresif. Selain itu, adanya dorongan vaksinasi di triwulan III dan IV tahun 2021 turut meningkatkan pertumbuhan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Namun,meskipun tumbuh impresif, lapangan usaha ini hanya memberikan kontribusi sebesar 1,14 terhadap perekonomian di Kalimantan Utara. Sementara itu, Lapangan usaha konstruksi mengalami kontraksi sebesar 0,6 disebabkan turunnya volume pengadaaan semen untuk Kaltara.

4.5. Gambaran Perekonomian dalam Tabel Input-Output (I-O)

4.5.1. Struktur Permintaan dan Penawaran

Kegiatan perekonomian di suatu wilayah akan terjadi bila ada interaksi antara pihak-pihak yang menawarkan dan yang membutuhkan suatu barang atau jasa. Angka laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu wilayah pada periode tertentu ditentukan oleh seberapa besar kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa dalam roda perekonomian wilayah. Tabel I-O mengakomodasi kedua sisi ekonomi tersebut yang disajikan dalam kolom 700 (total penyediaan) dan kolom 310 (total permintaan).

Tabel 4.3.
Ringkasan Permintaan dan Penawaran (miliar rupiah), 2021

Kate-gori	Lapangan Usaha	Penyediaan/Penawaran			Penggunaan/Permintaan			
		Output Domestik	Impor	Total Penyediaan	Permintaan Antara	Permintaan Akhir Domestik	Ekspor	Total Permin-taan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14334.9	902.1	15237.0	6244.2	2316.8	6676.1	15237.0
B	Pertambangan dan Penggalian	17640.0	2284.8	19924.8	1297.2	440.5	18187.1	19924.8
C	Industri Pengolahan	16100.4	2919.7	19020.1	3568.3	4650.0	10801.8	19020.1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1447.3	265.8	1713.1	1401.7	310.7	0.7	1713.1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.4	25.6	61.9	10.3	50.0	1.7	61.9
F	Konstruksi	9018.3	3003.5	12021.8	1172.6	10836.4	12.8	12021.8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7868.2	1188.7	9056.9	2622.3	3391.5	3043.1	9056.9
H	Transportasi dan Pergudangan	6622.0	3019.0	9641.0	3273.2	2317.1	4050.8	9641.0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1719.9	606.3	2326.1	566.8	1312.1	447.3	2326.1
J	Informasi dan Komunikasi	1909.1	595.9	2505.0	331.1	343.9	1830.0	2505.0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1296.1	105.8	1401.9	742.8	256.5	402.6	1401.9
L	Real Estate	1254.9	63.5	1318.4	103.0	1212.7	2.7	1318.4
M,N	Jasa Perusahaan	985.4	276.8	1262.2	1091.4	34.6	136.3	1262.2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4152.6	972.5	5125.1	259.5	4862.2	3.3	5125.1
P	Jasa Pendidikan	1120.6	201.8	1322.5	61.9	1256.2	4.3	1322.5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	618.7	173.1	791.8	10.9	768.1	12.8	791.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	1241.0	143.2	1384.2	481.8	672.1	230.3	1384.2

4.5.2. Stuktur Output dan Nilai Tambah Bruto

Output adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Cakupan output terdiri dari: (a) produksi barang jadi yang diselesaikan pada suatu periode tertentu; (b) produksi barang setengah jadi pada akhir suatu periode waktu tertentu; dan (c) perubahan inventori. Oleh karena itu, dengan menelaah besarnya output yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi, berarti dapat diketahui pula sektor-sektor yang mampu memberikan kontribusi besar dalam pembentukan output secara keseluruhan di suatu wilayah.

Sementara itu, nilai tambah bruto atau input primer adalah balas jasa atas pemakaian faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan. Dalam Tabel I-O, nilai tambah bruto terdiri dari: (a) kompensasi tenaga kerja, (b) surplus usaha bruto, dan (c) pajak lainnya atas produksi neto. Besarnya nilai tambah bruto setiap sektor ekonomi dipengaruhi oleh besarnya output (nilai produksi) yang dihasilkan serta jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi (konsumsi antara/input antara). Oleh sebab itu, suatu sektor ekonomi yang memiliki output yang besar belum tentu memiliki nilai tambah bruto yang besar, tetapi tergantung dari biaya konsumsi antara yang dikeluarkannya.

Tabel 4.4
Ringkasan Output dan Nilai Tambah Bruto, 2021

Kode	Sektor	Output Domestik			Nilai Tambah Bruto		
		Nilai (miliar rupiah)	Kontribusi (%)	Ranking	Nilai (miliar rupiah)	Kontribusi (%)	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.524,84	14,91	3	11.947,11	18,63	2
B	Pertambangan dan Penggalian	19.793,15	19,01	1	14.006,95	21,84	1
C	Industri Pengolahan	19.034,02	18,28	2	10.213,67	15,93	3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.710,25	1,64	10	159,04	0,25	16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	172,01	0,17	17	27,55	0,04	17
F	Konstruksi	12.156,09	11,68	4	6.673,79	10,41	4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.188,29	8,83	6	6.300,79	9,83	5
H	Transportasi dan Pergudangan	9.540,54	9,16	5	4.124,54	6,43	6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.224,99	2,14	9	1.069,09	1,67	10
J	Informasi dan Komunikasi	2.505,02	2,41	8	1.511,41	2,36	8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.399,20	1,34	11	1.094,07	1,71	9
L	Real Estate	1,320,01	1,27	13	1.047,04	1,63	11
M,N	Jasa Perusahaan	1.364,49	1,31	12	765,05	1,19	14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.125,05	4,92	7	2.988,28	4,66	7
P	Jasa Pendidikan	1.319,05	1,27	14	878,47	1,37	13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	775,01	0,74	16	421,23	0,66	15
R,S,T,U	Jasa lainnya	961,87	0,92	15	898,60	1,40	12

Tabel 4.5
Nilai Tambah Bruto Menurut Komponennya, 2016 (miliar rupiah)

Kode	Lapangan Usaha	Kompensasi Tenaga Kerja	Surplus Usaha Bruto	Pajak Atas Produksi Lainnya	NTB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.565,4	7.091,1	290,6	11.947,1
B	Pertambangan dan Penggalian	5.028,1	7.611,5	1.367,4	14.007,0
C	Industri Pengolahan	3.847,6	6.016,8	349,3	10.213,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	60,0	91,0	1,2	152,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,3	11,9	0,1	25,3
F	Konstruksi	2.566,3	3.879,8	236,8	6.682,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.435,8	3.658,3	206,8	6.300,8
H	Transportasi dan Pergudangan	1.137,7	2.579,6	407,3	4.124,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	455,1	607,9	6,0	1.069,1
J	Informasi dan Komunikasi	523,8	804,2	183,4	1.511,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	640,5	351,7	101,9	1.094,1
L	Real Estate	93,9	935,8	17,3	1.047,0
M,N	Jasa Perusahaan	189,4	514,6	61,1	765,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.301,4	686,9	-	2.988,3
P	Jasa Pendidikan	769,5	107,6	1,4	878,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	306,4	108,0	6,9	421,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	422,3	475,4	0,9	898,6
PDRB		25,356.4	25.356,4	35.532,0	3,238,3

Pada tahun 2016, lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan kompensasi tenaga kerja, yakni sebesar 5.028,1 miliar rupiah. Selanjutnya, dari sisi penciptaan surplus usaha bruto lapangan usaha pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar, yakni sekitar 7.611,5 miliar rupiah. Besarnya kontribusi lapangan usaha pada penciptaan kompensai tenaga kerja maupun penciptaan surplus usaha bruto menunjukkan lapangan usaha ini merupakan lapangan usaha unggulan di Kalimantan Utara, namun hasil dari lapangan usaha ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Utara melainkan justru banyak dinikmati pengusaha diluar Kalimantan Utara.

4.5.3. Struktur Permintaan Akhir

Permintaan akhir terdiri dari permintaan akhir domestik dan ekspor barang dan jasa. Permintaan akhir domestik terdiri dari dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT), pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan perubahan inventori. Jumlah komponen permintaan akhir tersebut dikurangi dengan impor barang dan jasa akan sama dengan jumlah permintaan akhir barang dan jasa yang berasal dari faktor produksi domestik atau PDRB menurut pengeluaran.

Tabel 4.6
Komposisi Permintaan Akhir Tabel I-O Provinsi Kalimantan Utara

Komponen permintaan Akhir	Nilai	Distribusi Terhadap Permintaan Akhir	Distribusi Terhadap PDRB
(1)	(2)	(3)	(4)
Konsumsi Rumah Tangga	18.341.86	17.93	28.60
Konsumsi LNPRT	548.30	0.54	0.86
Total Konsumsi Pemerintah	6.489.23	6.34	10.12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28.473.40	27.83	44.40
Perubahan Inventori	186.79	0.18	0.29
Total Ekspor	48.272.93	47.18	75.28
Impor	38.185.83	37.32	59.55
Total Konsumsi Akhir	102.312.50	-	-
PDRB	64.126.67	-	-

Tabel 4.7
Permintaan Akhir Menurut Sektor Ekonomi, 2021

Kode	Lapangan Usaha	Ruta	LNPRT	Pemerintah	PMTB	Perubahan Inventori	Ekspor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.151,0	0,0	0,0	1.099,1	66,6	6.676,1
B	Pertambangan dan Penggalian	0,4	0,0	0,0	435,7	4,4	18.187,1
C	Industri Pengolahan	2.518,5	0,0	20,6	2.162,7	-51,7	10.801,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	310,6	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,7	0,0	3,3	0,0	0,0	1,7
F	Konstruksi	5,6	0,0	0,0	10.830,8	0,0	12,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	946,7	0,0	2,2	2.440,9	1,7	3.043,1
H	Transportasi dan Pergudangan	1.741,6	0,0	0,6	574,0	0,8	4.050,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.283,2	0,0	0,0	28,9	0,0	447,3
J	Informasi dan Komunikasi	305,4	0,0	4,2	34,3	0,0	1.830,0
K	Jasa Keuangan dan Asurans	238,1	0,0	17,1	1,3	0,0	402,6
L	Real Estate	1.212,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
M,N	Jasa Perusahaan	11,3	0,0	0,0	23,3	0,0	136,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,7	0,0	4.857,3	1,3	0,0	3,3
P	Jasa Pendidikan	441,4	39,4	774,7	0,8	0,0	4,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiata Sosial	162,2	143,8	460,6	1,6	0,0	12,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	282,6	344,4	23,5	21,6	0,1	230,3

4.5.4. Struktur Ketenagakerjaan

Analisis struktur ketenagakerjaan bertujuan untuk mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja sektoral. Tingkat produktivitas dalam analisis ini dilihat berdasarkan rasio perbandingan antara nilai tambah bruto sektoral dengan jumlah tenaga kerja masing-masing sektor. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh

mana efektifitas penggunaan input tenaga kerja dalam menciptakan nilai tambah bruto untuk sektor ekonomi.

Tabel 4.8
Nilai Tambah Bruto, Kompensasi Tenaga Kerja, Jumlah Tenaga Kerja, dan Produktivitas menurut Sektor Ekonomi, 2021

Kode	Lapangan Usaha	NTB (Juta Rupiah)	Kompensasi Tenaga Kerja (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Produktivitas (juta rupiah/ tenaga kerja)	Kompensasi Tenaga Kerja per Tenaga Kerja (juta rupiah/ tenaga kerja)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.947.110	4.565.417	85.929	139,03	53,13
B	Pertambangan dan Penggalian	14.006.952	5.028.081	7.954	1760,99	632,14
C	Industri Pengolahan	10.213.669	3.847.588	25.984	393,08	148,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	152.165	59.976	2.203	69,08	27,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.285	13.299	488	51,77	27,23
F	Konstruksi	6.682.930	2.566.276	12.581	531,17	203,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.300.786	2.435.757	44.265	142,34	55,03
H	Transportasi dan Pergudangan	4.124.545	1.137.669	13.134	314,03	86,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.069.088	455.148	8.271	129,25	55,03
J	Informasi dan Komunikasi	1.511.406	523.825	6.048	249,92	86,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.094.071	640.462	3.886	281,54	164,81
L	Real Estate	1.047.041	93.939	461	2273,47	203,97
M,N	Jasa Perusahaan	765.045	189.416	2.954	258,95	64,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.988.278	2.301.414	35.897	83,25	64,11
P	Jasa Pendidikan	878.470	769.501	12.002	73,19	64,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421.231	306.366	4.779	88,15	64,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	898.599	422.294	6.587	136,42	64,11

4.6. Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi

Analisis keterkaitan antar sektor digunakan untuk melihat dampak dari output karena pada dasarnya sektor-sektor dalam suatu perekonomian saling memengaruhi. Keterkaitan antar sektor yang dianalisis dalam studi ini, yaitu: (1) keterkaitan langsung ke belakang (direct backward linkage), yang menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan akhir; (2) keterkaitan langsung ke depan (direct forward linkage), yang menunjukkan akibat suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan sebagian output tersebut secara langsung per unit kenaikan permintaan akhir; (3) keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang (direct and indirect backward linkage), yang menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor tersebut secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan akhir; dan (4) keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan (direct and indirect forward linkage), yang menunjukkan akibat dari suatu sektor tertentu terhadap sektor-sektor yang menggunakan output sektor tersebut secara langsung maupun tidak langsung per unit kenaikan permintaan akhir.

Direct Backward Linkage (DBL) dan *Direct Forward Linkage* (DFL) dianalisis dengan menggunakan matriks koefisien teknis. Sementara itu, *Direct and Indirect Backward Linkage* (DIBL) maupun *Direct and Indirect Forward Linkage* (DIFL) dianalisis dengan menggunakan matriks kebalikan Leontief.

4.6.1. Backward Linkage dan Forward Linkage

Sektor ekonomi yang memiliki nilai *Direct And Indirect Backward Linkage* (DIBL) besar mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut sangat tergantung dengan sektor-sektor lainnya dalam melakukan proses produksi atau disebut sebagai sektor penggerak sektor lainnya.

Tabel 4.9
Direct Backward Linkage (DBL) dan Direct and Indirect Backward Linkage (DIBL) Menurut Sektor Ekonomi, 2021

Deskripsi	Kode	*Backward Linkage*	*Ranking*
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1,19233	16
Pertambangan dan Penggalian	B	1,24939	9
Industri Pengolahan	C	1,38079	2
Pengadaan Listrik dan Gas	D	2,60875	1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1,19344	15
Konstruksi	F	1,24715	10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	1,23343	12
Transportasi dan Pergudangan	H	1,34657	4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	1,36557	3
Informasi dan Komunikasi	J	1,27712	8
Jasa Keuangan dan Asuransi	K	1,18813	17
Real Estate	L	1,19868	14
Jasa Perusahaan	MN	1,23195	13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	1,31787	7
Jasa Pendidikan	P	1,24276	11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	1,34289	5
Jasa Lainnya	RSTU	1,34095	6

Tabel 4.10
Direct Forward Lingkage (DFL) dan Direct and Indirect Forward Lingkage (DIFL) Menurut Sektor Ekonomi, 2021

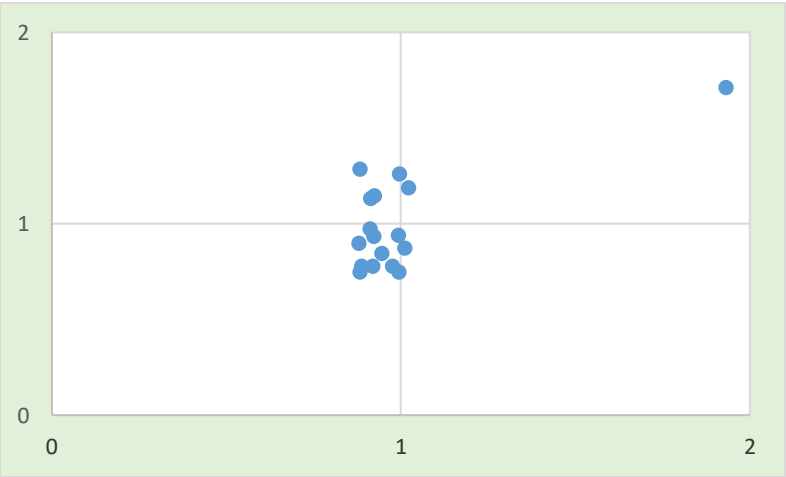
Deskripsi	Kode	*Forward Linkage*	*Ranking*
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	1,73477	2
Pertambangan dan Penggalian	B	1,54625	5
Industri Pengolahan	C	1,60228	4
Pengadaan Listrik dan Gas	D	2,31206	1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1,00861	17
Konstruksi	F	1,26158	9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	1,52708	6
Transportasi dan Pergudangan	H	1,69975	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	1,17772	11
Informasi dan Komunikasi	J	1,13883	12
Jasa Keuangan dan Asuransi	K	1,21190	10
Real Estate	L	1,04877	15
Jasa Perusahaan	MN	1,31231	7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	1,04932	13
Jasa Pendidikan	P	1,04898	14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	1,00873	16
Jasa Lainnya	RSTU	1,26882	8

Sektor-sektor yang memiliki nilai *Direct Forward Linkage* (DFL) terbesar pada umumnya sama dengan sektor-sektor yang memiliki nilai DIFL terbesar.

4.6.2. Indeks Daya Penyebaran dan Derajat Kepekaan

Indeks Daya Penyebaran (IDP) merupakan keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh matriks kebalikan Leontief, sedangkan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) merupakan keterkaitan langsung dan tak langsung ke depan yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief.

Sektor yang memiliki IDP tinggi mengindikasikan sektor tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. Sebaliknya, sektor yang memiliki IDK tinggi berarti sektor tersebut memiliki keterkaitan ke depan atau daya dorong yang cukup kuat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor yang memiliki IDP lebih dari satu (>1) berarti daya penyebaran sektor tersebut di atas rata- rata daya penyebaran secara keseluruhan. Demikian halnya untuk IDK, sektor yang mempunyai IDK lebih dari satu (>1) berarti derajat kepekaan sektor tersebut di atas derajat kepekaan rata-rata secara keseluruhan.



Gambar 4.1. Diagram Keterkaitan Antar Sektor (IDP dan Derajat Kepekaaan)

Diagram keterkaitan antar sektor digunakan untuk mempermudah melihat sektor yang saling berkaitan, yang terdiri dari garis vertikal yang menunjukkan IDK dan garis horizontal yang menunjukkan IDP. Diagram tersebut memiliki empat kuadran. Kuadran pertama merupakan sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan sektor ke belakang (hulu) dan ke depan (hilir) yang tinggi. Kuadran kedua merupakan sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan sektor ke belakang (hulu) yang rendah, namun memiliki hubungan dengan sektor ke depan (hilir) yang tinggi. Kuadran ketiga merupakan sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan sektor ke belakang (hulu) dan ke depan (hilir) yang rendah.

Kuadran keempat merupakan sektor-sektor yang memiliki hubungan dengan sektor ke belakang (hulu) tinggi, namun memiliki hubungan dengan sektor ke depan (hilir) yang rendah.

Tabel 4.11
Indeks Daya Penyebaran (IDP) dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK)
Menurut Sektor Ekonomi, 2021

Deskripsi	Indeks Daya Penyebaran	Rangking	Indeks Derajat Kepekaan	Rangking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88291	16	1,28458	2
Pertambangan dan Penggalian	0,92516	9	1,14498	5
Industri Pengolahan	1,02246	2	1,18647	4
Pengadaan Listrik dan Gas	1,93176	1	1,71205	1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,88373	15	0,74687	17
Konstruksi	0,92350	10	0,93419	9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91334	12	1,13079	6
Transportasi dan Pergudangan	0,99712	4	1,25865	3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01119	3	0,87209	11
Informasi dan Komunikasi	0,94570	8	0,84329	12
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87980	17	0,89740	10
Real Estate	0,88761	14	0,77660	15
Jasa Perusahaan	0,91224	13	0,97176	7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,97587	7	0,77701	13
Jasa Pendidikan	0,92025	11	0,77676	14
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99440	5	0,74695	16
Jasa Lainnya	0,99296	6	0,93955	8

Keterkaitan antar sektor yang berpengaruh terhadap pembentukan output di Provinsi Kalimantan Utara dapat diidentifikasi dengan melihat plot antara IDP dan IDK setiap sektor dalam perekonomian. Dari hasil plot yang

dilakukan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2, maka nilai IDP dan IDK dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran, sebagai berikut:

Kuadaran 1

Sektor-sektor yang terdapat di kuadran 1 ini memiliki nilai IDP dan IDK yang tinggi (lebih dari 1), merupakan simpul perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, yang berperan penting sebagai lapangan usaha atau kegiatan antara yang menghubungkan berbagai lapangan usaha di hulu dan hilir, sehingga lapangan usaha tersebut harus ditingkatkan keberadaan baik jumlah aktifitas maupun nilai output atau produksi yang dihasilkan. Terdapat dua lapangan usaha di Kalimantan Utara yang berada di kuadran 1 yakni lapangan usaha pengadaan listrik & gas dan lapangan usaha industri pengolahan.

Kuadran 2

Dengan IDK yang tinggi dan IDP yang rendah hendaknya sektor-sektor pada kuadran 2 dapat menggerakkan sektor-sektor hilir yang memanfaatkan output dari sektor-sektor tersebut secara optimal. Terdapat empat lapangan usaha di Kalimantan Utara yang berada di kuadran 2 yakni lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Kuadran 3

Sektor-sektor pada kuadran 3 cenderung sebagai sektor pendukung bagi pengembangan sektor-sektor lain baik kegiatan di hulu maupun di hilir khususnya terhadap kegiatan produksi domestik. Terdapat sepuluh lapangan usaha di Kalimantan Utara yang berada di kuadran 3, yakni lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate, lapangan usaha jasa perusahaan, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, lapangan usaha jasa pendidikan, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, lapangan usaha jasa lainnya.

Kuadran 4

Sektor-sektor pada kuadran 4 yang memiliki IDP tinggi dan IDK rendah, sangat tergantung dengan sektor-sektor hulu karena daya penyebarannya yang tinggi, sehingga hendaknya dapat memanfaatkan secara optimal sektor-sektor di hulu untuk mendukung aktifitas atau kegiatan produksi yang pada gilirannya dapat menggerakkan nilai total ekonomi wilayah secara signifikan. Hanya terdapat satu lapangan usaha di Kalimantan Utara yang berada di kuadran 4, yakni lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum.

Jika IDP dan IDK ini dijumlahkan maka akan diperoleh indeks total keterkaitan antar sektor (total linkage). Suatu sektor yang memiliki nilai indeks total keterkaitan lebih besar dari 2, berarti sektor tersebut memiliki indeks total keterkaitan lebih tinggi dari rata-rata indeks lainnya.

Penggunaan indeks total keterkaitan untuk melihat hubungan antar sektor menunjukkan adanya penambahan sektor-sektor yang menjadi simpul perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 4.12 Indeks Daya Penyebaran (IDP), Indeks Derajat Kepekaan (IDK) dan Indeks Total Keterkaitan menurut Sektor Ekonomi, 2021

Deskripsi	Indeks Daya Penyebaran	Indeks Derajat Kepekaan	Indeks Keterkaitan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88291	1,28458	2,16749
Pertambangan dan Penggalian	0,92516	1,14498	2,07014
Industri Pengolahan	1,02246	1,18647	2,20894
Pengadaan Listrik dan Gas	1,93176	1,71205	3,64381
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,88373	0,74687	1,63060
Konstruksi	0,92350	0,93419	1,85769
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91334	1,13079	2,04413
Transportasi dan Pergudangan	0,99712	1,25865	2,25577
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01119	0,87209	1,88328
Informasi dan Komunikasi	0,94570	0,84329	1,78899
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87980	0,89740	1,77720
Real Estate	0,88761	0,77660	1,66421
Jasa Perusahaan	0,91224	0,97176	1,88400
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,97587	0,77701	1,75288
Jasa Pendidikan	0,92025	0,77676	1,69702
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99440	0,74695	1,74135
Jasa Lainnya	0,99296	0,93955	1,93251

4.7. Penentuan Sektor Unggulan

Keterbatasan sumber daya pembangunan, seperti: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, mengharuskan adanya prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, untuk menentukan prioritas tersebut sangat tergantung pada tujuan yang akan dicapai dalam pengembangan daerah bersangkutan. Jika tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan maka pengembangan sumber daya diarahkan pada lapangan usaha unggulan yang mempunyai nilai tambah tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya.

Tabel 4.13 Lapangan Usaha Unggulan Provinsi Kalimantan Utara, 2021

Lapangan Usaha	Indeks Daya Penye-baran	Indeks Derajat Kepekaan	Indeks Keter-kaitan	Ranking	Distribusi terhadap PDRB	Ranking
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88291	1,28458	2,16749	4	16,34	2
Pertambangan dan Penggalian	0,92516	1,14498	2,07014	5	26,72	1
Industri Pengolahan	1,02246	1,18647	2,20894	3	8,97	5
Pengadaan Listrik dan Gas	1,93176	1,71205	3,64381	1	0,06	16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,88373	0,74687	1,63060	17	0,06	16
Konstruksi	0,92350	0,93419	1,85769	10	13,68	3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,91334	1,13079	2,04413	6	12,49	4
Transportasi dan Pergudangan	0,99712	1,25865	2,25577	2	6,31	6
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,01119	0,87209	1,88328	9	1,51	10
Informasi dan Komunikasi	0,94570	0,84329	1,78899	11	2,66	8
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87980	0,89740	1,77720	12	1,13	12
Real Estate	0,88761	0,77660	1,66421	16	0,74	13
Jasa Perusahaan	0,91224	0,97176	1,88400	8	0,22	15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,97587	0,77701	1,75288	13	4,69	7
Jasa Pendidikan	0,92025	0,77676	1,69702	15	2,55	9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99440	0,74695	1,74135	14	1,14	11
Jasa Lainnya	0,99296	0,93955	1,93251	7	0,73	14

Berdasarkan angka indeks keterkaitan, lima lapangan usaha yang menempati posisi tertinggi yakni lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dengan angka indeks keterkaitan sebesar 3,64, diikuti lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 2,26, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 2,21 , lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,17, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 2,07. Selanjutnya jika dilihat dari distribusi terhadap PDRB, lima lapangan usaha yang menempati posisi tertinggi yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan distribusi sebesar 26,72 , diikuti lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 16,34, lapangan usaha konstruksi sebesar 13,68 , lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,49, dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,97. Terdapat tiga lapangan usaha yang menempati posisi tertinggi berdasarkan indeks keterkaitan maupun berdasarkan distribusi terhadap PDRB yakni lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan lapangan usaha industri pengolahan. Ketiga lapangan usaha inilah yang menjadi lapangan usaha unggulan di Kalimantan Utara.

BAB 5
ANALISIS OPTIMASI PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA – SUATU MODEL INPUT OUTPUT

BAB 5
ANALISIS OPTIMASI PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA – SUATU MODEL INPUT OUTPUT

Model optimasi alokasi anggaran APBD yang memperhatikan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang besar terhadap output, tenaga kerja, dan pajak, perlu dibangun sehingga mampu memberikan dampak optimal pada penciptaan output, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan pajak. Model optimasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pada pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat. Untuk membangun model optimasi APBD digunakan kombinasi model Input-Output, *Linier Programming*, dan *Goal Programming*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimasi anggaran APBD dengan menggunakan model *Goal Programming* (GP) dimana optimasi output, tenaga kerja, dan pajak, dilakukan secara serentak dengan bobot tenaga kerja sebesar dua kali target lainnya merupakan model terbaik yang memberikan hasil optimal pada penciptaan output, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa dari analisis dampak belanja APBD simulasi terhadap pembentukan output, penciptaan tenaga kerja, dan penciptaan pajak menunjukkan terjadi peningkatan baik di sisi output, tenaga kerja, dan pajak di Provinsi kalimantan Utara. Hal ini membuktikan bahwa penajaman alokasi belanja APBD di sektor-sektor terpilih perlu dilakukan sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang optimum kepada masyarakat yang pada gilirannya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

pembangunan ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah pusat lebih berperan dalam kebijaksanaan makro pembangunan, sedangkan pemerintah daerah menangani operasional pembangunan. Mengingat peran pemerintah daerah yang cukup dominan maka peran ini harus dapat dimaksimalkan agar tujuan pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dapat dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dana pembangunan daerah dalam APBD harus dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan, seperti penciptaan output, penciptaan tenaga kerja, dan perolehan pajak. Dalam rangka mengoptimalkan penggunan APBD tersebut diperlukan suatu kajian untuk meneliti penggunaan APBD dan membangun model optimasinya sebagai dasar dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Dalam rangka menghadapi berbagai masalah sosial ekonomi, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan dalam penyusunan APBD sebaik mungkin, khususnya dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah atau biasa disebut sebagai sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, alokasi anggaran guna penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik yang tercermin dalam APBD seharusnya mengarah kepada sektor-sektor unggulan yang mampu memberikan stimulus pada perekonomian daerah sehingga terjadi peningkatan output, peningkatan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan penerimaan daerah, dan perbaikan kualitas sumber daya manusianya. Bukan sebaliknya, anggaran daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang konsumtif dan dampaknya kurang dirasakan oleh masyarakat daerah tersebut.

Kebijakan alokasi anggaran di Provinsi kalimantan Utara perlu didasari pada kerangka berpikir untuk menggunakan anggaran yang ada lebih optimal karena penggunaan anggaran yang kurang optimal akan menyebabkan masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, di waktu yang akan datang diperlukan model baru dalam alokasi APBD agar dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pada pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat. Model baru alokasi anggaran tersebut sebaiknya terkait dengan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap output, penciptaan tenaga kerja, dan pendapatan daerah.

5.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan (Waterston dalam Juremi, 2013). Kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Menurut Prof. Timbergen, pengertian kebijaksanaan pembangunan lebih luas dari perencanaan pembangunan. Usaha berencana yang dilakukan melalui peran pemerintah pada umumnya termasuk kategori kebijaksanaan pembangunan, sedangkan suatu program investasi yang terdiri dari proyek-proyek merupakan perencanaan.

5.2. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam perekonomian suatu negara/daerah, pemerintah memiliki peran ekonomi yang sangat penting, baik sebagai konsumen, produsen,

maupun pengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang tertentu. Pemerintah merupakan salah satu unit institusi domestik (residen) yag menjadi pelaku aktivitas ekonomi disamping institusi lainnya, seperti: rumah tangga, korporasi finansial, korporasi non finansial, dan lembaga non profit yang melayani rumah tangga. Unit pemerintah merupakan entitas legal yang unik, yang dibentuk melalui proses politik yang mempunyai wewenang legislatif, yudikatif, atau eksekutif atas unit institusi lain di dalam wilayah tertentu (Terjemahan Sistem Neraca Nasional 2008, 2013: 442).

Sebagai unit institusi, fungsi utama pemerintah adalah bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat atau individu rumah tangga dan mendanainya dari perpajakan atau pendapatan lainnya, mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan melalui transfer serta terlibat dalam produksi non-pasar. Pemerintahan umum di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah pusat menjalankan segala aktivitasnya dengan mengacu pada APBN sedangkan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menjalankan segala aktivitasnya dengan mengacu pada APBD. APBN/APBD tersebut menjabarkan pendapatan dan belanja pemerintah serta transfer dari pemerintah ke rumah tangga dan perusahaan dalam bentuk transfer sosial dan subsidi.

5.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah seringkali gagal sehingga aktivitasnya tidak efektif dan efisien. Menurut Stiglitz (2000) dalam Wakhidin (2005), beberapa penyebab kegagalan pemerintah adalah terbatasnya informasi, terbatasnya kontrol terhadap respon pasar privat, terbatasnya kontrol terhadap birokrasi, dan adanya tekanan oleh proses politik.

Berdasarkan kenyataan di atas, salah satu usaha untuk mengurangi kegagalan pemerintah adalah dengan menyediakan informasi yang lebih baik pada pengambil kebijakan. Berkenaan dengan anggaran, kegagalan pemerintah dapat dikurangi dengan menyediakan informasi mengenai dampak alokasi anggaran terhadap sasaran-sasaran pembangunan.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengaan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh

proses perencanaan pembangunan daerah.

APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di lain pihak menggambarkan perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

5.4. Optimasi Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran pemerintah daerah disusun untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah dalam bidang ekonomi diarahkan pada pembentukan output, penciptaan tenaga kerja, dan penerimaan pajak. Dengan demikian maka alokasi anggaran diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut secara maksimal.

Setiap sektor ekonomi memiliki kontribusi yang berbeda terhadap output, tenaga kerja, dan pajak, oleh karenanya perbedaan alokasi anggaran pemerintah menurut sektor akan memengaruhi pencapaian nilai-nilai tersebut. Sejalan dengan hal itu, maka untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, anggaran pemerintah harus dialokasikan pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar pada tujuan pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal. Namun demikian, karena terdapat banyak tujuan pembangunan yang akan dicapai maka alokasinya menjadi lebih rumit. Untuk mengatasinya digunakan analisis gabungan antara *Linier Programming* (LP) dan Input-Output (I-O).

5.5. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang deskripsi/gambaran umum APBD dan pengeluaran konsumsi pemerintah di Provinsi Kalimantan Utara.

5.6. Matriks Pengganda

Dalam model ekonomi makro dikenal suatu terminologi yang disebut sebagai pengganda (*multiplier*) yang menjelaskan dampak yang terjadi terhadap variabel endogen akibat perubahan pada variabel eksogen. Tahapan dalam menghitung matriks pengganda adalah sebagai berikut:

1. Menghitung koefisien input.

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

dimana:

a_{ij} = koefisien input sektor ke i oleh sektor ke-j
x_{ij} = penggunaan input sektor ke i oleh sektor ke-j
X_j = output sektor ke-j

Dalam suatu Tabel I-O, matriks koefisien input yang merupakan kumpulan berbagai koefisien input disebut sebagai matriks A^d.

2. Menghitung matriks $(I - A^d)$.
3. Menghitung matriks pengganda $Z = (I - A^d)^{-1}$, matriks pengganda ini dikenal dengan matriks kebalikan Leontief.

5.7. Analisis Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi

- Daya Penyebaran

Koefisien Indeks Daya Penyebaran menunjukkan koefisien keterkaitan yang memberikan gambaran tentang dampak dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Koefisien Indeks Daya Penyebaran merupakan keterkaitan langsung dan tak langsung ke belakang (*direct and indirect backward linkage*) yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$\beta_j = \frac{\sum_{i=1}^{n} \alpha_{ij}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} \alpha_{ij}}$$

- Derajat Kepekaan

Koefisien Indeks Derajat Kepekaan menunjukkan koefisien keterkaitan yang memberikan gambaran tentang dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan akhir pada masing-masing sektor perekonomian. Koefisien Indeks Derajat Kepekaan merupakan keterkaitan langsung dan tak langsung ke depan (*direct and indirect forward linkage*) yang dinormalkan dengan jumlah sektor dan jumlah seluruh koefisien matriks kebalikan Leontief. Penghitungannya menggunakan rumus:

$$\gamma_i = \frac{\sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} \alpha_{ij}}$$

Keterangan:

DBL_j = keterkaitan langsung ke belakang sektor ke j

$DIBL_j$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke belakang sektor ke j

α_{ij} = sel matriks kebalikan Leontief $(I-A^d)^{-1}$ pada baris ke i kolom ke j menunjukkan dampak yang terjadi terhadap output sektor ke i akibat perubahan permintaan akhir sektor ke j

DFL_i = keterkaitan langsung ke depan sektor ke i

$DIFL_i$ = keterkaitan langsung dan tidak langsung ke depan sektor ke i

B_j = Indeks Daya Penyebaran sektor ke j

γ_i = Indeks Derajat Kepekaan sektor ke i

5.8. Analisis Dampak

- Dampak terhadap pembentukan output

$$X302 = (I - A^{d_j})^{-1} F302$$

- Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja

$L_{302} = X_{302}$, dengan $\hat{l}$ = tenaga kerja i / Output i

- Dampak terhadap penciptaan pajak

$T_{302} = \hat{T} X_{302}$, dengan $\hat{T}$ = pajak i / Output i

Keterangan:

X_{302}= output yang terbentuk akibat dampak APBD

F_{302} = pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P)/APBD

L_{302} = tenaga kerja yang terbentuk akibat dampak PK-P/APBD

T_{302}= pajak lainnya atas produksi neto yang terbentuk akibat dampak PK-P/APBD

5.9. Gambaran APBD Provinsi Kalimantan Utara 2021

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata dan makmur. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyusun rencana pembangunan untuk periode jangka panjang, menengah, dan pendek. Dalam konteks pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dalam hal pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah (anggaran defisit), sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu, jika pendapatan lebih besar dari belanja daerah (anggaran surplus) maka penggunaan surplus diutamakan untuk pembayaran pokok utang, investasi, pemberian pinjaman dan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah meliputi : (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang terdiri dari transfer pemerintah pusat yang mencakup dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa; serta transfer antar daerah yang mencakup pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, digunakan untuk membiayai penyelenggaran urusan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk memperoleh PAD mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerahnya, juga menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021, jumlah pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditunjukkan dengan rata-rata

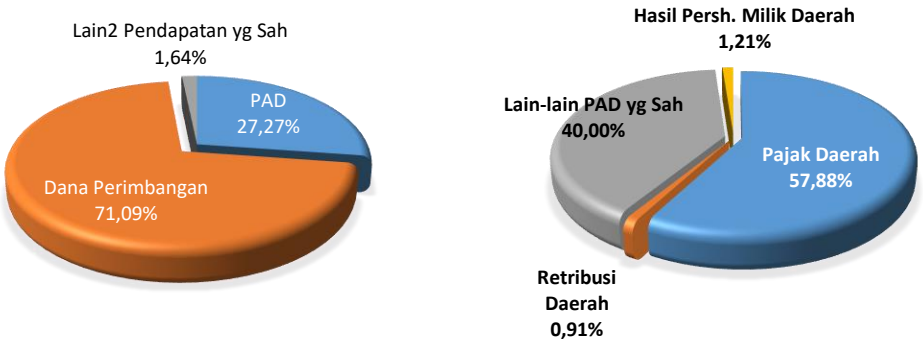
pertumbuhan sebesar 1,32 persen per tahun, atau dengan besaran Rp 2,61 triliun di tahun 2019 meningkat menjadi Rp 2,49 triliun tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 hingga 2021 memiliki besaran yang fluktuatif, dimana pada tahun 2019 tercatat sebesar 655,85 miliar rupiah menjadi 557,65 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 678,45 miliar pada tahun 2021. Sementara itu dana perimbangan memiliki prosi terbesar dalam struktur APBD Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar Rp. 1,77 triliun atau 71,09 persen dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 5..1
Struktur APBD Provinsi Kalimantan Utara 2019-2021 (Miliar Rupiah)

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Pemerintah (Miliar Rupiah)		
	2019	2020	2021
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	655.846,21	557.646,13	678.455,88
1.1 Pajak Daerah	417.536,96	348.949,84	392.686,41
1.2 Retribusi Daerah	5.905,46	4.856,24	6.204,42
1.3 Hasil Perusahan Milik Daerah dan Pengelo-laan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.428,55	7.455,83	8.205,70
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	220.975,24	196.384,22	271.359,35
2. Dana Perimbangan	1.953.289,84	1.799.125,38	1.768.805,10
2.1 Bagi hasil Pajak	8.746,62	81.708,79	91.769,53
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	313.980,97	261.070,42	242.906,74
2.3 Dana Alokasi Umum	1.209.517,81	1.082.389,41	1.077.878,23
2.4 Dana Alokasi Khusus	342.324,84	373.956,77	356.250,60
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	936,37	78.680,21	40.748,26
3.1 Pendapatan Hibah	936,37	31.197,93	315,00
3.2 Dana Darurat	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
3.6 Lainnya	-	-	40.433,26
Jumlah	2.610.072,42	2.435.451,73	2.488.009,24

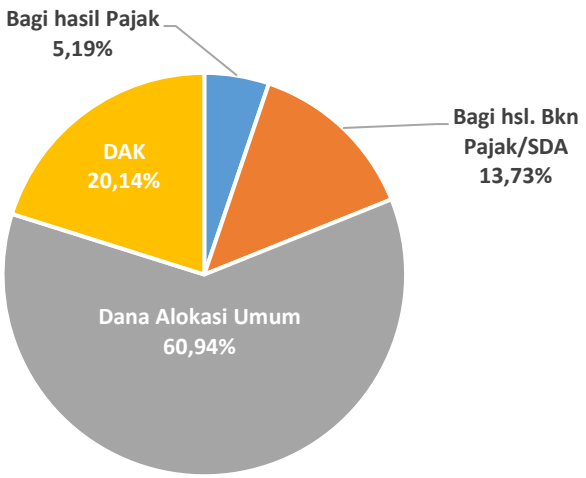
Gambar 5.1

Struktur APBD Kaltara dan Struktur Pendapatan Asli Daerah, 2021



Gambar 5.2

Struktur Dana Perimbangan Kaltara, 2021



Sementara itu dari total PAD, sebesar 57,88 persen berasal dari Pajak daerah; 40,00 persen berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah memberikan kontribusi masing-masing sebesar 0,91 persen dan 1,21 persen.

Dalam gambar 4.2 struktur Dana Perimbangan hampir 61 persen merupakan Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20,14 persen; Bagi Hasil Bukan pajak/SDA sebesar 13,73 persen; dan Bagi Hasil Pajak sebesar 5,19 persen.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dirinci atas jenis belanja modal. Selanjutnya, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dalam sub bab ini juga dibahas mengenai pertumbuhan belanja daerah, dimana analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun, dimana pada umumnya besaran nilai belanja daerah memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan penyesuaian terhadap tingkat inflasi, perubahan kurs, penyesuaian kondisi makro ekonomi, dan lainnya. Namun berkaitan dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah saat ini harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja, dan penghematan anggaran.

Sebagai salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi regional Kaltara yang terdampak pandemi Covid-19. Peran strategis APBD tersebut diwujudkan dalam bentuk kebiijakan politik anggaran yang pro terhadap peningkatan industri serta penyerapan tenaga kerja.

5.10. Gambaran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dalam PDRB

Pemerintahan umum terdiri dari unit institusi yang memenuhi tanggung jawab politik dan peran pengaturan ekonomi, serta penyediaan jasa (bahkan mungkin barang) untuk konsumsi individu maupun kolektif terutama yang

berbasis nonpasar, serta melakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan. Sektor pemerintahan umum terdiri atas seluruh unit pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa), serta seluruh Lembaga Non Profit yang dikontrol oleh unit pemerintah. PK-P merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir. Sebagai produsen nonpasar, PK-P didekati dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk nilai barang dan jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk disalurkan ke individu rumah tangga dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind purchased market production) dan output Bank Indonesia, dikurangi dengan penerimaan dari penjualan barang dan jasa.

Nilai PDRB Kalimantan Utara (ADH Berlaku) selama periode 2017–2021 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2017 hingga 2021. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2017, PDRB Kalimantan Utara ADH Berlaku sebesar Rp 76.927,57 miliar dan mencapai Rp 110.668,93 miliar pada tahun 2021.

Selain dinilai atas dasar harga (ADH) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH Konstan 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Penghitungan PDRB ADH Konstan pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2017–2021, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kalimantan Utara berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB ADH Berlaku, total PDRB ADH Konstan cenderung menunjukkan peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2019, kemudian menurun pada tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Nilai PDRB ADH Konstan tahun 2017 sebesar Rp 54.537,31 miliar meningkat menjadi Rp 61.417,79 miliar pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi Rp 60.746,21 miliar pada tahun 2020. Kemudian menjadi Rp 63.162,97 miliar pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara selama periode 2017-2021 masing-masing tahun adalah 6,80 persen pada tahun 2017; 5,36 persen pada tahun 2018; 6,89 persen pada tahun 2019; dan menurun menjadi (1,09) persen pada tahun 2020. Penurunan ini sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Dan ekonomi kembali tumbuh menjadi 3,98 persen pada tahun 2021.

Tabel 5.2.

PDRB Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	13 747,60	14 608,03	16 004,28	15 997,56	16 591,27
2. Konsumsi LNPRT	615,16	641,74	734,65	746,28	754,18
3. Konsumsi Pemerintah	6 184,83	6 595,91	6 693,00	7 617,18	7 591,64
4. PMTB	25 927,32	28 147,16	31 155,11	31 022,90	31 788,17
5. Perubahan Inventori	365,23	294,20	297,97	347,04	338,77
6. Ekspor Barang dan Jasa	66 003,88	75 761,94	91 951,32	97 883,78	114 374,62
7. Impor Barang dan Jasa	35 916,46	40 500,04	50 326,40	53 104,88	60 769,71
PDRB	**76 927,57**	**85 548,94**	**96 509,93**	**100 509,86**	**110 668,94**

Tabel. 5.3.

PDRB Kalimantan Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	8 989,27	9 309,64	9 804,38	9 745,67	10 036,27
2. Konsumsi LNPRT	404,85	408,65	452,51	455,06	450,81
3. Konsumsi Pemerintah	3 571,78	3 738,17	3 764,11	4 430,13	4 372,60
4. PMTB	16 969,66	17 840,02	19 068,55	18 489,76	18 609,93
5. Perubahan Inventori	305,56	236,65	246,26	281,52	252,10
6. Ekspor Barang dan Jasa	48 029,82	51 249,33	57 140,19	57 834,85	64 116,56
7. Impor Barang dan Jasa	23 733,63	25 323,15	29 058,20	30 490,77	34 675,30
PDRB	**54 537,31**	**57 459,31**	**61 417,79**	**60 746,21**	**63 162,97**

Tabel 5.4.

Distribusi PDRB Kalimantan Utara ADHB Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Persen)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	17,87	17,08	16,58	15,92	14,99
2. Konsumsi LNPRT	0,80	0,75	0,76	0,77	0,78
3. Konsumsi Pemerintah	8,04	7,71	6,94	7,89	7,87
4. PMTB	33,70	32,90	32,28	32,14	32,94
5. Perubahan Inventori	0,47	0,34	0,31	0,36	0,35
6. Ekspor Barang dan Jasa	85,80	88,56	95,28	101,42	118,51
7. Impor Barang dan Jasa	46,69	47,34	52,15	52,84	54,91
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5.5.

Pertumbuhan PDRB Kalimantan Utara ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2017–2021 (Persen)

Komponen	2017	2018	2019	2020*	2021**
1. Konsumsi Rumah Tangga	2,91	3,56	5,31	-0,60)	2,98
2. Konsumsi LNPRT	10,18	0,94	10,73	0,56	-0,93
3. Konsumsi Pemerintah	-9,51	4,66	0,69	17,69	-1,30
4. PMTB	3,99	5,13	6,89	-3,04	0,65
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	6,80	5,36	6,89	-1,09	3,98

5.11. Gambaran Sektor Ekonomi dalam Tabel Input-Output

5.11.1. Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis Input-Output, sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari permintaan akhir, yang komponennya terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dan LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori (PI), dan ekspor (X). Pada tahun 2021, total permintaan akhir di Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp80,87 triliun. Permintaan akhir tersebut berasal dari PK-RT dan PK-LNPRT sebesar Rp11,19 triliun (13,84%); PMTB sebesar Rp17,66 triliun (21,83%); ekspor sebesar Rp45,84 triliun (56,68%); PK-P sebesar Rp6,16 triliun (7,62%), dan PI sebesar Rp0,32 triliun (0,03%).

Tabel 5.6.
Total Permintaan Akhir - Tabel Input-Output Kalimantan Utara
Atas Dasar Harga Produsen Menurut 17 Kategori

Kategori/Lapangan Usaha	Total Permintaaan Akhir (Juta Rupiah)	Persentase (%)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.992.897	11,12
2. Pertambangan dan Penggalian	18.627.556	23,03
3. Industri Pengolahan	15.451.804	19,11
4. Pengadaan Listrik dan Gas	311.390	0,39
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	51.684	0,06
6. Konstruksi	10.849.148	13,41
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.434.598	7,96
8. Transportasi dan Pergudangan	6.367.805	7,87
9. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1.759.342	2,18
10. Informasi dan Komunikasi	2.173.925	2,69
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	659.099	0,81
12. Real Estate	1.215.349	1,50
13. Jasa Perusahaan	170.858	0,21
14. Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.865.537	6,02
15. Jasa Pendidikan	1.260.514	1,56
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	780.969	0,97
17. Jasa Lainnya	902.406	1,12
Total Permintaan Akhir	80.874.880	100,00

Apabila dilihat lebih rinci, komposisi permintaan akhir berdasarkan klasifikasi 17 sektor Tabel I-O Provinsi Kalimantan Utara terlihat bahwa sektor-sektor yang mendominasi adalah sektor pertambangan dan penggalian (23,03%; industri pengolahan (19,11%); sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan (11,12%); sektor konstruksi (13,41%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (7,96%); dan transportasi dan pergudangan (7,87%). Sedangkan sektor-sektor lainnya kurang dari 7%.

5.11.2. Komponen Permintaan Akhir Pencipta Output, Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Bruto (NTB)

Nilai dampak pengganda (*multiplier effect*) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menciptakan output, tenaga kerja, dan Nilai Tambah Bruto (NTB). Berdasarkan Tabel 5.7 misalnya, sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai dampak pengganda output sebesar 2,6088; dampak pengganda tenaga kerja sebesar 0,0031; dan dampak pengganda NTB sebesar 0,6037; ini berarti bahwa setiap kenaikan Rp1 juta terhadap permintaan pengadaan listrik dan gas akan menyebabkan kenaikan output pada perekonomian sebesar Rp2,6088 juta; kenaikan tenaga kerja sebanyak 0,0031 orang; dan kenaikan NTB sebesar Rp0,6037 juta.

Berdasarkan Tabel 5.7 di bawah ini, dapat diketahui bahwa sektor yang berkemampuan besar untuk menciptakan output adalah sektor listrik dan gas; sektor industri pengolahan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor transportasi dan pergudangan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sedangkan sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar untuk menciptakan tenaga kerja adalah sektor jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan soaial; pengadaan air, penglolaaan sampah dan daur ulang; jasa lainnya; sektor akomodasi dan makan minum; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara itu, sektor-sektor yang memiliki kemampuan besar untuk menciptakan NTB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; real estat; sektor keuangan dan asuransi; jasa lainnya; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan dan jasa pendidikan.

Tabel 5.7

Dampak Pengganda Output, Tenaga Kerja, dan NTB, 2021

Kategori/Lapangan Usaha	Output	Tenaga Kerja	Nilai Tambah Bruto
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,7348	0,0077	0,9175
2. Pertambangan dan Penggalian	1,5462	0,0013	0,8391
3. Industri Pengolahan	1,6023	0,0036	0,8105
4. Pengadaan Listrik dan Gas	2,3121	0,0031	0,6037
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	1,0086	0,0120	0,5504
6. Konstruksi	1,2616	0,0021	0,7112
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,5271	0,0068	0,8241
8. Transportasi dan Pergudangan	1,6998	0,0030	0,6189
9. Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1,1777	0,0081	0,6958
10. Informasi dan Komunikasi	1,1388	0,0019	0,7130
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,2119	0,0038	0,8966
12. Real Estate	1,0488	0,0007	0,9080
13. Jasa Perusahaan	1,3123	0,0046	0,7303
14. Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,0493	0,0077	0,7423
15. Jasa Pendidikan	1,0490	0,0175	0,8033
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,0087	0,0132	0,7150
17. Jasa Lainnya	1,2688	0,0103	0,8525
Total Pengganda *(Multiplier Effect)*	22,9578	0,1072	12,9321

Sumber: Tabel Input-Output Provinsi Kalimantan Utara 2016 (Diolah)

5.11.3. Kontribusi Permintaan Akhir pada Penciptaan Output, Tenaga Kerja, dan Pajak

Kontribusi masing-masing komponen permintaan akhir terhadap penciptaan output, tenaga kerja, dan ntb dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pada tabel tersebut, misalnya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah kontribusinya dalam permintaan akhir sebesar 16,97 persen dari total permintaan akhir. Dengan jumlah permintaan akhir sebesar 16,97 persen tersebut, komponen ini memberikan dampak pada pembentukan output (output yang terbentuk karena adanya permintaan sektor pemerintah) sebesar 20,38 persen; memberikan kontribusi pada

penciptaan tenaga kerja sebesar 17,84 persen; dan pada penciptaan pajak sebesar 11,63 persen.

Tabel 5.8
Kontribusi Permintaan Akhir pada Penciptaan Output, Tenaga Kerja, dan Pajak, 2021

Sektor	Jumlah Permintaan Akhir		Dampak Output	
	Nilai (miliar rp.)	Kontribusi (%)	Nilai (miliar rp.)	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	13.874,60	42,82	13.185,96	36,69
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.498,26	16,97	7.323,69	20,38
PMTB	6.955,19	21,47	7.279,31	20,25
Perubahan Inventori	393,80	1,22	1.002,04	2,79
Ekspor Barang dan Jasa	5.677,43	17,52	7.149,94	19,89
Total	**32.399,28**	**100,00**	**35.940,94**	**100,00**

Lanjutan .....

Sektor	Dampak Tenaga Kerja		Dampak Pajak	
	Nilai (orang)	Kontribusi (%)	Nilai (orang)	Kontribusi (%)
(1)	(6)	(7)	(6)	(7)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	170.691	37,19	170.691	37,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	81.859	17,84	81.859	17,84
PMTB	74.795	16,30	74.795	16,30
Perubahan Inventori	13.694	2,98	13.694	2,98
Ekspor Barang dan Jasa	117.891	25,69	117.891	25,69
Total	**458.930**	**100,00**	**458.930**	**100,00**

Sumber: Tabel Input-Output Provinsi Kalimantan Utara 2016 (Diolah)

Selanjutnya, pada Tabel 5.8 terlihat bahwa komponen permintaan akhir yang berpengaruh besar pada output adalah perubahan inventori dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Permintaan akhir yang berpengaruh besar terhadap penciptaan tenaga kerja adalah perubahan inventori dan ekspor,

sedangkan yang berpengaruh besar terhadap penciptaan pajak adalah perubahan inventori dan PMTB.

Tabel 5.9.
Rasio Output, Tenaga Kerja, dan Pajak yang Terbentuk dengan Jumlah Permintaan Akhir yang Membentuknya, 2021

Sektor	Output/ Permintaan Akhir	Tenaga Kerja/ Permintaan Akhir	Pajak/ Permintaan Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	0,9504	0,0123	0,0042
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,3320	0,0149	0,0043
PMTB	1,0466	0,0108	0,0122
Perubahan Inventori	2,5445	0,0348	0,0130
Ekspor Barang dan Jasa	1,2594	0,0208	0,0057
Total	**1,1093**	**0,0142**	**0,0063**

5.12. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi

Guna mengetahui dampak dari penajaman alokasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Utara maka dilakukan simulasi terhadap komposisi alokasi belanja APBD. Belanja APBD simulasi ini mendasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja APBD simulasi dibuat dalam kurun waktu 2023-2026;
2. Belanja APBD simulasi dibuat dengan cara mengurangi alokasi belanja sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15 persen per tahun dan menambahkan pengurangan tersebut ke alokasi belanja 5 sektor yang memberikan *multiplier effect* terbesar pada target optimasi kombinasi output, tenaga kerja, dan pajak. Adapun 5 sektor tersebut beserta alokasi penambahan belanjanya adalah sektor industri pengolahan (5%); sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (4%); sektor kehutanan dan penebangan kayu (3%); sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan (2%); dan sektor pertambangan dan penggalian (1%).
3. Total belanja APBD simulasi sama dengan total belanja APBD sesungguhnya pada tahun anggaran tersebut.

Selanjutnya belanja APBD simulasi di atas diolah untuk melihat dampaknya terhadap pembentukan output, penciptaan tenaga kerja, dan penciptaan pajak.

4.12.1. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi terhadap Pembentukan Output

Pada Tabel 5.10 terlihat perbandingan dampak belanja APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 dengan APBD simulasi tahun 2021 terhadap pembentukan output. Dengan mengubah komposisi alokasi belanja dari sektor Industri Pengolahan sebesar 20 miliar, menghasilkan kenaikan output sebesar Rp 20.646 juta atau rata-rata terjadi kenaikan output sebesar 0,0265 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika ada penajaman alokasi belanja APBD akan menghasilkan tambahan output pada perekonomian Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 5.10.
Simulasi Output menurut Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah)

No.	Kategori	Output Awal	Shock	Tambahan Output	Output Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.237.049	0	5.238	15.242.288
2.	Pertambangan dan Penggalian	19.924.783	0	38	19.924.821
3.	Industri Pengolahan	19.020.121	20.000	20.646	19.040.767
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.713.089	0	113	1.713.203
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	61.947	0	1	61.948
6.	Konstruksi	12.021.780	0	172	12.021.951
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.056.893	0	914	9.057.807
8.	Transportasi dan Pergudangan	9.641.015	0	322	9.641.338
9.	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	2.326.137	0	23	2.326.160
10.	Informasi dan Komunikasi	2.505.021	0	7	2.505.028
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.401.862	0	37	1.401.899
12.	Real Estate	1.318.394	0	1	1.318.394
13.	Jasa Perusahaan	1.262.244	0	11	1.262.255
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.125.055	0	11	5.125.066
15.	Jasa Pendidikan	1.322.456	0	1	1.322.457
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	791.840	0	2	791.842
17.	Jasa Lainnya	1.384.189	0	78	1.384.267
Total		104.113.876	20.000	27.616	104.141.491

Sumber: Hasil Olahan

5.12.2. Analisis Dampak Alokasi Belanja APBD Simulasi terhadap Penciptaan Kompensasi Tenaga Kerja (Upah Gaji)

Tabel 5.11.
Simulasi Kompensasi Tenaga Kerja menurut Sektor Ekonomi
Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah)

No.	Kategori	Komppensasi Tenaga Kerja Awal	Shock	Tambahan Kompensasi TK	Kompensasi Tenaga Kerja Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.064.542	0	2.085	6.066.627
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.575.302	0	11	5.575.312
3.	Industri Pengolahan	4.499.203	20.000	4.884	4.504.087
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	41.113	0	3	41.116
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	14.465	0	0	14.465
6.	Konstruksi	3.132.041	0	45	3.132.085
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.691.261	0	373	3.691.634
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.287.743	0	43	1.287.786
9.	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	604.951	0	6	604.958
10.	Informasi dan Komunikasi	520.359	0	1	520.361
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	787.007	0	21	787.028
12.	Real Estate	107.529	0	0	107.529
13.	Jasa Perusahaan	339.638	0	3	339.641
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.617.802	0	4	1.617.806
15.	Jasa Pendidikan	709.550	0	0	709.551
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	268.836	0	1	268.836
17.	Jasa Lainnya	428.400	0	24	428.425
Total		29.689.741	20.000	7.502,7191	29.697.244

Sumber: Hasil Olahan

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh perubahan komposisi alokasi belanja APBD sebesar Rp 20 Milyar terhadap Kategori Industri Pengolahan, maka akan berdampak pada semua kategori. Terhadap kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan menambah kompensasi TK (upah) sebesar Rp.2.085 milyar dari kompenasasi TK awal sebesar Rp.6,064 triliun menjadi Rp.6,066 triliun; terhadap

kategori pertambangan akan bertambah sebesar Rp. 11 juta; terhadap Industri pengolahan sendiri akan bertambah sebesar Rp. 4,88 miliar; terhadap kategori perdagangan akan bertambah Rp.373 juta, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 5.11 di atas.

Tabel 5.12.
Simulasi Kompensasi Total Nilai Tambah Bruto (NTB)
menurut Sektor Ekonomi Tahun Anggaran 2021 (juta rupiah)

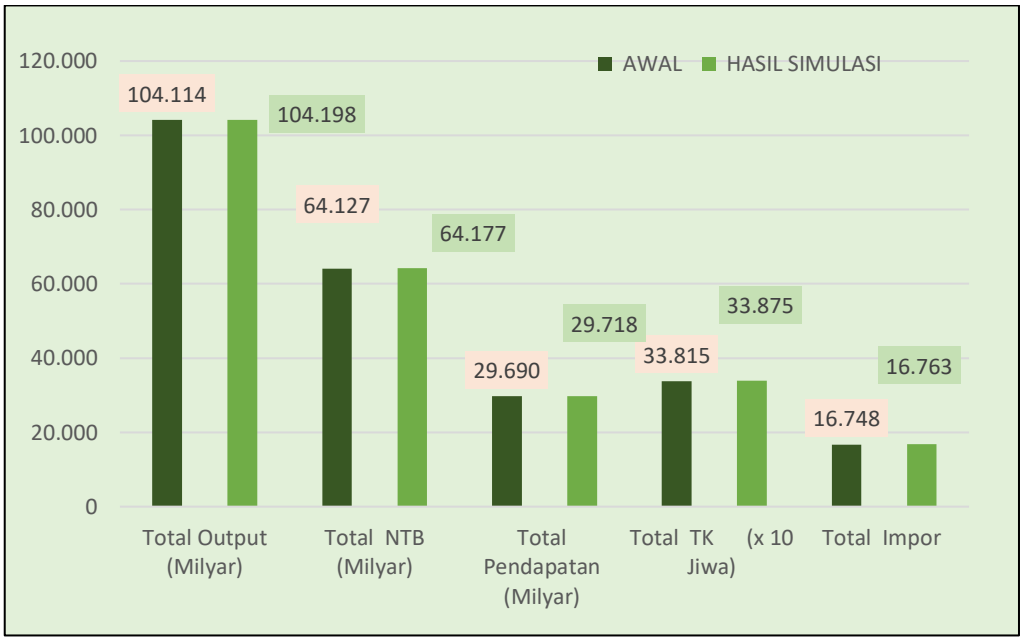
No.	Kategori	Total NTB Awal	Shock	Tambahan NTB	Total NTB Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.947.110	0	4.107	11.951.217
2.	Pertambangan dan Penggalian	14.006.952	0	26	14.006.978
3.	Industri Pengolahan	10.213.669	20.000	11.087	10.224.756
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	159.041	0	11	159.052
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	27.545	0	1	27.546
6.	Konstruksi	6.673.794	0	95	6.673.889
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.300.786	0	636	6.301.422
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.124.545	0	138	4.124.683
9.	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	1.069.088	0	11	1.069.099
10.	Informasi dan Komunikasi	1.511.406	0	4	1.511.410
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.094.071	0	29	1.094.100
12.	Real Estate	1.047.041	0	1	1.047.042
13.	Jasa Perusahaan	765.045	0	7	765.052
14.	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.988.278	0	7	2.988.284
15.	Jasa Pendidikan	878.470	0	1	878.471
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	421.231	0	1	421.232
17.	Jasa Lainnya	898.599	0	51	898.650
Total		64.126.672	20.000	16.210,52	64.142.882

Sumber: Hasil Olahan

Selanjutnya, untuk melihat pengaruh perubahan komposisi alokasi belanja APBD sebesar Rp 20 Milyar terhadap Kategori Industri Pengolahan, maka akan berdampak pada semua kategori. Terhadap kategori Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan akan menambah Total Nilai Tambah Bruto (NTB) sebesar Rp.4,107 milyar dari Total NTB awal sebesar Rp.11,397 triliun menjadi Rp.11,951 triliun; terhadap kategori pertambangan akan bertambah sebesar Rp. 26 juta; terhadap Industri pengolahan sendiri akan bertambah sebesar Rp. 11,087 miliar; terhadap kategori perdagangan akan bertambah Rp.636 juta, selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 5.12 di atas.

Gambar 5.3.
Simulasi Sebelum dan Sesudah Tambahan *(Shock)* APBD
Terhadap Output, NTB, Pendapatan, Tenaga Kerja, dan Impor
Tahun 2021



BAB 6
PENUTUP

BAB 6
PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Model optimasi alokasi anggaran APBD yang memperhatikan kontribusi sektor-sektor ekonomi yang besar terhadap output, tenaga kerja, dan pajak, perlu dibangun agar dapat memberikan sumbangan yang lebih besar pada pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat.
2. Optimasi anggaran APBD dengan menggunakan model *Goal Programming* (GP) dimana optimasi output, tenaga kerja, dan pajak, dilakukan secara serentak dengan bobot tenaga kerja sebesar dua kali target lainnya merupakan model terbaik yang memberikan hasil optimal pada penciptaan output, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan pajak.
3. Hasil analisis dampak belanja APBD simulasi terhadap pembentukan output, penciptaan tenaga kerja, dan penciptaan pajak menunjukkan terjadi peningkatan baik di sisi output, tenaga kerja, dan pajak di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini membuktikan bahwa penajaman alokasi belanja APBD di sektor-sektor terpilih perlu dilakukan sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang optimum kepada masyarakat yang pada gilirannya akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

6.2. Rekomendasi Kebijakan

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting & strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap mendasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel.

2. Ketercapaian sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-ukuran dibawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu :
    a. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan.
    b. Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD.
    c. Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan.
3. Dengan mengetahui data capaian dari RPJMD 2021-2026, maka dapat diketahui sasaran yang sudah dan belum tercapai, sehingga perlu adanya strategi khusus untuk sasaran yang belum tercapai setiap tahunnya dan penyesuaian target tahunan untuk sasaran yang sudah melewati target RPJMD 2021-2026.
4. Penerapan anggaran berbasis Tabel Input Output, maka sektor unggulan dan prioritas akan semakin fokus dalam penganggarannya, sehingga strategi dan program yang mendukung sektor unggulan dan prioritas akan tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga seyogyanya analisis Tabel Input Output, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 1999. *Kerangka Teori dan Analisis Tabel Input-Output*. Cetakan Kedua. Jakarta: BPS.

_____. 2000. *Teknik Penyusunan Tabel Input-Output*. Jakarta: BPS.

_____. 2015. *Tabel Input Output Indonesia 2010*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara 2016. *Tabel Input Output Provinsi Kalimantan Utara 2016*. Tanjung Selor.

Daryanto, A. 2004. *Keunggulan Daya Saing dan Teknik Identifikasi Komoditas Unggulan: Dalam Mengem- bangkan Potensi Ekonomi Regional*. Bogor: Agrimedia.

Daryanto, A. dan Y. Hafizrianda. 2010. *Analisis Input-Output dan Social Accounting Matrix untuk Pem- bangunan Ekonomi Daerah*. Bogor: IPB Press.

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Ghosh, A. 1964. *Experiments with Input-Output Models*. Cambridge: University of Cambridge. Irawan dan Soeparmoko. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty Offset.

Juremi. 2013. *Analisa Dampak Alokasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta: Analisis Input-Output*. [Tesis]. Jakarta: UI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi kalimantan Utara Tahun 2021-2026*. Tanjung Selor: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Priyarsono, dkk. 2007. *Ekonomi Regional*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Sukirno, Sadono. 1982. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

_____. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Jakarta: Erlangga.

Wakhidin, Masduki. 2005. *Optimasi Penerimaan dan Belanja Daerah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat: Suatu Model Kombinasi Goal Programming dan Input-Output*. [Disertasi]. Bogor: IPB.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

UNIVERSITAS
KALTARA